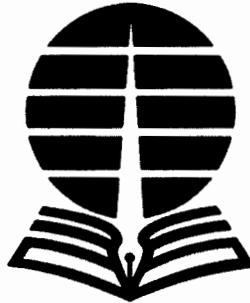


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BOS  
DI SMP NEGERI 2 SINTANG DAN SMP NEGERI 4 KELAM  
PERMAI KABUPATEN SINTANG**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Publik  
Bidang Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**JOKANG, S.IP**

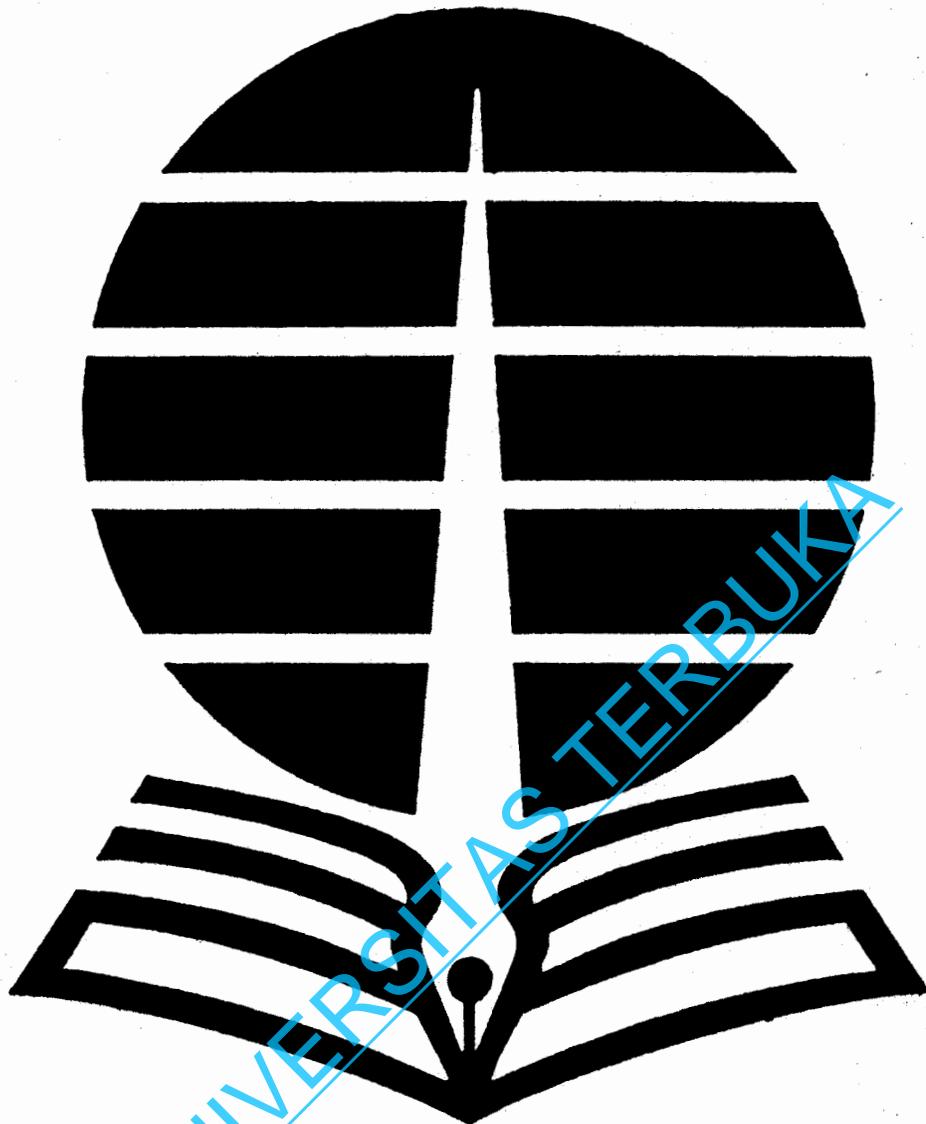
**NIM. 015535888**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2010**



## ABSTRACT

The Implementation of BOS (School Operational Aid) programe policy at SMPN.2 Sintang And SMPN.4 Kelam Permai high school in Sintang Regency.

**Jokang**  
Universitas Terbuka Jakarta  
[JokangSintang@yahoo.com.Id](mailto:JokangSintang@yahoo.com.Id).

**Keyword** : Policy, evaluation, programe.

This research is to evaluate the success of BOS programe policy in SMPN Sintang regency and is it appropriate with the rule or not. The evaluation of BOS programe policy was done in SMPN. 2 Sintang and SMPN. 4 Kelam Permai. BOS (School Operational Aid) is government programe in education which treat exhaustively high quality of nine years compulsory programe.

BOS programe can help the poor students to pay their school operational. This research is in SMPN. 2 Sintang and SMPN. 4 Kelam Permai based on school characteristic. This research is used the cualitatif method. To support this method, the researcher collect the data by interview, questionnaire and observation. Analisis used here is based on the data at the school.

To get the data, the researcher observe and interview whit the stakeholder of SMPN. 2 Sintang and SMPN. 4 Kelam Permai.

To answer the question about the success of BOS programe, the researcher use likert scale, ordinal scale and nominal scale.

In this research, the researcher found, no transparancy from the headmaster about using BOS fund and out of procedure to receive and deliver it.

The conclusion of this research is school management do not really understand about BOS programe, although they have known the BOS programe purpose through BOS guidance book and from the government.

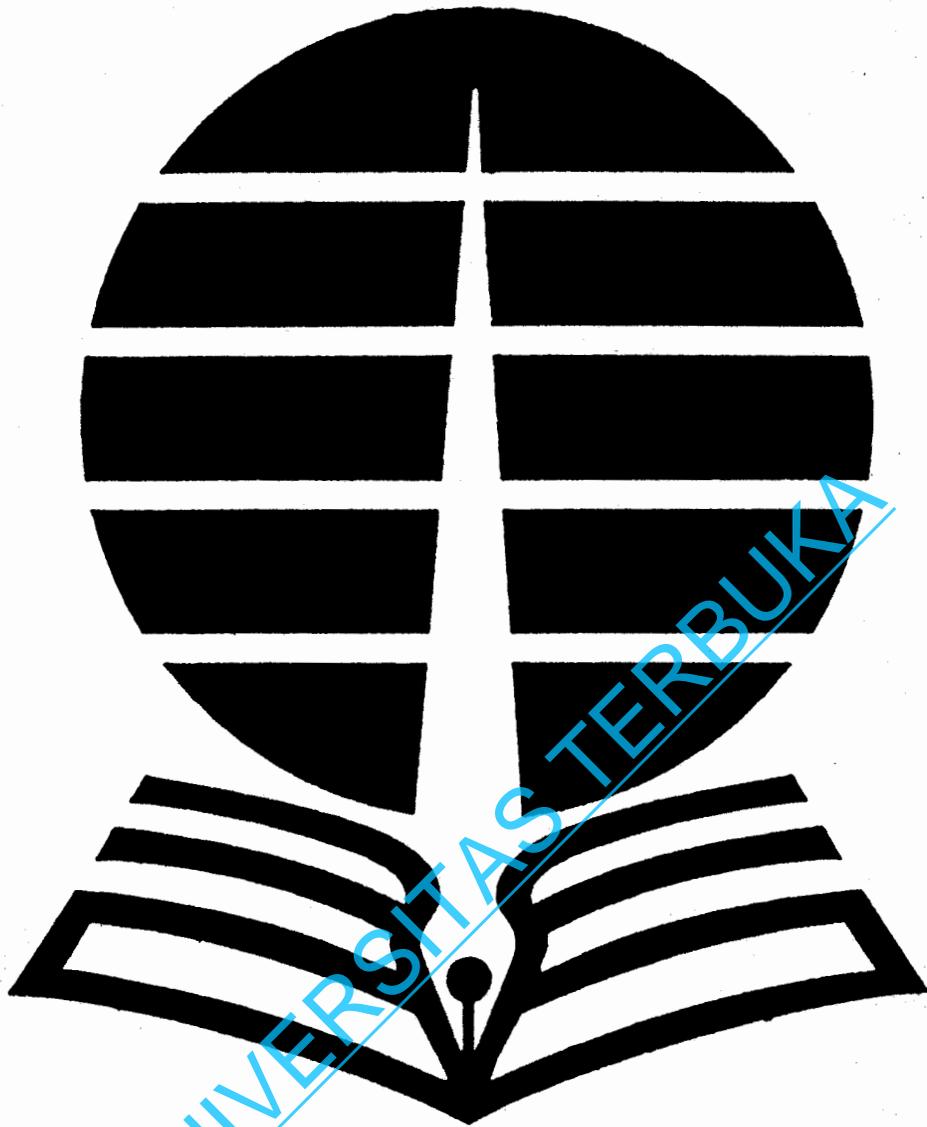
## ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program BOS  
Di SMP Negeri 2 Sintang dan SMP Negeri 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang

Jokang  
Universitas Terbuka Jakarta  
[JokangSintang@yahoo.com.id](mailto:JokangSintang@yahoo.com.id)

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan program BOS di SMPN Kabupaten Sintang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; evaluasi kebijakan program BOS dilakukan di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai. BOS merupakan program pemerintah di bidang pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar mengajar sembilan tahun yang bermutu. Dengan adanya program BOS siswa miskin atau kurang mampu dapat terbantu biaya operasional sekolahnya. Penelitian ini dilakukan di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 kelam Permai, berdasarkan karakteristik sekolah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendukung metode ini pengumpulan data melalui wawancara, questioner dan observasi. Analisis yang digunakan berdasarkan data yang terdapat dilapangan untuk mendapatkan data peneliti mengadakan observasi, dan wawancara dengan stakeholder SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai. Instrumen pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan tentang keberhasilan program BOS mempergunakan skala likert, skala ordinal dan skala nominal. Dalam penelitian ini ditemukan, Kepala Sekolah tidak transparansi, akuntable dalam menggunakan BOS serta menyalahi prosedur untuk menerima dan menyalurkan data BOS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen sekolah masih belum memahami dengan sungguh-sungguh program BOS, meskipun tujuan program BOS telah diketahui melalui buku panduan BOS dan pemerintah.



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Program BOS di SMP Negeri 2 Sintang dan SMP Negeri 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, 01 Februari 2010  
Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL



PALAK MEMBANGUN BANGSA  
TGL  
20  
A516DAAF319473347

ENAM RIBU RUPIAH  
6000



Jokang

NIM. 015535888

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**Judul TAPM** : Implementasi Kebijakan Program BOS Di SMP Negeri 2 Sintang dan  
SMP Negeri 4 Kelam Permai Kabuapten Sintang

**Penyusun TAPM** : **JOKANG**

**NIM** : 015535888

**Program Studi** : MAP

**Hari/ Tanggal** :

**Menyetujui :**

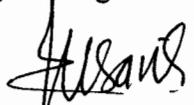
**Pembimbing I**

  
**Dr. Afrizal**  
NIP. 1591005 198810 1 001

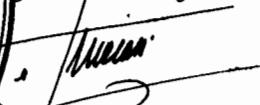
**Pembimbing II**

  
**Aria Jalil, Ph.D**  
NIP. 130664776

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik  
Program Magister Administrasi Publik**

  
**Dra. Susanti, M.Si**  
NIP. 19671214 199303 2 002

**Direktur  
Program Pascasarjana**

  
**Suciati, M.Sc. Ph.D**  
NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **JOKANG**  
 NIM : **015535888**  
 Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)**  
 Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Program BOS di SMP Negeri 2 Sintang dan SMP Negeri 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Sabtu, 23 Oktober 2010**  
 Waktu : **14.45 – 16.45 WIB**

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji:

Nama : **Dra. Susanti, M.Si**  
 NIP. 19671214 199303 2 002

Penguji Ahli :

Nama : **Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc, Sc**

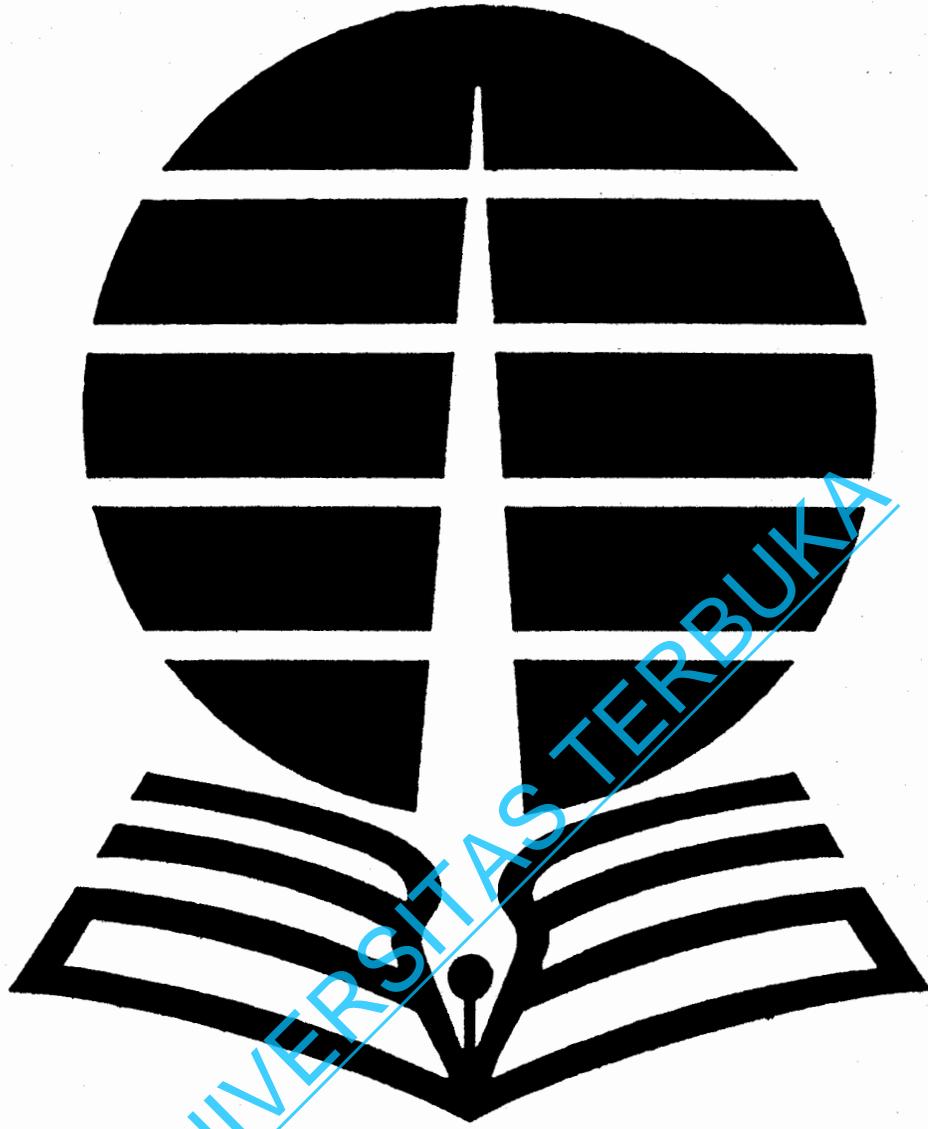
Pembimbing I :

Nama : **Dr. Afrizal**  
 NIP. 19591005 198810 1 001

Pembimbing II :

Nama : **Aria Jalil, Ph.D**  
 NIP. 130664776

*Susanti*  
 .....  
*Roy V. Salomo*  
 .....  
*Afrizal*  
 .....  
*Aria Jalil*  
 .....



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) berjudul Implementasi Kebijakan Program BOS Di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelayan Permai Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dan usulan judul penelitian tugas S2 dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ-UT Pontianak.

Dalam penulisan tugas akhir program magister ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan serta petunjuk yang sangat berharga dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat.

1. Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed.PhD, Rektor Universitas Terbuka Indonesia di Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
2. Dr. Suciati Direktur Pascasarjan-UT, pengelola UT Pusat, pengelola UPBJJ-UT Pontianak, para pembahas, para dosen UT Pontianak, rekan mahasiswa S2 MAP UT Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Inspektorat

Kabupaten Sintang, Perpustakaan Umum Sintang, serta guru-guru, OSIS, Komite SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada

3. Dr.AFRIZAL,M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Prof, Dr. ARIA JALIL, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan tekun memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ir. Edward Zubir, MM Kepala UPBJJ-UT Pontianak yang telah membantu memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa Program Pascasarjana di Pontianak.
6. Para Guru Besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan diri di masyarakat kelak.
7. Drs. Senen Maryono,M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tulus memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.
8. Timotius Yor,S.Pd.Ing Kepala SMP Negeri 2 Sintang
9. Robianto,S.AP Kepala SMP Negeri 4 Kelam Permai
10. Guru-guru SMP Negeri 2 Sintang
11. Guru-guru SMP Negeri 4 Kelam Permai
12. Suyanto Ketua Komite SMP Negeri 2 Sintang
13. Tomo Ketua Komite SMP Negeri 4 Kelam Permai
14. Staf Tata Usaha SMP Negeri 2 Sintang

15. Staf Tata Usaha SMP Negeri 4 Kelam Permai
16. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Sintang
17. Ketua OSIS SMP Negeri 4 Kelam Permai
18. Damianus Sudomo, Sipriana Suryani, S.Pd.Ing, Patrik Yongki Bellavonte, dan berbagai pihak yang telah membantu dan memperlancar penulisan tesis ini.

Semoga segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

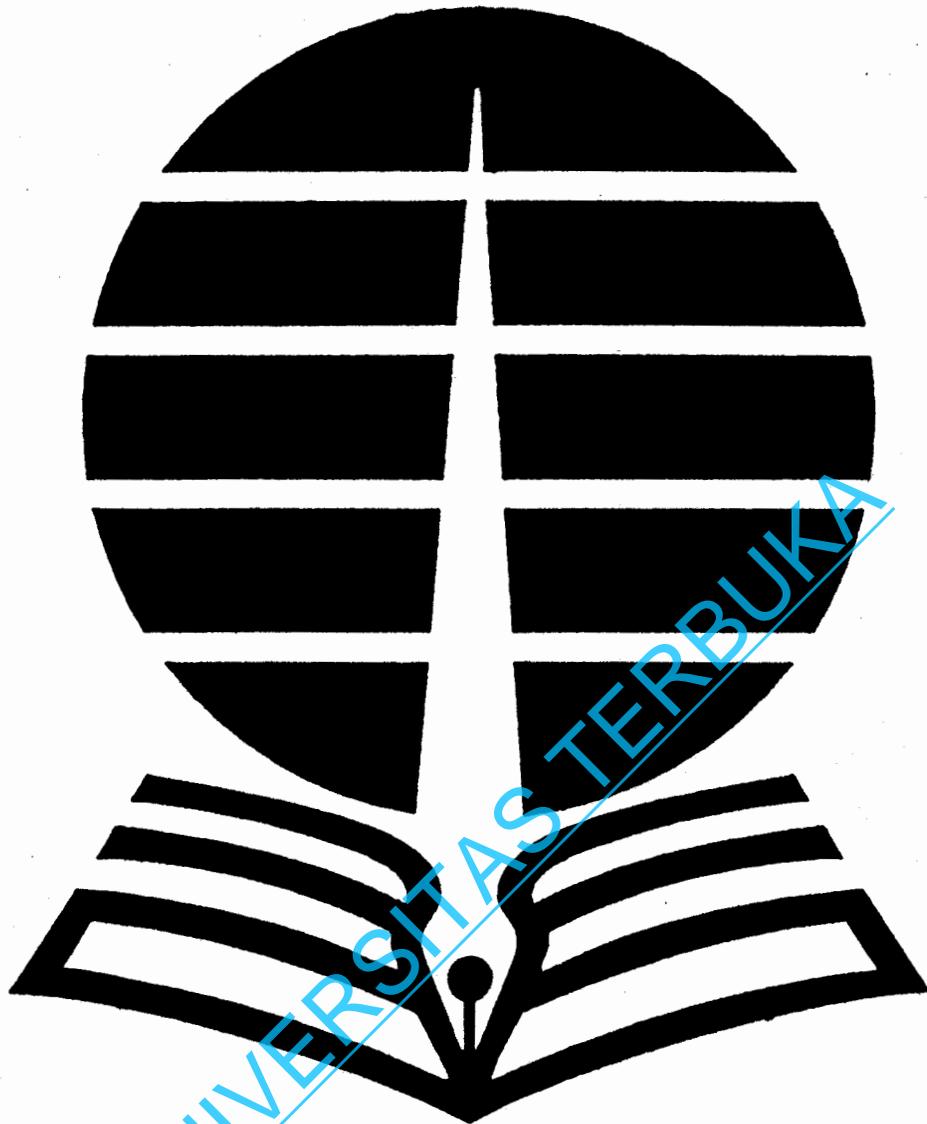
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan oleh sebab itu sekali lagi penulis memerlukan saran, usul, kritik yang membangun dari berbagai pihak, khususnya UT Pusat maupun UPBJJ-UT Pontianak. Untuk kesempurnaan Tugas Akhir Program Magister ini selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Sintang, Januari 2010  
Penulis

**Jokang, S.IP**  
NIM. 015535888

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Kajian Teoritik .....	13
B. Landasan Yuridis .....	46
C. Program BOS .....	50
D. Definisi Operasional.....	64
E. Kajian Terkait.....	67
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Rancangan Penelitian .....	76
B. Teori Penelitian.....	77
C. Responden .....	78
D. Alat Pengumpulan Data .....	78
E. Subjek Penelitian.....	79
F. Jenis Data Penelitian.....	80
G. Metode Analisis Data.....	83
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN TEMUAN</b>
A. Pembahasan .....	86
B. Temuan -- Temuan Penelitian.....	97
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran-Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Alokasi BOS Tahun 2009	60
Tabel 4.1	Operasional Variabel	66
Tabel 4.2	Penilaian Pengelolaan Dana BOS SMPN. 2 Sintang	94
Tabel 4.3	Penilaian Pengelolaan Dana BOS SMPN. 4 Kelam Permai	96
Tabel 4.4	Data Keadaan Siswa SMPN. 2 Sintang	111
Tabel 4.5	Pemanfaatan Dana BOS SMPN. 2 Sintang	111
Tabel 4.6	Pemanfaatan Dana BOS SMPN. 4 Kelam Permai	112
Tabel 4.7	Data Keadaan Siswa SMPN. 4 Kelam Permai	113
Tabel 4.8	Daftar Jenis Sekolah Penerima BOS	114
Tabel 4.9	Penyebaran Keluarga Prasejahtera	119
Tabel 4.10	Jumlah Sekolah, Rombel, Siswa dan Guru	120
Tabel 4.11	Anggaran dan Pendapatan	121
Tabel 4.12	Sarana dan Prasarana	125
Tabel 4.13	Sarana dan Prasarana	126
Tabel 4.14	Daftar Sekolah Penerima BOS	127

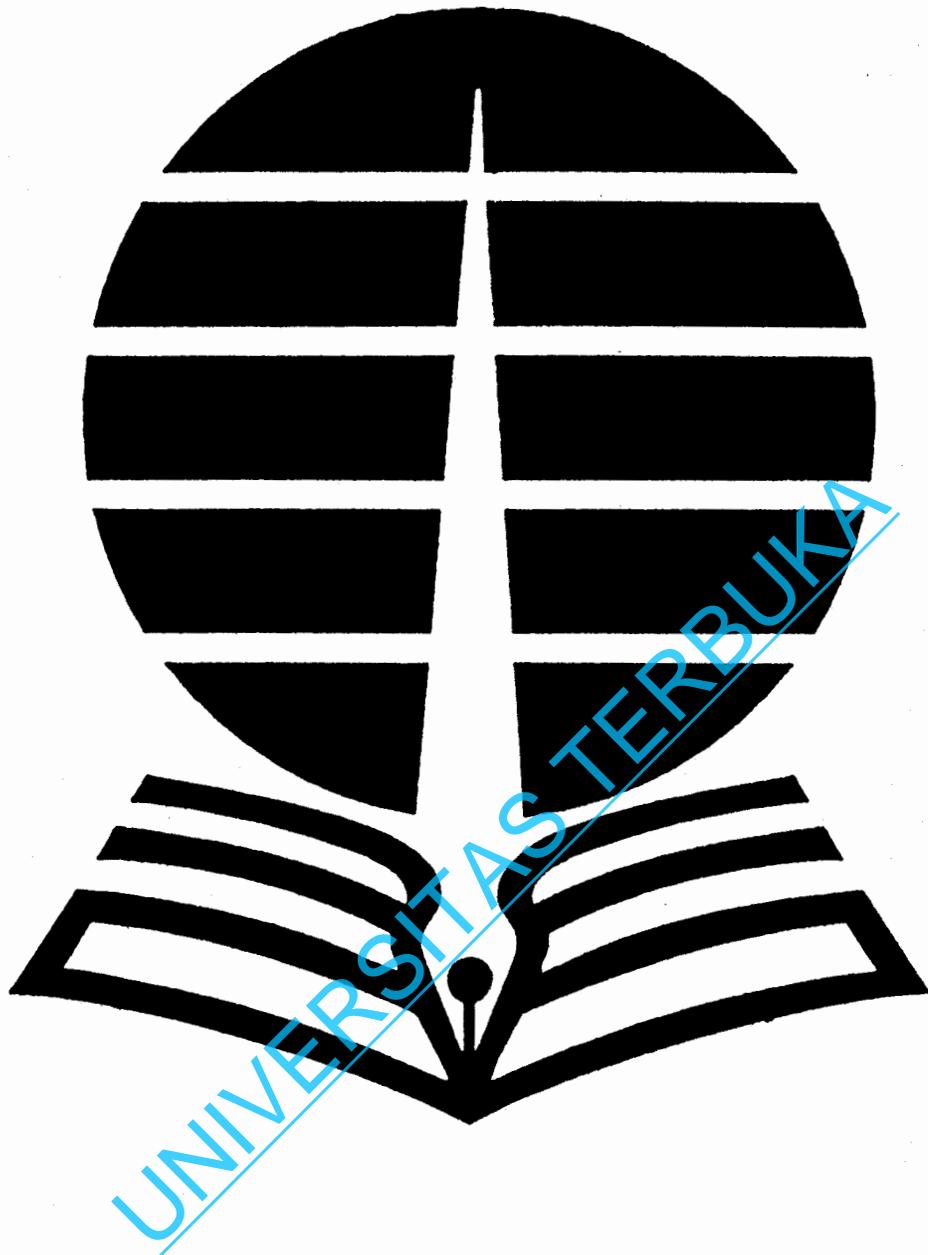
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	63
Gambar 4.1 Piramida Usia Sekolah	117

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Wilayah Kabupaten Sintang	139
Lampiran 2. Profil Sekolah SMPN. 2 Sintang	140
Lampiran 3. Penggunaan Dana Perjenis Anggaran	141
Lampiran 4. Buku Pembantu Kas Tunai	142
Lampiran 5. Buku Pembantu Kas Bank	143
Lampiran 6. Buku Pembantu Pajak	144
Lampiran 7. Realisasi Pengambilan Dana BOS	145
Lampiran 8. Struktur Organisasi SMPN. 2 Sintang	146
Lampiran 9. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	147
Lampiran 10. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian	148
Lampiran 11. Surat Rekomendasi Penelitian SMPN. 2 Sintang	149
Lampiran 12. Surat Rekomendasi Penelitian SMPN. 4 Kelam Permai	150
Lampiran 13. Surat Rekomendasi Penelitian UPJJ-BT Pontianak	151
Lampiran 14. Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian SMPN.2 Sintang	152
Lampiran 15. Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian SMPN.4 Kelam Permai	153
Lampiran 16. Profil Sekolah SMPN. 4 Kelam Permai	154
Lampiran 17. Curriculum Vitae	155



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Administrator publik sebagai implementator kebijakan mempunyai peran strategis dalam melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan, termasuk program yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Salah satu kebijakannya yaitu program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun). Pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program Wajar 9 tahun ini melalui pengadaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pendidikan.

Asumsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 1 Maret 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Kenaikan harga BBM lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merupakan visi dan misi Departemen Pendidikan Nasional yakni “tertuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu”. Penyelenggaraan SMP yang memberikan kemudahan pelayanan kepada anak usia SMP untuk memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya bagi penduduk miskin. Siswa miskin akan semakin sulit, bilamana tidak dibantu oleh sebab itu program PKPS-BBM ( Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan

merupakan alternatif terbaik untuk mendukung visi misi Departemen Pendidikan Nasional.

Bantuan operasional sekolah pada tahun 2005 – 2009 ini merupakan program yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Informasi tentang BOS ini di dapatkan melalui media massa maupun media elektronik. Walaupun upaya sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara namun program tentang BOS belum di pahami dengan baik oleh sebagian masyarakat. Kontroversi tentang program BOS masih berlangsung hingga saat ini baik dari kelompok yang setuju maupun kelompok yang kurang setuju dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kelompok yang setuju dengan program BOS, berpendapat bahwa program BOS dapat :

- a. meringankan biaya operasional sekolah
- b. beban biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa dari keluarga miskin semakin ringan
- c. potensi dan peristiwa siswa putus sekolah dapat dikurangi, dan
- d. sejak ada program BOS kondisi lingkungan sekolah semakin baik dan kondusif. (Buletin Depdiknas 2006 : 44).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kabupaten Sintang, sebagaimana halnya yang terjadi di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai masing-masing kepala sekolah, guru, dan komite setuju dengan program BOS dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Membuka lapangan pekerjaan dengan mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- b. Mengatasi kekurangan guru negeri di sekolah tersebut.
- c. Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dengan memberikan BOS.

Menurut (Jalil 2009 : 243) bahwa manfaat BOS adalah "diharapkan menaikkan harkat martabat sekolah jika dengan BOS sekolah tidak dimiskinkan." dengan BOS pula jangan sampai hak masyarakat sekolah untuk mengambil keputusan menjadi semakin kurang. Jika BOS itu dijadikan senjata oleh pihak yang memberikan uang, maka sekolah akan kehilangan hak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian akan terulang kembali sistem sentralistis dalam bentuk yang berbeda tetapi mungkin akan mengundang lebih banyak masalah. Oleh karena itu, masyarakat sekolah haruslah diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya baik yang diberikan langsung ke sekolah, maupun sumber daya yang diupayakan oleh sekolah sendiri.

Kelompok yang tidak setuju dengan program BOS berpendapat bahwa :

- a. Program BOS yang diberikan ke sekolah tidak melihat tingkat kesulitan transportasi, komunikasi dan geografi sekolah.
- b. Manajemen sekolah tidak transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.
- c. Pemberian dana BOS ke sekolah berdasarkan jumlah siswa dipandang kurang tepat, sebab akan memberi peluang kepada sekolah untuk *mark-up* jumlah siswa. Pihak sekolah mengalami dilematis dalam menyikapi

pendapat masyarakat seputar BOS. Di satu sisi BOS untuk menggratiskan siswa, disisi lain sekolah merasa "terpaksa" harus menarik sumbangan bilamana ada kegiatan sekolah yang sifatnya mendadak tak terduga tanpa terencanakan dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS).

Selanjutnya kelompok yang tidak setuju berharap agar program BOS di benahi dan diperbaiki pengelolaannya demi kemajuan dunia pendidikan, misalnya tranparansi dan akuntabilitas sekolah dalam pengelola BOS.

Kontroversi sebagaimana dipaparkan tersebut diatas menunjukkan adanya penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan oleh pemikiran *Stoner* (Sugiono 2007:52) yang mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi.

Perbedaan pendapat, pandangan atau paham dalam suatu hal adalah sesuatu yang wajar. Dalam lembaga organisasi atau kelompok tidak ada jaminan bagi orang dalam kelompok atau organisasi tersebut untuk selalu menuruti keinginan orang-orang dalam kelompok organisasi yang bersangkutan. Organisasi yang awalnya tidak ribut, tenang, aman, dan lancar namun kemudian muncul masalah setelah ada pihak yang kurang setuju dengan keinginan, tujuan lembaga atau oragnisasi dan mempertanyakan mengkritik kebijakan program yang dilaksanakan

lembaga itu melalui rapat seminar, media massa dan atau ke instansi terkait.  
(Sugiono, 2007 :53)

Hidup itu dinamis. Hal ini diperlukan untuk kepentingan kehidupan itu sendiri, saling mengisi, saling melengkapi. Dinamika hidup juga membuka peluang untuk saling berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga terbuka untuk munculnya persaingan yang sehat dan tidak sehat. Masalah bila tidak diurus dengan baik akan mengganggu sistem organisasi. Dalam persaingan bila ada yang kurang setuju serta tidak memahami dan menyadari suatu perbedaan akan menimbulkan masalah besar. Kompetisi yang sehat jauh lebih berguna bilamana dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama. Dalam kerjasama yang baik akan menimbulkan rasa percaya diri, dihargai, dilormati, kekeluargaan dan persaudaraan senasib dan sepenanggungan. Persaingan yang tidak sehat akan memupus apa yang di harapkan oleh persaingan yang sehat tadi. (Sugiono 2007 : 54)

Menurut pandangan sebagian masyarakat, sekolah yang berada di kabupaten/kota pada umumnya mendapatkan pelayanan dasar pendidikan yang memadai; gurunya cukup, sarana pembelajaran cukup, ruang belajar mengajar tersedia, kegiatan belajar mengajar baik, disiplin, pengembangan bakat dan minat terpenuhi. Apalagi jika ditunjang oleh dana BOS yang besar maka niscayalah mutu pendidikan meningkat. ( Komite SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai).

Faktor-Faktor Keberhasilan Program BOS

Suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan diharapkan untuk berhasil. Sejuahmana tingkat keberhasilan suatu rencana atau program diperlukan suatu penilaian, terhadap suatu kegiatan yang sedang berjalan, akan diketahui tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Demikian halnya dengan program BOS yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 hingga sekarang. Masyarakat mungkin akan bertanya apakah program BOS telah berhasil atau gagal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti telah melakukan suatu penelitian di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Kriteria penilaian (Evaluasi) bersumber dari instansi pemerintah yang tugasnya mengawasi dan menilai suatu kegiatan/program yang telah berjalan.

Kriteria tersebut adalah ...

1. Ketepatan Sekolah Penerima Bos
2. Ketepatan Jumlah Siswa Yang Mendapat Bantuan Bos
3. Ketepatan Jumlah Dana Diterima Direkening Sekolah
4. Ketepatan Waktu Penerimaan Bos
5. Ketepatan Waktu Ketersediaan Dana Bos Dilembaga Penyalur
6. Ketepatan Waktu Pelaporan
7. Ketepatan Penggunaan Dana Bos
8. Ketepatan Prosedur
9. Transparansi Penggunaan Dana Bos
10. Ketepatan Pertanggung Jawaban

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Sintang 2009*

Pengelolaan program BOS, merupakan wujud implementasi kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana yang terjadi di Pemerintah

Kabupaten Sintang, sebagai pelaksana program tersebut, permasalahan ini diantaranya.

1. Penyimpangan antara kebijakan dengan kenyataan.

Kelompok masyarakat yang hidupnya jauh dari pusat pemerintahan atau kota dengan sarana pelayanan publik dan hidup yang minim, apalagi jika disertai dengan kemiskinan hampir dapat dipastikan akan mengalami kesulitan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu akan mengalami hambatan untuk bersekolah, termasuk mengembangkan bakatnya dalam mencapai prestasi yang tinggi. Mereka pun akan terancam putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Selanjutnya atas dasar pertimbangan itulah pemerintah memutuskan pemberian program BOS di tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Melalui program BOS siswa miskin di tingkat pendidikan dasar baik negeri maupun swasta, tidak dibebani dengan biaya operasional sekolah.

Dalam kebijakan program BOS pemerintah tidak hanya membantu siswa miskin atau kurang mampu tetapi juga bagi siswa yang lainpun ikut menikmati program BOS. Sebagaimana yang kita ketahui dalam buku panduan BOS :

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

2. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah. kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dan Sekolah Bertaraf Internasional ( SBI ).

(Depdiknas 2009 : 4)

2. Pelaksanaan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah.

Bahasa sekolah gratis yang telah disosialisasikan oleh pemerintah melalui media massa dan elektronik nampaknya belum terbukti di sekolah khususnya di SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai, bahkan sangat membingungkan masyarakat. Disatu sisi pemerintah mengatakan sekolah gratis namun dalam praktiknya pihak sekolah bersama dengan komite sekolah masih memungut biaya sekolah dari orang tua siswa untuk keperluan operasional sekolah. Dalam Buku Panduan BOS (2009 : 3 ) tertulis “ Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa” untuk SMPN / SMPS di kota Rp. 575.000/tahun/siswa, kabupaten Rp. 570.000/tahun/siswa.

Implementasi ini terjadi adanya kesan dengan perolehan dan penggunaan dana BOS antara SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai. Penggunaan dana BOS pada SMPN.2 Sintang untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian, pengadaan buku teks pelajaran. Namun tidak demikian halnya pada SMPN.4 Kelam Permai, yang memiliki keterbatasan perolehan dana BOS, dana BOS banyak digunakan untuk pengangkatan dan penggajian tenaga guru dan tata usaha honorer. Sedangkan untuk kegiatan lain tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya banyak

kegiatan sekolah yang tidak dapat dilaksanakan. Padahal tujuan dana BOS adalah untuk membiayai operasional sekolah semestinya tidak ada lagi kegiatan di sekolah yang terabaikan.

Buku panduan BOS, menyatakan bahwa penerimaan dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dirasakan oleh sebagian SD/MI, SMPN/SMPS/MTs kurang adil. Semestinya pemberian dana BOS disamping menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah siswa, namun harus mempertimbangkan kondisi geografis dan transportasi sekolah.

Indikasi penyimpangan dana BOS ini banyak menuai kritik, seperti yang di *ekspost* oleh beberapa media massa yang ada di Kabupaten Sintang seperti Kapuas Post, Kapuas Raya Post, Berita Kahtulistiwa (Berkat) memberitakan tentang indikasi penyimpangan dana BOS oleh oknum kepala sekolah baik SD maupun SMP di Kabupaten Sintang. Sebagai bentuk dari kontrol sosial masyarakat mulai dari komite sekolah, guru, orang tua siswa mempertanyakan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah, mengapa ada BOS sekolah masih memungut dana dari orang tua siswa, dan mengadukan oknum kepala sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terkait penggunaan dana BOS yang tidak transparansi dan akuntabel serta mengkritisi kebijakan manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Oknum kepala sekolah cenderung tidak “bekerja sama” dalam pengelolaan dana BOS.

Pernyataan yang didapat dari guru dan tata usaha di SMPN. 2 Sintang adalah pertanyaan dan kritik tentang manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOS, yang terbukti ditangani oleh bendahara sekolah. Pertanyaan dan

kritik dari masyarakat terhadap Kepala SMPN.4 Kelam Permai, lebih disebabkan oleh Kepala SMPN. 4 Kelam Permai tidak transparansi, akuntabel dan menyalahi prosedur dalam BOS.

3. Ada Pengaduan, Pertanyaan, dan Kritik dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai, terdapat beberapa pertanyaan pengaduan dan kritik yang disampaikan oleh guru maupun oleh ketua Komite Sekolah, terkait dengan pengelolaan dana BOS. Pada SMPN 2 Sintang ada beberapa orang guru yang tidak mengetahui penerimaan dan penggunaan dana BOS dan mereka bertanya serta mengkritisi kebijakan Kepala SMPN 2 Sintang dalam manajemen pengelolaan dana BOS. Menurut mereka dana BOS, harus diketahui dan transparansi serta akuntabel dalam penggunaannya. Karena dana tersebut adalah dana yang didapat dari APBN dari pinjaman luar negeri, untuk kegiatan operasional sekolah.

Munculnya pengaduan, pertanyaan dan kritik dari masyarakat yang didapatkan oleh peneliti di SMPN 4 Kelam Permai, tidak terlepas dari kinerja Kepala SMPN 4 Kelam Permai dalam manajemen pengelolaan dana BOS. Selama ini Kepala SMPN 4 Kelam Permai mengelola dana BOS “sendirian”. Yang dimaksudkan dengan sendirian disini adalah tidak bekerja sama dengan guru, tata usaha, dan Komite Sekolah dalam mengelola dana BOS. Penggunaan dana BOS lepas kontrol (*lose control*) dari *stakeholder* yang ada di SMPN 4 Kelam Permai.

4. Persaingan

Sekolah dengan siswa yang sedikit sudah pasti mendapat dana BOS juga sedikit, guru kurang dan terletak jauh dari pusat pemerintahan, apalagi dengan beban kurikulum dan tanggung jawab yang sama dengan sekolah lain yang ada di Kabupaten Sintang, maka niscayalah akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dialami oleh SMPN 4 Kelam Permai yang sulit untuk bersaing dengan SMPN 2 Sintang dalam beberapa aspek akademik.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan agar arah penelitian lebih pada titik permasalahan serta tidak terlalu melebar, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menyusun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai berdasarkan sepuluh aspek ketepatan ?
2. Bagaimana kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai dalam mengelola BOS ?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Seusai dengan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah mendiskripsikan dan menganalisis tentang :

1. Implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai.
2. Menganalisis kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai dalam pengelolaan dana BOS.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

##### 1. Kegunaan secara teoritis

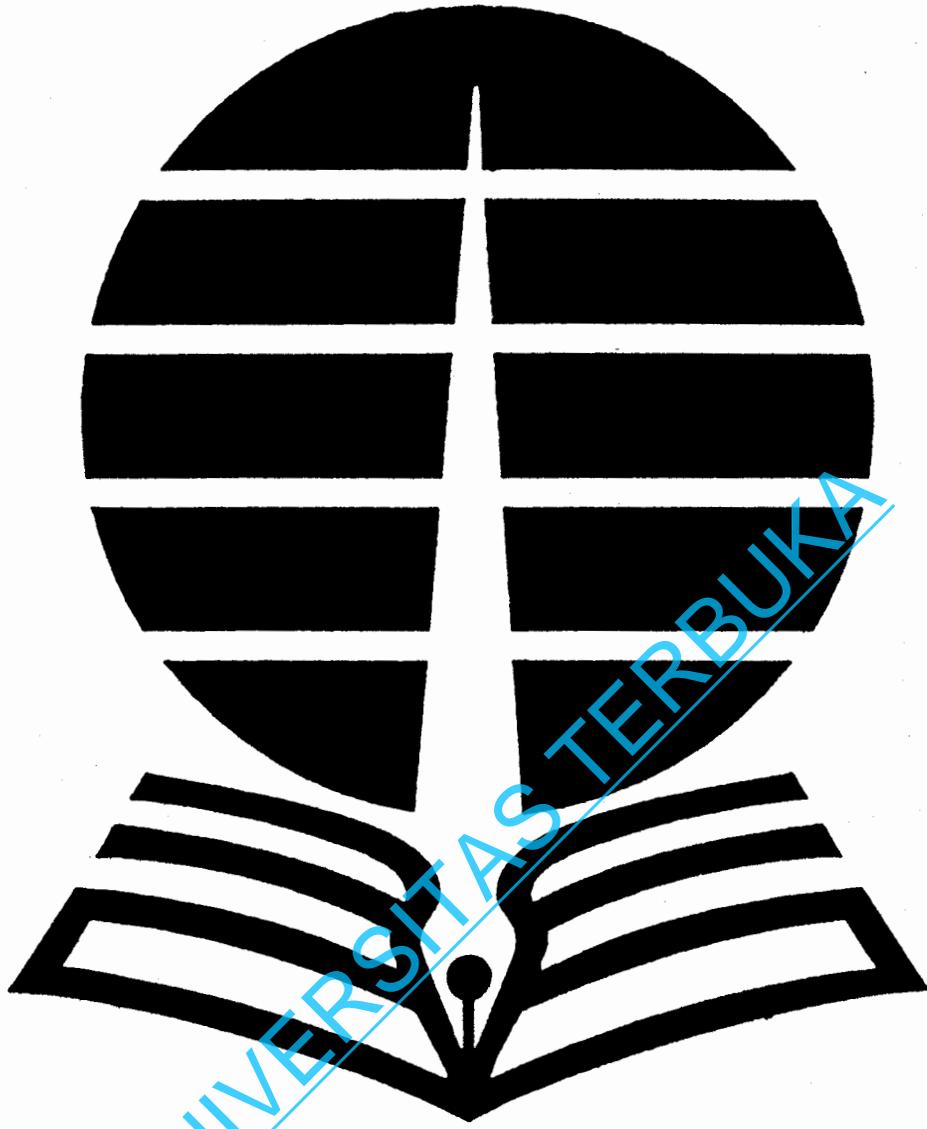
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pemerintah secara umum di Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang mengenai teori-teori kebijakan publik yang terkait dengan bantuan kesekolah-sekolah seperti program BOS yang sedang berjalan atau pun bantuan lain dikemudian hari kesekolah.

Selain itu kegunaan penelitian ini adalah untuk memotivasi penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam rangka lebih mendalami permasalahan yang ada korelasinya dengan program BOS atau sejenisnya dikemudian waktu.

##### 2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan oleh pemerintah, secara umum dan khususnya Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat

- a. Mengambil kebijakan yang terbaik dalam menyalurkan program bantuan ke sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian bantuan program BOS atau bantuan lain berikutnya.
- c. Dapat digunakan oleh pihak yang terkait di pemerintah daerah sintang untuk mengupayakan pengalokasian dana tambahan bantuan bagi sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi nyata sekolah.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. KAJIAN TEORITIK

Dalam rangka penulisan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan publik, maka dipandang perlu untuk mengetahui tahapan – tahapan atau siklus tentang kebijakan publik. Adapun siklus kebijakan publik itu adalah:

1. Formulasi Kebijakan ( Policy Formulation )
2. Implementasi Kebijakan ( Policy Implementation )
3. Evaluasi Kebijakan ( Policy Evaluation )

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat para ahli dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

#### 1. Formulasi Kebijakan Publik (Policy Formulation Public)

Perumusan kebijakan publik sebagai awal dalam proses kebijakan memiliki arti yang sangat penting bagi pengambil keputusan ( decision making ). Karena kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya akan sangat dipengaruhi oleh perumusan masalah. Efektif dan efesiennya suatu kebijakan berawal dari perumusan kebijakan itu sendiri.

Perumusan kebijakan mempunyai kaitan terhadap dampak pada pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tersebut.

Menurut penjelasan *M.Irfan Islamy* (1991:77) proses perumusan kebijakan Negara sebagai berikut:

“ Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan Negara bukanlah satu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor atau kekuatan – kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan Negara tersebut. Suatu kebijaksanaan Negara dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan”

Bila mana diperhatikan pendapat diatas, dimana dijelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan bukan hal yang sederhana dan mudah. Karena kebijakan akan mempengaruhi kesejahteraan kehidupan anggota masyarakat, kehidupan yang beragam dengan tuntutan zaman yang semakin meningkat, selalu berkembang dan dinamis, membuat penyelenggara Negara mesti membuat suatu kebijakan. Berpikir hati – hati, sebab kebijakan itu untuk kepentingan umum.

## 2. Beberapa Macam Model Perumusan Kebijakan Negara

Perumusan kebijakan publik atau negara sebelum dilaksanakan bagi kepentingan umum, tentu terlebih dahulu perlu dipertimbangkan, alat, tehnik atau model dalam suatu perumusan tujuan. Hal semacam itu dimaksudkan demi kemudahan dan kelancaran tujuan yang akan dicapai.

Dalam merumuskan suatu kebijakan, para ahli menggunakan model sebagai pendekatan untuk merumuskan kebijakan. Menurut penjelasan Irfan Islamy ( 1991:34 ) kegunaan model sebagai berikut:

“Perumusan kebijaksanaan Negara akan lebih mudah dipelajari apabila menggunakan suatu pendekatan atau model tertentu.” Dengan model dapat

membantu kita untuk memahami kehidupan politik (Political Life) pemerintahan proses kebijaksanaan dan sebagainya.

Ada beberapa model dapat digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan. Yehczkel Dron ( Irfan Islamy 1991:35-36) mengemukakan ada 7 macam pembuatan keputusan yaitu:

a. Pure Rationality Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu pola pembuatan keputusan yang ideal secara universal, dimana keputusan – keputusan tersebut harus dibuat setepat – tepatnya.

b. Economi Cally Rational Model

Model ini hampir sama dengan model yang pertama tetapi lebih ditekankan pada pembuatan keputusan yang paling ekonomis dan paling efisien.

c. Seguential – Decision Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pembuatan eksperimen dalam rangka menentukan berbagai macam alternatif sehingga dapat dibuat suatu kebijaksanaan yang paling efektif.

d. Incremental Model

Model yang keempat ini berasal dari teori Charles E. Lindblom yang terkenal dengan sebutan “Muddling Through” menjelaskan bagaimana kebijaksanaan itu dibuat.

Kebijaksanaan dibuat atas dasar “perubahan yang sedikit” dari kebijaksanaan – kebijaksanaan yang lama dipakai sebagai dasar / pedoman untuk membuat kebijaksanaan yang baru.

e. Satisfying Model

Model ini didasarkan atas teori “Satisficing” dari Herber A.Simon, pendekatannya dipusatkan pada proses pemilihan alternatif kebijaksanaan pertama yang saling memuaskan dengan tanpa bersusah payah menilai alternatif – alternatif yang lain.

f. Extra Rational Model

Model ini didasarkan, atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional untuk menciptakan metode pembuatan kebijaksanaan yang paling optimal.

g. Optimal Model

Ini merupakan suatu model yang integratif (gabungan) yang memusatkan, perhatiannya pada pengidentifikasian nilai – nilai, kegunaan praktis dari pada kebijaksanaan dan masalah – masalahnya. Semuanya itu ditujukan untuk mengatasi masalah – masalah dengan memperhatikan alokasi sumber – sumber, penentuan tujuan yang hendak di capai, pemilihan alternatif – alternatif program, peramalan hasil – hasil dan pengevaluasian alternatif – alternatif terbaik.

Selain model perumusan kebijakan yang telah di paparkan diatas, masih ada beberapa model perumusan kebijakan yang akan disampaikan seperti berikut:

1. Model Instutional

Model ini adalah merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijaksanaan Negara. Fokus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kegiatan – kegiatan politik berpusat pada lembaga – lembaga pemerintahan, seperti misalnya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, pada pemerintah pusat ( nasional ) regional, dan lokal, *Thomas R.Dye* ( Irfan Islamy 1991:37 )

## 2. Model Elit – Massa

Model ini memandang administrasi Negara bukan sebagai “abdi rakyat” ( Seruan of the people ) tetapi lebih sebagai “kelompok – kelompok kecil yang telah mapan” ( The Estabbish Ment ).

*Nicolac Henry* ( Irfan Islamy 1991:39 ). Kita seringkali mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan yang menggambarkan kepentingan/tuntutan rakyat, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Menurut teori elit massa, rakyat bersifat apatis, dan buta terhadap informasi tentang kebijaksanaan Negara, sedangkan kelompok elit mampu membentuk dan mempengaruhi massa terhadap masalah – masalah kebijaksanaan negara. ( Irfan Islamy 1991:39 )

## 3. Model Kelompok

Model ini menganut paham teori kelompok, yang mengatakan bahwa interaksi diantara kelompok – kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu – individu yang memiliki kepentingan yang sama mengingatkan baik secara formal dan informal kedalaman kelompok kepentingan ( *Interest Group* )

yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan – kepentingan kelompok, *David B. Truman 1951* (Irfan Islamy 1991:42).

#### 4. Model Rational – Comprehensive

Model rasional – komprehensif ini didasarkan atas teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi (Concept of on economic man) para ahli filosofi utilitarian seperti *Jeremy Bontham* dan *John Stuart Mill* berasumsi bahwa semua tingkah laku manusia bertujuan untuk “mencari kesenangan dan menghindari kerusakan” nilai utilitas (Kemanfaatan) sesuatu benda atau tindakan (Action) itu harus dinilai berdasarkan pada perbedaan antara kesenangan yang akan di perolehnya dan biaya yang di keluarkannya. *Yehezkel Dror* (Irfan Islamy 1991:48)

Sebagaimana telah di bahas diatas bahwa pembuatan keputusan atau kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap administrator publik dituntut untuk memiliki kemampuan tanggung jawab, kemauan dan keberanian atas resiko yang terjadi setelah keputusan atau kebijaksanaan dilaksanakan menjadi kebijakan publik, baik diharapkan dan yang tidak diharapkan. Diharapkan berarti keputusan yang dapat diterima oleh publik, tidak diharapkan berarti ada yang tidak menerima keputusan atau kebijakan tersebut, seperti kebijakan BOS yang sedang berlangsung saat ini, sertifikasi guru, undang- undang guru dan dosen, bantuan langsung tunai (BLT) bantuan beras miskin (Raskin) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan lain sebagainya.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Menurut pendapat *Nigro and Nigro (Irfan Islamy 1991:25 – 26)* faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Seringkali administrator harus membuat keputusan yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari luar. Yang menyebabkan adanya tekanan – tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi, seperti investasi modal sumber – sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program – program tertentu. Kebiasaan itu akan terus diikuti, terlebih kalau suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sikap -sikap pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak di pengaruh oleh sifat-sifat pribadinya, seperti misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru. Seringkali faktor sifat pribadi si pembuat keputusan berperan besar sekali.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Contohnya mengenai masalah pertikaian dalam kerja, pihak -pihak yang bertikai yang menaruh respek pada upaya penyelesaian

oleh pihak dalam, tetapi mengenai keputusan yang diambil oleh pihak-pihak luar dapat memuaskan mereka.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan.

Menurut *Yehezkel Dror* (Irfan Islamy 1991:31-33)

Praktek-praktek pembuatan kebijaksanaan sbagai berikut ini :

- a. Berhubungan terutama dengan sistem-sistem pembinaan masyarakat, khususnya sistem perumusan kebijakan Negara.
- b. Memusatkan perhatiannya pada sistem-sistem pembuatan kebijaksanaan Negara pada jenjang makro.
- c. Bersifat interdisipliner, dengan memfungsikan ilmu-ilmu perilaku dan manajemen.
- d. Menggabungkan penelitian murni dan terapan.
- e. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman.
- f. Mencoba untuk menyambungkan pada pilihan nilai.
- g. Mendorong adanya "kreatifitas"
- h. Menekankan baik pada pengembangan-pengembangan pembuatan kebijaksanaan masa lalu.
- i. Terlihat secara intensif dengan proses perubahan.

- j. Menghargai proses pembuatan kebijaksanaan.
- k. Mendorong percobaan sosial.
- l. Mempunyai kesadaran akan diri sendiri, memonitor serta mendisain kembali ilmu-ilmu kebijaksanaan.
- m. Menyiapkan para profesional untuk memenuhi jabatan-jabatan pembuat keputusan.
- n. Berhati-hati dalam menentukan kebenaran dan keberhasilan data dan mempertahankan standar ilmiah.

Butir-butir dalam paradigma *Dror* tersebut memang mencakup aspek yang luas yang diperlukan dalam menjadikan *Policy Sciences* berguna bagi *policy maker* ( pembuat kebijakan ) dalam merumuskan kebijaksanaan negara yang baik.

Sebagaimana yang dipaparkan diatas mengenai formulasi kebijakan publik dari beberapa ahli, selanjutnya dipandang perlu untuk melihat pendapat para ahli yang lain, berkaitan dengan perumusan kebijakan publik.

#### 1. Perumusan masalah

Perumusan masalah menurut *William N. Dunn* (Samodra Wibawa dkk. 2003 : 26 – 28)

“ Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru”.

#### 2. Peramalan

“ Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang ada terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu”.

3. Rekomendasi  
 “Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan . *William N. Dunn* (Samodra Wibawa dkk. 2003 : 27)
4. Pemantauan  
 “Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya”.
5. Evaluasi  
 “Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan”.

## 2. Implementasi kebijakan publik (Policy Implemetation Public)

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan publik mempunyai arti penting yang tidak hanya terbatas pada perwujudan secara rill, tetapi mempunyai kaitan terhadap kensekuensi atau dampak yang akan tampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak definisi kebijakan publik (*public policy*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bahkan banyak ahli berselisih pendapat tentang pengertian kebijakan publik tersebut. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan masing-masing ahli memberikan

penekanan yang berbeda serta memiliki latar belakang pandangan yang berbeda pula. Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi dan lazimnya implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1991:296).

Kebijakan publik mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai tujuan tersebut. Komponen terakhir belum dapat dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi menterjemahkan sebagai program-program aksi dan kegiatan. Didalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa pelaksana atau implementornya, seberapa besar dan dari mana dana yang diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya serta bagaimana mengukur kinerja kebijakannya.

Kebijakan publik menurut penjelasan *Islamy (2000:18)*, bahwa kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Selanjutnya menurut *Islamy (2000:19)* menjelaskan bahwa :

“Kebijakan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, Implementasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : (1) Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*)”

Sementara menurut *Kismartini*, dkk (MAPU 5301 2008: 1.6) terdapat beberapa sudut pandang tentang kebijakan publik yaitu 1). Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah, 2). Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan 3). Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Hal serupa dijelaskan juga berikut ini oleh *Winarno* (2002:15) bahwa “kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu”.

Selanjutnya menurut penjelasan *Winarno* (2002:17) mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

*Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, dimana pendapat tersebut cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai publik. *Kedua*, pendapat para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk pada katagori ini terbagi atas dua, yakni : 1) mereka memandang, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan 2) mereka menganggap kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Setelah memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapatlah dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka pada tataran konsep kebijakan yang ada adalah suatu pilihan dari alternatif untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkungan kerja tapi juga untuk lingkungan yang lebih luas atau cenderung kebijakan tersebut diarahkan ke

masyarakat luar, dimana aktor atau pelaku kebijakan memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan arah kebijakan.

Suatu kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik saja, akan tetapi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam penetapan kebijakan publik diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Proses perumusan kebijakan publik pada umumnya melalui beberapa tahap mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan.

Implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, mempunyai arti penting yang tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil, tetapi mempunyai kaitan terhadap konsekuensi atau dampak yang akan tampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut penjelasan *Radiin* (2002:15) mengatakan implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan serangkaian aktivitas.

*Winarno* (2002:101) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial (sangat penting) dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2002:102).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh Nugroho (2003:159) menyatakan kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan publik yang langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Kemudian Nugroho (2003: 160) menyatakan pula bahwa dalam manajemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah yang dimulai dari : Visi, Misi, Rencana, Strategi, Program, Proyek, Kegiatan dan Umpan Balik. Dengan demikian semakin jelas bahwa implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing, leading and controlling*. Kemudian secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan berurutan dari tahapan : a) Implementasi Strategi, b) Pengorganisasian, c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d) Pengendalian (Nugroho, 2003: 163).

Semua kebijakan publik apapun bentuk dan jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak yang diharapkan masyarakat, dan tindakan masyarakat tersebut tentunya bersesuaian dengan keinginan pemerintah.

Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah maka kebijakan publik menjadi tidak efektif.

Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh *Jones* (1991:295) bahwa implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Sedangkan makna implementasi kebijakan menurut *Wahab* (1997:51) dinyatakan sebagai :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan akan merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijakan, kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut penjelasan *Wibawa* (2000:26) ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *content of policy* dan *contexs of implementation*. Adapun maksud *content of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), tipe manfaat (*tipe of benefits*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementator*), dan sumber daya yang dilibatkan (*resources commited*). Sedangkan yang dimaksud *contexs of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors*), karakteristik lembaga

dan penguasa (*institution and regime characteristic*), kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*).

Merujuk kepada pendapat beberapa ahli di atas nyatalah bahwa aktivitas implementasi adalah sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Sehingga perlu untuk diketahui bahwa memahami implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang terjadi antara keduanya.

Dalam proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. *Van Meter* dan *Horn* (dalam Agustino, 2006) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi implementasikan kebijakan yaitu :

(1) Kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana, (4) Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan dilapangan.

Menurut *Agustino* (2006) jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol.

Selanjutnya *Agustino* (2006) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik sebagai berikut :

1. Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan, yaitu :

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Adanya kepentingan publik.
- e. Adanya kepentingan pribadi.
- f. Masalah waktu

2. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan, yaitu :

- a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
- b. Tidak adanya kepastian hukum.
- c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
- d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Selanjutnya menurut penjelasan dari *Agustino* (2006:156) mengatakan ada 4 faktor atau variabel krusial ( sangat penting ) yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan publik, yaitu 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur organisasi. Hal sama juga dikatakan oleh *Abang Zainudin* (2006:131), Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah “faktor komunikasi, faktor lingkungan, faktor organisasi atau struktur organisasi dan faktor dukungan atau sumber-sumber potensial”. Sedangkan menurut *Islamy* (2000), ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan, yaitu : *Pertama*, sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material dan waktu. *Kedua*, kesalahan dalam

pengadministrasian kebijakan. *Ketiga*, problema-problema publik yang ada sering kali timbul disebabkan karena faktor. *Keempat*, masyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri. *Kelima*, adanya beberapa tujuan kebijakan yang bertentangan satu sama lain. *Keenam*, usaha-usaha untuk memecahkan masalah memakan lebih besar dari masalah nya sendiri. *Ketujuh*, problema publik yang tidak dipecahkan secara tuntas. *Kedelapan*, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. *Kesembilan*, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik sehingga pengalihan pada masalah yang telah ada.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut penjelasan dari Wahab (1997: 61) dinamakan sebagai *implementasi gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan / direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Besar kecilnya perbedaan prestasi hasil pelaksanaan dengan yang direncanakan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada hasil akhir dari kebijakan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahab (1997: 61) disebut sebagai *implementasi capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan

kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, penjelasan tersebut menurut *Soenarko* (2000: 166) sebagai berikut :

“Kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu 1) berkaitan dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekerjaan dan komposisinya; 2) kondisi geografis yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan dimana masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau tinggal; 3) nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat-masyarakat setempat; 4) konfigurasi politik lokal yaitu pertimbangan atas keberadaan kelompok-kelompok formal maupun non formal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik; 5) sumber daya ekonomi yaitu adanya resources yang mendukung pendanaan atas diberlakukannya sebuah kebijakan; 6) kepentingan elit yang menyangkut bukan saja elit nasional tetapi elit lokal sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan elit lokal, akan dengan cepat tertolak, karena dalam setiap kelompok masyarakat terdapat kepatuhan sekelompok masyarakat terhadap elit lokal; 7) rekrutmen, menyangkut rekrutmen elit termasuk aparat pemerintah daerah, aparat birokrasi, utamanya menyangkut mekanisme rekrutmen yang dapat dipertanggung jawabkan“.

Sementara itu *Anderson* (1979: 114) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan *ukuran* kebijakan yang mungkin bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patutan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

*Soenarko* (2000: 185) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain :

1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu dapat tidak tepat karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut; 2) sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; 3) sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; 4) isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; 5) ketidakpastian faktor inter dan atau faktor ekster; 6) kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; 7) dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis; 8) adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentuk kebijakan yang kurang sempurna dalam arti kurang memperhatikan faktor-faktor sebagaimana mestinya yang telah dikemukakan diatas. Hal lain adalah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulation* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan juga akan dikemukakan pendukung pelaksanaan suatu kebijakan, *Anderson* (1979: 114) mengemukakan :

1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau keputusan; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat sah oleh pejabat melalui prosedur yang telah ditetapkan; 4) sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam mengimplementasi kannya.

Menurut Soenarko (2000:186) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu : 1) persetujuan, dukungan dan kepercayaan; 2) isi dan tujuan kebijakan yang dimengerti; 3) pelaksanaan yang cukup informasi mengenai kelompok sasaran; 4) pembagian yang efektif dalam pelaksanaan; 5) pembagian wewenang dan; 6) pemberian tugas yang memadai dalam pelaksanaan.

### 3. Evaluasi Kebijakan Publik (Policy Evaluation Public)

Evaluasi merupakan salah satu fungsi administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan atau kegiatan pemerintah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi bahkan rasionalitas suatu program yang dilaksanakan.

Beberapa pakar dari buku referensi yang dibaca oleh peneliti memberikan pengertian evaluasi seperti berikut menurut *Imron* (1996 : 86) adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat di laksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai dengan yang di harapkan atau tidak.

Evaluasi menurut *Jone* (Syaiful 2007 : 101) Mengartikan evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang di desain untuk menilai hasil – hasil

program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya tehnik, teknik pengukuran, dan metode analisisnya.

Evaluasi menurut *Suryadi* dan *Tilaar* ( 1993 : 46 ) dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dan menerapkan suatu criteria atas terjadinya gejala tersebut yaitu gejala yang terjadi dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan criteria yang sudah di hubungkan sebelumnya.

Evaluasi menurut *Rossi* (1991: 12) pada dasarnya sebagai alat pengukur ( to evaluate ) suatu kegiatan atau proyek atau kebijakan organisasi.

Evaluasi menurut para ahli di atas bermakna bahwa suatu kegiatan organisasi mulai dari perencanaan dan pengorganisasian, persyaratan dan pengendalian, dan pengadaan keberhasilan dan kegagalan, kelebihan dan kelemahan di ukur dengan penelitian dan evaluasi.

*Antony* (1993 : 487) dan *Tjokroamidjoyo* (199 : 131) menyatakan bahwa suatu proyek selalu mempunyai strategi point dan ending point, serta selalu mempunyai tujuan, berupaya mencari manfaat tertentu yang ingin di capai atau beberapa tujuan.

Evaluasi sebenarnya dapat di lakukan pada tahap kebutuhan atau studi kebutuhan misalnya, studi kebutuhan mengenai sumber daya manusia yang berkualitas, pelaksanaan ( monitoring ) memiliki aktifitas, bagaimana cara, apa wujud pelaksanaan dan evaluasi kinerja, apa yang sudah ada dan apa yang belum di laksanakan.

Evaluasi kinerja biasanya di pakai oleh instansi pemerintah untuk menilai indicator – indicator kinerja, mengutip dari kepala badan perencanaan nasional Nomor: KEP 178/K /07/2000.

Evaluasi kinerja proyek pembangunan adalah bagian dari beberapa kinerja yang sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan maupun pasca proyek atau kegiatan kegiatan yang sering di temukan dalam penelitian evaluasi kinerja ( LAN : 2000 )

Dari pernyataan di atas dapat di tarik benang merah dari evaluasi, bahwa evaluasi ini memiliki arti yang cukup penting dalam suatu kegiatan baik instansi pemerintah maupun swasta. Sebab evaluasi memberikan arah pedoman, pengertian bagi pelaku yang mengambil kebijakan publik ( public policy ) serta untuk membuat dan memberi pertimbangan ( *balanced* ) pada kegiatan yang akan di lakukan selanjutnya.

Perubahan pengembangan tindakan (*action*) suatu kegiatan atau program sangat di tentukan oleh hasil evaluasi.

Maka dari itu evaluasi untuk dana BOS sangat di perlukan untuk menilai mengukur dan melihat, berdasarkan suatu kajian tertentu.

Evaluasi kebijakan menurut *Suryadi dan Tilaar* ( 1993 : 46 ) bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta tentang sesuatu, tetapi menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai jika dibandingkan dengan kriteria atau acuan yang menjadi pedoman.

Bilamana program BOS memiliki nilai bagi masyarakat maupun pemerintah kebijakan ini sudah sepantasnya di evaluasi demi menentukan kriteria dan atau acuan program berikutnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut *Syaiful* (2007 : 100) lebih mempertegas bahwa evaluasi kebijakan terdiri dari :

1. Evaluasi Impresionistik, yaitu kebijakan yang memenuhi kepentingan diri, ideologi, kriteria penilaian lain yang didasarkan pada fakta fragmentasi ataupun anekdot.
2. Evaluasi Operasional, yaitu masalah pelaksanaan kebijakan apakah dijalankan dengan jujur (*honest*) berapa besar biayanya tidak ada duplikasi dengan program lain, terpenuhi aspek hukum ada untung ruginya.
3. Evaluasi Sistemik, yaitu mengacu pada masalah pokoknya, seperti dampak program, efektivitas program, tercapai tujuan apa untungnya dan ruginya, siapa yang memperoleh manfaatnya, siapa yang diuntungkan , dan apa yang akan terjadi jika kebijakan itu tidak ada.

Tujuan Evaluasi terhadap kebijakan adalah untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian (*evaluatif*) yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang didesain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya untuk mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat

dilaksanakan atau tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ( Syaiful 2007 : 103 ).

Pembuatan informasi mengenai nilai atau harga suatu proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya melalui model-model yang relevan dengan permasalahannya.

Evaluasi kebijakan program BOS adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk menilai hasil akhir ( *ending producy* ) dari suatu program yang secara khusus di tujukan pada kebijakan program pemerintah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Apakah bantuan operasional sekolah dapat berjalan dengan baik, dikelola dengan benar dan dapat membantu siswa disekolah baik yang mampu ataupun tidak mampu dan memberi manfaat yang signifikan pada sekolah atautkah mungkin sekolah berasumsi program Bantuan Operasional Sekolah untuk membiayai kegiatan yang dialami sekolah.

### 3. Arti dan Makna Kebijakan

Menurut *Imron* ( 1966 : 17 ) kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijaksanaan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang. Bilamana mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum, dapat di kecualikan tetapi tidak melanggar aturan yang ditetapkan.

Menurut pendapat *Anderson* (Syaiful 2007 : 97) mengenai kebijakan adalah merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat

keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.

Kebijakan menurut *Irfan Islamy* (1995 : 5) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendapat *Cambell* (Syaiful 2007:97) kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan.

Kebijakan diartikan lain lagi oleh *Rich* ( Syaiful 2007:97), menurut Rich kebijakan tidak hanya mengatur system operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara sistem. *Koontz dan O'Donnell* (Syaiful 2007 97) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani penilaian dalam mengambil keputusan esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.

*Amara Raksataya* (Syaiful 2007:98) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan,. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 ( tiga ) elemen, yaitu :

- a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu proses untuk tujuan tertentu yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang terencana dengan baik melalui kepandaian, kemahiran, kearifan yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan. Karena alasan yang di terima atau yang tidak di terima oleh suatu alasan yang kuat.

Tentu saja dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan adalah Menteri Pendidikan, gubernur dan Bupati / Walikota sebagai pimpinan dalam pemerintahan yang mengatur system pelayanan pada satuan pendidikan.

Pemerintah tersebut mengambil kebijakan mengenai penentuan anggaran pendidikan, ketenagaan, standarisasi kurikulum, kalender akademik, standarisasi kelembagaan satuan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan yang mulia di bidang pendidikan, dimana pemerintah memiliki kebijakan mengenai penentuan anggaran pendidikan.

#### 4. Lima Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/ tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD di kota Rp. 400.000, SD di kabupaten Rp. 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp. 570.000.

- b. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
  - c. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
  - d. Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya.
  - e. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. (Depdiknas 2009 : 10)
5. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Program BOS

Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Bab IV pasal II ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut di atas, pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, menyiapkan dana atau memberi jaminan ketersedianya dana untuk anak sekolah usia 7 tahun sampai 15 tahun. Dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan memberi dana berupa Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).

Peran pemerintah dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sektor pendidikan cukup besar. Konsekuensi logis dari

pada itu pemerintah pusat dan daerah telah mengambil satu kebijakan publik dengan menyiapkan dana wajib belajar 9 tahun kesetiap sekolah se Indonesia melalui dana BOS.

Apabila kita merujuk peranan pemerintah dalam pemberian dana BOS kesetiap sekolah di seluruh Indonesia dengan teori perekonomian modern yang dikemukakan oleh para ahli, disana terdapat tiga (3) peranan pemerintah dalam perekonomian, yakni peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi ( Mangkusoebroto 1993: 2 ).

Menurut *Musgrave* ( 1984 :6 ) peran alokasi ditinjau untuk menyediakan barang – barang publik melalui berbagai kebijakan yang bersifat mengatur ( *Regulatory policies* ) yakni bagaimana agar sumber daya yang ada dapat di gunakan untuk menghasilkan barang privat dan barang publik secara seimbang.

Fungsi distribusi, menekankan pada bagaimana agar terjadi keseimbangan dan keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Fungsi stabilitas, Menekankan pada penggunaan kebijakan Anggaran ( *Budget Policy* ) sebagai alat untuk menjaga ketersediaan kesempatan kerja stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dari pendapat di atas dapat di ambil penjelasan sebagai berikut :

Feran alokasi yang dilaksanakan pemerintah terkait dengan penyediaan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat melalui kebijakan yang

bersifat mengatur, sesuai dengan kewenangannya, pemerintah berhak untuk membuat kebijakan yang bersifat mengatur.

Kebijakan yang bersifat mengatur ini di perlukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat oleh karena itu sebaiknya dana BOS yang di berikan pemerintah kiranya dapat di gunakan dengan sebaik – baiknya.

Kebijakan yang bersifat mengatur dari pemerintah di perlukan karena penyediaan barang dan jasa tidak sepenuhnya disediakan oleh swasta ( masyarakat ) melainkan sebagian harus disediakan oleh pemerintah. peran distribusi pemerintah terkait dengan upaya agar pendapatan maupun kekayaan terdistribusi secara merata, sumber ekonomi yang ada dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat ( *stakeholder* ) sekolah masalah keadaan yang terkait dengan distribusi pemerintah merupakan masalah yang sensitif dan sering kali mengundang perdebatan. Hal ini karena keadilan adalah konsep yang luas, dinamis dan terbuka.

Selain peran alokasi dan peran distribusi, peran yang menjadi perhatian pemerintah adalah peran stabilitas. Peran stabilitas diperlukan untuk mengatasi gejolak-gejolak yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat, peran ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah melalui pemerintah

Uraian diatas merupakan salah satu tugas negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, “Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” pemerintah

melakukan berbagai kebijakan dan kebijaksanaan untuk memenuhi kewajiban konstitusi tersebut.

Tugas dan fungsi pemerintah menurut *Adam Smith* ( M. Iksan dkk.

Materi Pokok UT MAPU 5202 : 1.3) ) memiliki tiga ( 3 ) fungsi yakni:

- a. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- b. Menyelenggarakan peradilan
- c. serta menyediakan barang – barang maupun jasa yang tidak dapat di sediakan oleh swasta.( Mangku Broto. 1993 : 2 ).

Fungsi pemerintah yang di kemukakan di atas cenderung ke pemilikan aliran kapasitas murni, yang beranggapan bahwa setiap individu mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga akan melaksanakan apa yang di anggap terbaik tersebut.

Namun pada kenyataan praktik kebebasan individu yang di asumsikan tersebut di atas mengalami kegagalan karena harus menghadapi kepentingan.

Menurut *Suparmoko* (1991 : 7 – 18 ) kegagalan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yakni :

- a. Adanya barang – barang publik atau barang kolektif terjadi dampak eksternalitas
- b. Adanya terjadi monopoli
- c. Terjadi inflasi dan deflasi
- d. Serta terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata.

Oleh sebab itu diperlukan intervensi pemerintah yang menjalankan peran sebagai pengatur berbagai kegiatan yang terjadi, peran pemerintah

dalam mengatur dana BOS di tiap sekolah hendaknya mengacu pada teori perekonomian modern.

#### 6. Kebijakan Pendidikan

Dalam dunia pendidikan maupun persekolahan kebijakan menurut *Hough* ( Syaiful 2007 : 94 ) kadang-kadang digunakan dalam pengertian sempit untuk mengacu pada tindakan formal yang diikutinya. Kebijakan disamakan dengan rencana dan program bahkan sering tidak dibedakan antara penyusunan kebijakan ( *policy making* ) dengan pengambilan keputusan ( *decision making* ). Kebijakan dianggap sebagai suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konflik dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Biasanya dibedakan dari konsep-konsep yang saling terkait.

Kebijakan pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi utama Institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yaitu :

2. Standar dan pengembangan kurikulum.
3. Visi, misi penetapan tujuan dan target pendidikan.
4. Rekrutmen dan pembinaan tenaga kependidikan.
5. Pengelolaan dan pembinaan kesiswaan.
6. Penyediaan buku pelajaran.
7. Penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan.
8. Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran.

9. Pengadaan, perawatan dan penggunaan perpustakaan dan laboratorium sekolah. (DEPDIKNAS 2005 : 8)

Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen institusi pendidikan diantaranya :

1. Pengalokasian sumber anggaran dan penggunaannya.
2. Pengelolaan gedung.
3. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan.
4. Pengelolaan fasilitas.

Kebijakan pendidikan memberi gambaran bahwa ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan demikian luasnya. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berimplikasi pada mutu pendidikan.

Pada dasarnya kebijakan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggungjawab membangun bangsanya. Mampu membangun dirinya sendiri adalah manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, artinya terhindar dari kemiskinan dan kebodohan, sehingga ia tidak menjadi beban pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Setelah mampu membangun dirinya, maka selanjutnya ia mempunyai kepedulian terhadap bangsanya melalui kesediaannya untuk menolong dan membantu sesamanya sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya masing-masing.

Jadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu implementasi dari manajemen institusi pendidikan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu.

## B. LANDASAN YURIDIS BOS

Supaya kebijakan program BOS berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah perlu untuk mengamankan dan melindungi program BOS dengan ketentuan atau aturan yang mendasari program tersebut.

Berikut ini dituliskan aturan yang mendasari program BOS

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31 ayat 1

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat 2

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 ayat 3

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 31 ayat 4

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendanaan Pendidikan

Pasal 46 ayat 1

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pasal 46 ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 46 ayat 3

Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan perturan pemerintah.

2. Landasan Operasional BOS

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional
10. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 Tentang Buku

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran (SD :Pkn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran (Depdiknas 2009 : 6 - 8)

### C. PROGRAM BOS

Sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Dirumuskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN. ( Amandemen UUD 1945 )

Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dengan yang sudah di amanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945.

Pemerintah dalam hal ini menjadi pengambil kebijakan telah berupaya untuk memberi pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, program peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Meskipun tujuan program utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta untuk tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. ( Depdiknas 2008 : 5 )

## 1. Latar Belakang Program BOS

- a. Mendukung percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun
- b. Membantu siswa tidak mampu atau miskin
- c. Memperoleh layanan dasar sampai tamat

## 2. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara detail jenis kegiatan boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.

## 3. Tujuan Umum

Meringankan beban masyarakat tentang biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

## 4. Tujuan Khusus

- a. Membebaskan semua siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik disekolah negeri maupun sekolah swasta.
- b. Dengan adanya BOS itu semua siswa yang tidak mampu secara ekonomi tidak lagi dikenai SPP sebagaimana yang berlaku sebelumnya.
- c. Meringankan biaya operasional sekolah bagi siswa di SMP swasta.

Dalam tujuan umum BOS tersebut di rumuskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sesuai yang terdapat dalam UU SISDIKNAS NO.20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1, yang berbunyi setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Jelas penuntasan wajib belajar mempunyai tujuan untuk :

1. Mendorong anak – anak usia 13 – 15 agar masuk SMP ataupun yang sederajat.
  2. Meningkatkan angka partisipasi untuk masuk SMP atau yang sederajat terutama di daerah yang jumlah anak yang bersekolah di SMP maupun sederajat masih sangat tinggi.
  3. Menurunkan angka putus sekolah SMP atau yang sederajat
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu meningkatkan penuntasan wajib belajar pendidikan 9 Tahun (Kalender Depdiknas 2006 :15 )
5. Sekolah Penerima BOS
- a. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
  - b. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima BOS.
  - c. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
  - d. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  - e. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda

harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

- f. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin. (Depdiknas 2009 : 11)

#### 6. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/ RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).

- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk foto copy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g. Pembiayaan langganan daya jasa, yaitu listrik air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika di sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, yaitu diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD di perbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.

- j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika di nilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu, dll).
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK),penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/PT Pos
- m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum satu set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- n. Bila seluruh komponen 1 s/d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubeler sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut didaerah masing-masing dengan

mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya. (Depdiknas 2009 : 27)

#### Larangan Penggunaan Dana BOS

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- g. Membangun gedung/ruangan baru. (Depdiknas 2009 : 30)

#### 7. Hubungan Program BOS Dengan Siswa

Dalam tujuan khusus program BOS adalah : menggratiskan seluruh siswa miskin dari beban biaya operasional sekolah negeri maupun sekolah swasta ( DEPDIKNAS 2009:4 ) dengan demikian dapat kita tangkap amanah yang ada dari program BOS yang memprioritaskan pada siswa yang kurang mampu atau miskin, menurut pendapat dari pengambil kebijakan di kementerian pendidikan nasional bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkehidupan kurang mampu / miskin yang tidak akan mampu membayar biaya pendidikan yang ada sehingga sumber daya manusia

yang ada pada masa yang akan datang akan mengalami masalah yang sangat serius.

Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan program yang akan membantu untuk meringankan beban masyarakat dan di ciptakan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ). Dengan harapan adanya program ini siswa-siswi yang kurang mampu merasa terbantu biaya pendidikannya, terbantu biaya-biaya operasionalnya di sekolah dengan angka siswa putus sekolah akan berkurang, dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia.

Namun demikian tidak semua biaya pendidikan itu gratis, ada biaya yang harus di tanggung oleh peserta didik. yakni biaya pribadi peserta didik seperti :

Biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus di keluarkan guna mengikuti proses belajar mengajar secara teratur dan berkelanjutan, uang saku, buku pelajaran, pakaian seragam sekolah, sepatu dan alat-alat lainnya.

#### 8. BOS Prioritas Pada Siswa Miskin

Program wajib Belajar 9 Tahun merupakan program prioritas pemerintah yang memerlukan perlakuan khusus. Wajar Diknas ini merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut demi kemajuan bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan kompetensi tingkat global. ( Depdiknas 2007 :9 )

Berdasarkan argumentasi diatas pemerintah memberi prioritas yang khusus kepada usia sekolah yang menghadapi masalah ekonomi, dan kesulitan

mendapatkan pekerjaan bagi orang tua mereka, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, masyarakat miskin atau kurang mampu, sulit bersaing dalam era globalisasi sedangkan tantangan tersebut sudah tidak dapat di elakan lagi.

Anak bangsa yang ada di pelosok tanah air, terpencil, yang hidup terkonsentrasi pada daerah kumuh akan kehilangan masa depan yang semakin tahun semakin mwnunjukkan perubahan.

Pendidikan dan kemiskinan adalah dua sisi yang cukup kontras, artinya pendidikan merubah hidup manusia menjadi lebih maju, berkualitas dan bermartabat, serta hak semua orang, orang miskin tidak dapat berbuat apa-apa untuk merubah nasibnya.

#### 9. Makna Sekolah Gratis

- a. Semua siswa di waktu sekolah di gratiskan dari seluruh biaya iuran yang ada, Jika kebutuhan sekolah tidak melebihi biaya BOS yang ada atau yang diterima oleh sekolah masing – masing.
- b. Hanya siswa miskin dan kurang mampu yang digratiskan dari segala iuran, sedangkan siswa yang di anggap mampu masih tetap harus di pungut biaya namun tidak besar biayanya dibandingkan dengan sebelum mendapatkan dana BOS. Dana BOS meringankan beban iuran seluruh siswa, jika memang di sekolah tersebut tidak memiliki siswa yang kurang mampu. BOS tidak identik dengan sekolah yang digratiskan namun dari dana BOS dapat diturunkan nilai kursnya tentang biaya satuan pendidikan.

Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata – rata persiswa pertahun, sehingga mampu menunjang atau membantu proses belajar mengajar, sesuai dengan standar pelayanan yang sudah di tetapkan ( DEPDIKNAS 2008 : 10 )

#### 10. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, di sarankan pada mengelola dana BOS untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/ pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.

4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

#### 11. Program BOS SMP di Kabupaten Sintang

Jika memperhatikan apa manfaat BOS dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan wajib belajar akan menerima BOS lebih besar ( Depdiknas 2009 : 5).

Pernyataan diatas bukan berarti melihat dimana sekolahnya berada dan berapa banyak siswanya serta berapa siswa miskin dan tidak miskin dapat dibantu oleh BOS. Dalam Buku Panduan Penggunaan BOS terdapat kalimat besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Alokasi BOS Tahun 2009

SD / SD LB di Kota	Rp. 400.000 / siswa / tahun
SD / SDLB Di Kabupaten	Rp. 397.000 / siswa / tahun
SMP / SMP LB / SMPT Kota	Rp. 575.000 / siswa / tahun
SMP / SMP LB/ SMPT di Kabupaten	Rp.570.000 / siswa / tahun

( Sumber Depdiknas 2009 : 5 )

Kebijakan pemerintah dalam pembagian dan BOS berdasarkan kota dan kabupaten baik SD maupun SMP memang perlu dipertanyakan; rata-rata SMP yang ada di kabupaten Sintang berada di kecamatan atau di desa ( lihat tabel 2.1). Sekolah besar siswa banyak dan bantuan operasional juga kecil. Terlebih lagi semuanya serba terbatas. Guru PNS sedikit, transportasi sulit, alat media pembelajaran kurang dan lain sebagainya.

Apabila kita memperhatikan Buku Panduan BOS terlihat besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku dihitung berdasarkan jumlah siswa. Disana terlihat ada jatah untuk sekolah di kota dan ada jatah BOS untuk daerah kabupaten.

Dana BOS yang diterima oleh semua sekolah di Kabupaten Sintang SD / SMP adalah berdasarkan daerah kabupaten, hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan daerah tingkat II Di Kalimantan.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352 ).Dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dan PERDA Kab. Sintang No 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang, bahwa Sintang adalah kota kabupaten dengan sebutan Kabupaten Sintang. Hal ini tidak berarti Sintang sebagai Kota Pemerintahan, dengan sebutan Kota Sintang ( Pemda Sintang 2007 ).

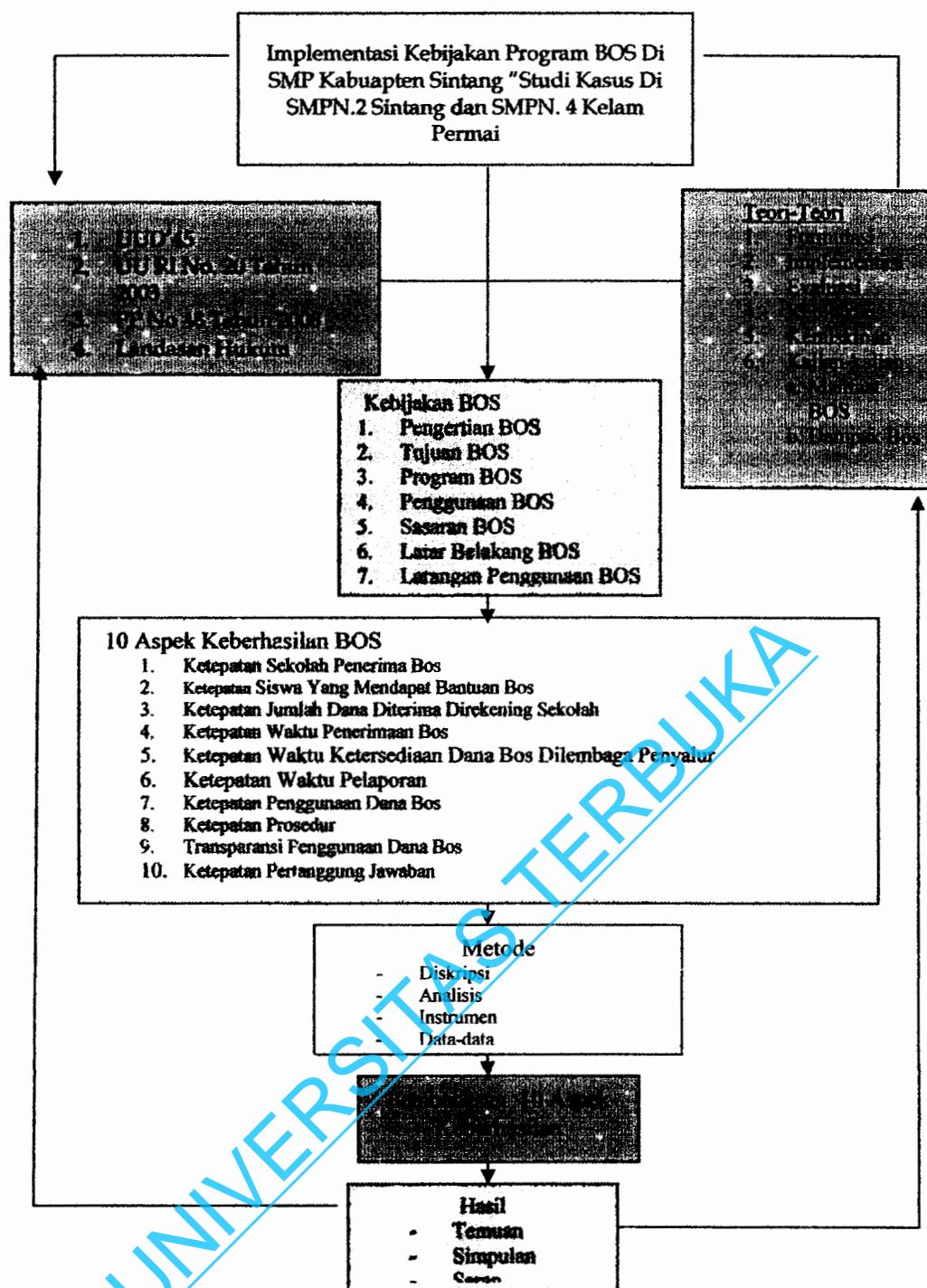
## 12. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD/SDLB di Kota : Rp 400.000,-/ siswa/tahun
2. SD/SDLB di Kabupaten : Rp 397.000,-/ siswa/tahun
3. SMP/SMPLB di Kota : Rp 575.000,-/ siswa/tahun
4. SMP/SMPLB di Kabupaten : Rp 570.000,-/ siswa/tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil diskusi dengan pembimbing I dan II dalam BTR I tanggal 10 -11

Oktober 2009 di Pontianak dan BTR II tanggal 19 - 20 Desember 2009

## D. DEFINISI OPERASIONAL DAN KONSEP

### 1. Evaluasi

Evaluasi menurut *Imron* (1996 : 86) adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan atau kah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak. Menurut *Jone* (Syaiful 2007:101) mengartikan evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu organisasi adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya. Pendekatan evaluasi menurut *Suryadi dan Tilaar* (1993 : 46 ) dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menerapkan suatu kriteria atas terjadinya gejala tersebut yaitu gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang menghantarkan program-program menuju kelompok sasaran yang di kehendaki.

### 3. Kebijakan

Kebijakan menurut *Koontz dan O'Donnell* (Syaiful 2007 : 97) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan menurut *Rich* (Syaiful 2007:97) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara sistem.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan (*Wisdom*) adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.

Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang di desain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objek teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya untuk mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat dilaksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai diharapkan atau tidak. Pembuatan informasi mengenai nilai atau harga dari kebijakan organisasi di masa lalu dan di masa datang untuk mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat dilaksanakan (*Syaiful 2007:103*).

#### 4. Definisi Konsep

- a. Evaluasi adalah : Untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan suatu kegiatan baik yang dilakukan oleh individu atau organisasi, ataupun pemerintah dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b. Kebijakan adalah : Suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta memberi pengaruh terhadap orang lain, dalam rangka tercapainya tujuan.

## 5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variabel beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 : Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Evaluasi Program	Materi BOS	1. Mengetahui program BOS 2. Tersedia petunjuk penggunaan BOS 3. Mengetahui tata tertib pengelolaan dana BOS
		Stakholder	1. Kemampuan mengelola dana BOS 2. Kemampuan menyusun RAKS 3. Transparansi pengelolaan dana BOS
		Metode sosialisasi BOS	1. Komunikasi yang baik dengan stakholder 2. Interaktif antar stakholder yang memerlukan pelayanan 3. Partisipasi sesuai dengan situasi dan kondisi
2.	Kebijakan Program	Kemampuan kerja	1. Pengelolaan dengan baik 2. Kemampuan mengelola 3. Penggunaan dana sesuai kebutuhan 4. Kerjasama dengan komite
		Kualitas layanan	1. Kesesuaian proses kerja stakholder 2. Memahami kebutuhan stakholder
		Responsibiliti	1. Kesesuaian hasil kerja dengan petunjuk program 2. Tanggap terhadap perubahan perlengkapan yang terjadi
		Disiplin	1. Disiplin terhadap waktu pelajaran 2. Disiplin terhadap tugas 3. Disiplin pelaksanaan program
		Akuntabilitas	1. Sesuai dengan petunjuk BOS 2. Kemampuan mengelola 3. Penggunaan dana sesuai kebutuhan

Sumber : Dwiyanto ( 1995 : 6 ) Supriharjo ( 1998 :7 )

## E. KAJIAN TERKAIT

### 1. Kajian Terkait

#### Pemanfaatan Program BOS di Daerah Selain Kabupaten Sintang

Manfaat dana BOS, telah mulai ada pihak-pihak yang melakukan studi dan audit secara independen, misalnya kajian singkat program BOS dari lembaga SMERU, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan juga monitoring oleh 56 Perguruan Tinggi yang dikoordinasi oleh Menko Kesra. Selain itu Tim PKPS BBM Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Kota juga melakukan monitoring secara internal terhadap pelaksanaan program BOS di tingkat sekolah. Lembaga Penelitian SMERU melakukan kajian singkat, dengan melakukan penelitian lapangan selama 3 minggu pada pertengahan Pebruari hingga Maret 2006. penelitian ini dilakukan di 10 Kab/Kota di 5 Propinsi yaitu di Kota Pasuruan, Kab. Malang, Kota Cilegon, Kab. Lebak, Kota Pematang Siantar, Kab. Tapanuli Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kota Mataram dan Kab. Lombok Tengah. Berdasarkan laporan sementara dari Tim Penelitian SMERU mengungkapkan beberapa indikator kualitatif yang dapat mengindikasikan adanya dampak positif program BOS, misalnya :

- a. Intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru meningkat.
- b. Pendapatan guru meningkat, baik guru tidak tetap maupun guru tetap. Dengan peningkatan penerimaan ini, ada indikasi bahwa semangat mengajar guru akan meningkat.

- c. Ketersediaan peralatan dan bahan ajar bertambah, baik yang habis pakai seperti kapur tulis maupun yang tidak habis pakai seperti peta, bola, dan peralatan keterampilan.
- d. Koleksi buku di sekolah bertambah, baik buku pegangan untuk guru maupun buku-buku pelajaran pokok dan buku pelajaran tambahan.
- e. Intensitas dan jenis kegiatan ekstrakurikuler siswa meningkat.
- f. Beban orang tua siswa menurun dengan menurunnya iuran komite atau SPP atau bahkan dapat menggratiskan iuran.
- g. Motivasi murid dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah meningkat karena mereka tidak lagi dibebani dengan tagihan tunggakan uang iuran sekolah.

Meskipun ada indikasi adanya dampak positif dari BOS, namun demikian program BOS juga menimbulkan dampak negatif khususnya tersitanya waktu belajar mengajar dan perhatian kepala sekolah terhadap proses belajar mengajar yang disebabkan oleh banyaknya waktu untuk mengurus administrasi dana BOS dan melayani tamu pemeriksa yang datang. Tim BPKP tidak melakukan penilaian terhadap dampak program, melainkan melakukan penilaian terhadap kinerja program berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu, dengan bobot penilaian masing-masing 10, 80 dan 10. Audit BPKP dilakukan pada periode audit per 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Audit dilaksanakan secara uji petik di 33 Propinsi sebesar Rp

977.052.427.190,- atau 19.02% dari populasi nasional sebesar Rp 5.136.932.005.250,-.

Hasil penilaian BPKP terhadap kinerja program PKPS BBM Bidang Pendidikan memberikan skor sebesar 95,27 (nilai maksimum 100), merupakan suatu kinerja yang sangat baik. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan kinerja PKPS BBM Bidang Pendidikan memperoleh skor tinggi :

- a). Tim PKPS-BBM Kab/Kota telah melaksanakan sosialisasi program PKPS-BBM.
- b). Sekolah penerima BOS telah sesuai kriteria yang telah ditentukan.
- c). Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung ke rekening sekolah.
- d). Penyaluran dana BOS ke sekolah telah dilaksanakan dengan baik, dan disosialisasikan melalui mass media (cetak/elektronik).
- e). Jumlah dana yang diterima sesuai dengan SK Alokasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- f). Pada umumnya sekolah penerima BOS telah membebaskan iuran siswa, telah mengurangi iuran bulanan dan membebaskan iuran siswa miskin.
- g). Pencairan dana BOS telah berlangsung melalui Bank dan Kantor Pos mulai bulan September hingga Oktober 2005.

Meskipun secara umum nilai kinerja cukup tinggi namun BPKP juga banyak menemukan beberapa kasus yang dikategorikan merugikan negara. Kasus terbesar adalah kasus penggunaan dana BOS yang tidak

sesuai dengan Juklak dan kerugian yang disebabkan tidak disetorkannya pajak ke kas negara.

Pada pelaksanaan program PKPS-BBM tahun 2005, Menko Kesra juga menugaskan 56 Perguruan Tinggi untuk melakukan monitoring secara independen. Monitoring dilakukan di seluruh propinsi, dimana setiap perguruan tinggi memonitor 2 kab/Kota. (Buletin Depdiknas 2006 : 40)

## 2. Dampak Program BOS

Temuan-temuan penting dari hasil monitoring 56 Perguruan Tinggi berkaitan dengan dampak BOS adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan dana BOS tidak boleh untuk honor guru PNS berakibat menurunnya semangat dan kinerja karena sudah biasa menerima tambahan honor.
2. Kurangnya sosialisasi tentang pelaporan penggunaan dana BOS menyebabkan pihak sekolah masih belum memahami sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dengan baik, sehingga pencairan dana berikutnya terhambat.
3. Terlalu banyaknya pengawasan menimbulkan rasa minder pada pelaksana tingkat sekolah.
4. Khususnya di tingkat SD, banyak Kepala Sekolah mengeluhkan beratnya beban administrasi yang harus ditanggung.
5. Sejak adanya program BOS, dana APBD untuk sekolah di beberapa Kabupaten/ Kota dihentikan/dikurangi.

Dalam laporan hasil monev Perguruan Tinggi, diuraikan juga tentang *good practices* dan *bad practices* pelaksanaan BOS.

#### Good Practices Pelaksanaan BOS

- \* Beberapa Kabupaten/Kota menutup kekurangan RAPBS di atas BOS dari APBD agar tidak ada penarikan dari siswa (gratis total)
- \* Sebagian besar sekolah penerima BOS tidak memungut biaya (gratis) dan sebagian masih memungut biaya, yang besarnya ditentukan melalui persetujuan Komite Sekolah.
- \* Memotivasi sekolah melakukan indentifikasi dan verifikasi kondisi ekonomi sekolah.
- \* Ada sekolah yang bersedia menanggulangi dana operasional sekolah sejak bulan Juli karena yakin Program BOS akan diterima.
- \* Memperlancar kegiatan Belajar Mengajar.
- \* Selama pelaksanaan tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.

Hal ini terjadi karena pemahaman dari pihak sekolah (penerima dana BOS) bahwa dana yang diterima benar-benar untuk kepentingan peningkatan proses pembelajaran. Oleh karenanya, alokasi dana oleh pihak sekolah baik untuk operasional sekolah maupun yang disalurkan ke siswa tidak ada pemotongan. Temuan ini menunjukkan adanya *Clean Governance*.

#### Bad practices pelaksanaan BOS

- \* Pembebasan SPP (BOS) hanya ditujukan siswa miskin saja.
- \* BOS juga diberikan pada siswa tak mampu untuk biaya transport

#### Practices Pelaksanaan BOS

- \* Transparansi Kepala Sekolah dalam pengelolaan BOS kurang
- \* Penentuan siswa miskin tidak menggunakan kriteria yang ada, cukup dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari aparat desa setempat.
- \* Terjadi *mark-up* jumlah siswa.
- \* Pungutan kepada orang tua siswa tetap marak sebagaimana sebelum ada BOS
- \* Dana BOS tidak seluruhnya digunakan untuk operasional sekolah contohnya digunakan untuk insentif Wakil Kepala Sekolah, Kaur Kurikulum.
- \* Ketidaktepatan penggunaan dana BOS
- \* Partisipasi masyarakat menjadi berkurang dengan adanya dana BOS, karena dana BOS dianggap sudah dapat menutupi semua kebutuhan sekolah. (Buletin Depdiknas 2006 : 54)

### 3. Pihak Sekolah Lemah Administrasi

Alokasi dana bos yang diberikan pemerintah untuk sekolah, tak jarang menimbulkan permasalahan di lapangan. apalagi keluhan tidak transparansinya penggunaan dana BOS maupun dugaan penyelewengan seringkali muncul kepermukaan perlu mendapat perhatian dari pemerintah kata, *Drs. Lukman Riberu M.Si* manager BOS Kabupaten Sintang. Munculnya keluhan mengenai pengelolaan dana BOS dikarenakan, pihak sekolah masih lemah dalam pemahaman administrasi pengelolaan dana BOS. Akibatnya timbul keluhan dari dewan guru dan masyarakat. Mereka banyak yang tak faham

administrasi. mana item yang boleh digunakan mana item yang tak boleh digunakan, belum dipahami secara menyeluruh. Lemahnya administrasi tak ayal membuat laporan pertanggungjawaban BOS menjadi kurang lengkap. munculnya keluhan dan pengaduan penyelewengan dana BOS dari guru dan masyarakat ke pihak pemerintah di akibatkan tidak transparansinya dan pertanggungjawaban yang lemah dari pihak pengelola dana BOS. Hal ini sering terjadi, makanya kita meminta pada pihak sekolah untuk memperhatikan dan mempelajari petunjuk penggunaan dana BOS dengan benar. Kalau secara kelembagaan ada Inspektorat yang turut mengawasi. walaupun demikian kita juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi, hingga apa yang menjadi tujuan pemerintah memberikan BOS tercapai dengan maksimal ( Kapuas Post, 19 Nop 2009.)

#### 4. Usut BOS Bermasalah

Serawai dan Ambalau ada masalah, DPRD minta pengawasan di tingkatkan

Mencuatnya sejumlah kasus terkait indikasi penyelewengan dana BOS disejumlah sekolah mengundang reaksi dari wakil ketua DPRD Sintang Gregorius Igo, ST. dia sangat menyayangkan jika dana BOS yang digunakan untuk mendukung kemajuan sekolah justru menjadi sumber penyimpangan. Telah terjadi penyimpangan penggunaan dana BOS disejumlah sekolah. Dan yang terbaru adalah ditemukan penyimpangan penggunaan dana BOS oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Gandis Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Penyimpangan dana BOS juga terjadi di sekolah Dasar Negeri 01 Serawai Kecamatan Ambalau dan sekolah Dasar Negeri 01 Ambalau

Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. munculnya pengaduan dari guru dan masyarakat komite di akibatkan oleh tidak transparansinya dana BOS dan tidak akuntable. Kepala sekolah tidak terbuka kepada guru, komite dalam penggunaan dana BOS jarang dilibatkan.

Dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kepala sekolah melanggar ketentuan atau prosedur yang terdapat Dalam panduan buku BOS, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah tersebut. (Kapuas post 25 Nop 2009).

5. SMP Negeri 04 Sintang menunggak listrik 15 juta

Minta di bayar oleh orang tua siswa

Munculnya berita mengejutkan ini datang dari salah satu orang tua siswa SMP Negeri 04 Sintang yang membeberkan keluhannya ke Media massa berkaitan dengan surat pemberitahuan dari sekolah yang di serahkan anaknya kepada orang tuanya tersebut mengenai sumbangan komite SMPN.04 Sintang untuk membayar tunggakan listrik di SMPN.04 yang mencapai jumlah 15 juta rupiah. Orang tua tersebut tidak terima karena menurutnya dana untuk membayar listrik sudah ada di dalam BOS, selanjutnya dia tidak terima, menurutnya anaknya di mintai dana sebesar Rp.40.000,00 karena kelas VIII yang kelas IX menyumbang Rp. 20,000,00. Selain itu orang tua siswa ini bertanya pada komite kenapa orang tua tak dilibatkan rapat dan berapa lama listrik tidak di bayar. Menurut harian ini tunggakan tidak terbayar sudah 38 bulan. Selain itu pula di SMPN.04 Sintang telah terjadi pergantian kepala sekolah pada bulan Mei 2009, sebenarnya

SMPN.04 Sintang tidak akan menunggak sebanyak itu apabila pihak sekolah dapat mengelola dana yang di kucurkan pemerintah dengan bijaksana. Masih menurut media massa ini orang tua bertanya kemana dana BOS kenapa sekolah membebani orang tua dengan membayar tunggakan listrik. [ Kapuas raya post,7-8 Des 2009 ].

#### 6. Temuan Seputar Pengelolaan BOS di Sekolah

1. Tidak memasang RKAS/RAPBS pada papan pengumuman sekolah.
2. Tidak mengumumkan pada papan pengumuman sekolah realisasi penggunaan dana /laporan triwulan.
3. Rencana penggunaan dana (Format Bos K2) tidak memuat seluruh dana yang diterima sekolah.
4. Belum menyusun semua buku sesuai petunjuk bos (K4, K5 dan K6 belum dibuat).
5. Masih ada yang keliru dalam menyusun pembukuan BOS
6. Bukti pengeluaran (kwitansi/daftar pembayaran honorarium) masih banyak yang tidak sah.
7. BOS daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh bos reguler, seperti tunjangan wakil kepala sekolah, wali kelas, guru piket dll. kecuali 10 hal yang dilarang oleh bos reguler.
8. Untuk SMA BOS daerah digunakan seperti biasa. (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 2007)



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan Deskriptif yang mengkaji secara rinci mengenai bagaimana kebijakan program BOS di implementasikan di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai sebagai suatu kasus. Deskripsi secara rinci disampaikan berkaitan dengan bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat sekolah yaitu kepala sekolah, guru, staf siswa dan komite BOS SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai.

Pendapat dan pandangan mereka ini dideskripsikan melalui sepuluh aspek sebagai ukuran keberhasilan program BOS yaitu apakah implementasi BOS telah (1) tepat sasaran, (2) tepat jumlah, (3) tepat waktu, (4) tepat penggunaan, (5) transparansi (6) tepat pelaporan, (7) tepat prosedur, (8) tepat rekening bank, (9) tepat penyaluran, (10) pertanggungjawaban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif menurut *Singarimbun* (1998 : 4) penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki ( 2 ) tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik, tertentu
2. Untuk mengetahui frekuensi terjadinya suatu aspek penomena sosial dan mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tersebut.

- **Penelitian terapan** : Membuat perubahan pemerisa hasilnya adalah pengambil keputusan, guru,pejabat, adminisrtasi dan produksi. Berusaha untuk memperoleh temuan – temuan yang dapat di gunakan untuk perbaikan kegiatan atau perbaikan program.

#### C. RESPONDEN

1. kepala sekolah SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai
2. wali kelas, staf dikedua SMPN tersebut.
3. bendahara BOS dan staf kedua SMPN tersebut.
4. guru, dan komite dikedua SMPN. Tersebut
5. komite kedua SMPN. Tersebut
6. guru tidak tetap, PTT
7. siswa kedua SMPN tersebut.

#### D. ALAT PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data melalui

- a). quesioner
  - b). wawancara
  - c). observasi
- a. Pengumpulan data melalui quesioner dilakukan dengan membuat berbagai pertanyaan sesuai dengan sepuluh aspek keberhasilan BOS.
  - b. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan.

- c. Pengumpulan data melalui observasi, dilakukan dengan ke objek penelitian serta penelitian serta mencari data primer dan data sekunder dilokasi penelitian.

#### E. SUBJEK PENELITIAN

1) Subjek penelitian ini adalah :

1. Kepala SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai
2. Komite SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai
3. Dewan Guru SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai
4. Staf tata usaha
5. Siswa SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai

2) Penentuan lokasi penelitian

a. Tempat

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai

b. Alasan tempat penelitian

- \* Pertimbangan biaya , waktu, tenaga
- \* SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai adalah penerima dana BOS
- \* SMPN 2 Sintang di Kabupaten dan SMPN 4 Kelam Permai di kecamatan
- \* Keperluan tugas program Magister Universitas Terbuka Program Studi Magister Administrasi Publik

- \* SMPN.2 Sintang memiliki siswa yang banyak (852) orang dan SMPN.4 Kelam Permai memiliki siswa yang sedikit (66) orang dengan beban Kurikulum yang sama.

## F. JENIS DATA PENELITIAN

### a. Jenis data Penelitian

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan berikut di deskripsikan sebagai berikut :

#### 1. Rekaman Audio dan Video

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya, dari hasil rekaman tersebut maka dideskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara.

#### 2. Catatan lapangan

Dalam membuat catatan di lapangan, maka peneliti melakukan prosedur dengan mencatat seluruh peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian, dan hal ini berkisar pada isi catatan lapangan, model dan bentuk catatan lapangan, proses penulisan catatan lapangan.

### 3. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

### 4. Foto

Foto merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun sangat mendukung kondisi objektif penelitian berlangsung. Foto-foto untuk artefak budaya sekolah. (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2010 : 219-220)

Melalui sumber pengumpulan data dapat dilakukan melalui

- a. Sumber
- b. Sumber sekunder

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat wawancara.

Sumber Sekunder, merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain, dokumen surat-surat.

*Sutrisno Hadi* (Sugiono 2004 : 194) mengemukakan bahwa yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *Interview*

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan subjek kepada peneliti benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa Interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti kepada dirinya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti

Dalam melakukan wawancara dengan subjek SMPN.2 Sintang dan SMPN. 4 kelam Permai menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara langsung dengan menyiapkan Instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dimana alternatif pertanyaannya telah disiapkan dan untuk wawancara langsung pertanyaan dibacakan dengan jawaban langsung dan terekam atau dicatat oleh peneliti, setiap subjek di dua SMPN tersebut pertanyaan yang sama.

1. Kuesioner
2. Observasi (Pengamatan)

*Sutrisno Hadi* (Sugiono 2004 : 203) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis

Menurut *Spradley* (Sugiono 2004 : 347) objek penelitian dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif terdiri dari tiga (3) komponen, Place (tempat) actor (pelaku) activities (kegiatan)

1. Place : Tempat dimana interaksi dengan situasi sosial sedang berlangsung. Dalam pendidikan bisa diruang kelas, kantor, ruang guru, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang bimbingan dan konseling, ruang OSIS.
2. Actor : Orang yang sedang memainkan peran tertentu dalam suatu lingkungan. Kepala Sekolah, Komite, Guru, Pengurus OSIS, Pengawas Pembina Sekolah, Ketua Kelas, Ketua regu, dan Siswa.

3. **Activities** : Kegiatan yang sedang berlangsung atau dalam situasi sosial kegiatan belajar mengajar, ekstra kurikuler, praktik di laboratorium, penjaskes, praktek komputer, pramuka, olahraga, mengikuti lomba mata pelajaran perbaikan sekolah.

#### G. METODE ANALISIS DATA

Untuk menganalisis data penelitian SMP implementasi kebijakan program BOS di Kabupaten Sintang (Studi kasus di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai) menggunakan data nominal dan data ordinal.

Pengertian data

Menurut *Prasetya Irawan* (MAPU 5103 : 5.2)

Data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (recorded) segala sesuatu itu bisa dokumen, batu-batuan, air, pohon, manusia.

##### 1. Data nominal

Data nominal adalah data yang meskipun bisa diubah menjadi angka, tidak memiliki nilai kualitas apapun, walaupun data itu berbentuk angka, tetapi angka ini berfungsi hanya sebagai label semata *Prasetya Irawan* (MAPU 5103 : 5.5).

##### 2. Data ordinal

Data ordinal adalah data yang tidak memiliki nilai kualitas, mengandung sifat urutan (order) data ranking. Peneliti bisa memperoleh data ordinal dengan membuat segala terter (1 – 5) 1 = sangat buruk, 5 = sangat baik. *Prasetya Irawan* (MAPU 5103 : 5.6)

Dengan menggunakan data diatas peneliti menganalisis data tentang keberhasilan pengelolaan dana BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai, dan kualitas kinerja kepala sekolah SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai dalam pengelolaan BOS.

Untuk mengevaluasi kebijakan program BOS di SMPN. 2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai berdasarkan faktor keberhasilan pengelolaan dana BOS maka di sajikan data-data berikut :

Rumus : Indek Kualitas Kasar (KK).

$$\text{Indek KK : } \frac{\sum \text{Skor Nyata}}{\sum \text{Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

Sumber (*Prasetya Irawan* MAPU 5103 : 10.23)

Dari data questioner yang di sampaikan oleh peneliti ke SMPN. 2 Sintang dengan 35 responden di tanya tentang kualitas kinerja Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui 10 aspek keberhasilan program BOS.

Masing-masing variabel diukur dengan skala *Likert* (1 sampai 5), sebagai berikut :

1. Sangat tidak bagus
2. tidak bagus
3. Kurang bagus
4. Bagus
5. Sangat bagus

Skor minimal 1

Skor maksimal 5

**Keterangan :**

$$\text{Indek KK} : \frac{\Sigma \text{ Skor Nyata}}{\Sigma \text{ Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

$\Sigma$  = jumlah skor nyata

$\Sigma$  = jumlah skor maksimal

$\Sigma$  = jumlah responden dikali skor maksimal 5

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN

### A. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan implementasi kebijakan program BOS di SMPN 2 Sintan dan SMPN 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang, peneliti menggunakan pendekatan teori Jone ( 1951 : 295 ) bahwa

“Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan:

Serta pendekatan teori dari Winarno (2002:101) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial (sangat penting) dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2002:102).

Penggunaan dana BOS

Pengelolaan dana BOS oleh Sekolah Dasar ( SD ) dan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) seluruh Indonesia telah diatur oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Buku Panduan BOS. Hal ini tentu dimaksudkan agar sekolah – sekolah dalam menggunakan dana BOS berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan sedemikian rupa. Dalam pembahasan ini dapat dicontohkan beberapa ketentuan penggunaan dana BOS :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian sekolah ( Depdiknas 2009:27 )

Pemanfaatan dana BOS ini di perkuat lagi dengan pernyataan kepala SMPN 2 Sintang.

“Penggunaan dana BOS disekolah kami mengacu pada buku panduan BOS, disana diterangkan mengenai hal – hal yang boleh dibiayai oleh BOS dan yang tak boleh dibiayai oleh BOS”.  
( Wawancara tanggal 20 – 10 – 2009 )

waktu Peneliti menanyakan hal penggunaan dana BOS di SMPN 4 Kelam Permai, beliau mengutarakan pendapatnya yaitu :

“ Menurut saya buku panduan BOS, tentang penggunaan sudah baik, namun kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah saya yang dipedalaman begini”

Mengenai penggunaan dana BOS, berlaku Standar Nasional. Hal ini sebagai pedoman bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS.

Manajemen sekolah dalam mengelola dan BOS di tiap –tiap sekolah selalu terbuka, Stakeholder disekolah hendaknya penerimaan dan pengeluaran dana BOS. Dengan keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS diharapkan rencana

kegiatan sekolah dapat diketahui dan terbantu biayanya serta memperlancar proses belajar mengajar disekolah.

Bila membaca buku panduan BOS yang menyatakan tugas dan tanggung jawab sekolah pada *Point,D.* mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah. Menurut komponen dan besar dananya dipapan pengumuman sekolah, dan *Point,E.* menyatakan mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS ( Depdiknas 2009:2 ).

Menurut pendapat Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang demikian

“Semestinya tiap sekolah dapat melaksanakan ketentuan ini kalau SMPN 2 Sintang, dana BOS dibahas dalam rapat dengan Dewan Guru dan Komite”  
( Wawancara tanggal 20 – 10 – 2009 )

Demikian pula halnya pendapat Kepala SMPN 4 Kelam Permai

“ Saya bicarakan BOS pada saat rapat dengan Guru dan rapat Komite, bahkan waktu istirahat jam belajar saya berbicara dengan beberapa guru – guru”

Pengelolaan dana BOS yang transparan menandakan bahwa dana BOS digunakan dengan sebaik – baiknya oleh pihak sekolah.

Laporan dari sekolah adalah dasar pemberian BOS sebab dari laporan tersebut diketahui jumlah siswa yang belajar disekolah tersebut, data yang dilaporkan ini menjadi sangat berarti bagi Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan dana BOS. dan tidak boleh ada sekolah yang dengan sengaja untuk menambah jumlah siswa dengan maksud mendapatkan dana yang lebih besar.

Hal ini dipertegas lagi oleh Kepala SMPN 2 Sintang

“ Memang sekolah dilarang untuk menambah jumlah siswa pada laporan data siswa ke Dinas Pendidikan dengan maksud untuk mendapat dana yang banyak”  
( Wawancara tanggal 20 – 10 – 2009 )

Kepala SMPN 4 Kelay Permai memberikan pendapatnya demikian;

“ Sekolah tidak boleh menambah data siswa karena merugikan Negara ”  
( Wawancara tanggal 28 – 10 – 2009 )

Laporan data jumlah siswa diharapkan akurat, tidak mengada – ada dengan maksud untuk manipulasi data.

Dalam buku panduan BOS menyebutkan tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS Kab/Kota, *Point, G.* mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dari Lembaga Penyalur ( Depdiknas 2009;19 )

Dalam buku panduan BOS, menyatakan bahwa penanggungjawab BOS tingkat sekolah terdiri dari Penanggungjawab Kepala Sekolah, Anggota, Bendahara, satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah. ( Depdiknas 2009; 20 )

Dengan adanya struktur organisasi pengelolaan dana BOS diharapkan semua orang yang menepati posisi tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing – masing. sekolah dituntut untuk mengikuti aturan yang disarankan oleh buku panduan BOS, jangan sampai disekolah terjadi rangkap tugas, atau dirangkap oleh satu orang saja.

Pada saat ditanya dalam wawancara Kepala SMPN 2 Sintang memberi pendapat demikian.

“ Kami telah menunjuk, para petugas yang disarankan oleh pemerintah dalam mengelola BOS, ada penangng jawab, bendahara, sekretaris, tim BOS SMPN 2 Sintang, jadi segala urusan yang berkenaan dengan BOS berurusan dengan tim itulah ”

( Wawancara tanggal 20 – 10 – 2009 )

Kita lihat apa pendapat Kepala SMPN 4 Kelam Permai

“Saya belum baca aturan tentang susunan pengelola BOS disekolah, makanya dana BOS saya urus sendiri tapi saya punya bendahara BOS, yang lain tak punya”  
( Wawancara tanggal 28 – 10 – 2009 )

Dengan struktur organisasi ini, sebenarnya dapat memperlancar tugas dalam mengelola dana BOS serta membangun kepercayaan bagi orang – orang yang mau bekerja dalam organisasi tersebut, selanjutnya dapat menghilangkan asumsi program BOS berbeda dengan jenis bantuan kesekolah sebelumnya.

Pengambilan dan penyaluran dana BOS tiap – tiap sekolah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bilamana pihak pengelola program BOS disekolah tidak memahami prosedur pengambilan dan penyaluran dana BOS akan menimbulkan permasalahan, terkesan ada penyimpangan.

Prosedur pengambilan dana BOS di Bank oleh sekolah sudah ada ketentuannya seperti nomor rekening Bank atas nama sekolah, adanya surat pertanggung jawaban ( SPJ ) serta lembar realisasi penerimaan dana BOS .

Dalam lembar realisasi dana BOS, harus ditanda tangani dan dicap oleh masing – masing pejabat sesuai dengan peranannya, setelah semua menandatangani lembaran realisasi dana BOS baru dapat dicairkan oleh pihak Bank.

Berkaitan dengan prosedur pengambilan dana BOS kepala SMPN 2 Sintang memberikan pendapat

“Kepala sekolah yang akan mengambil dana BOS di Bank harus menunjukkan lembaran realisasi pengambilan dana BOS semua pejabat yang tertera dalam lembaran tersebut harus menandatangani, pihak Bank baru mau mencairkannya”

( Wawancara tanggal 21 – 10 – 2009 )

Sedangkan pendapat Kepala SMPN 4 Kelam Permai

“ Lembaran realisasi pengambilan dana BOS adalah salah satu syarat dalam mengambil dana BOS di Bank, dan mesti ditandatangani dan dicap oleh nama yang tercantum dalam lembaran tersebut ”

Melalui prosedur yang benar maka tugas dan tanggungjawab akan bekerja dengan baik.

Penyaluran dana kepihak yang bentuk menerima merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab oleh pengelola BOS. Pengelola BOS mempersiapkan data penerima dana BOS sesuai fungsi dan tanggungjawabnya masing – masing.

Penyaluran ini salah satunya adalah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS ( Depdiknas 2009 ; 27 ).

Menanggapi dengan penyaluran ini Kepala SMPN 2 Sintang memberikan pendapatnya.

“ SMPN 2 Sintang memiliki 6 orang PTT dan 4 orang GTT semua kami bayar dengan dana BOS, sesuai dengan bidang tugasnya, kami tidak minta dengan Komite untuk menggaji mereka PTT/GTT itu semua dari dana BOS ”.  
( Wawancara tanggal 21 – 10 – 2009 )

Demikian juga dengan jawaban dari Kepala SMPN 4 Kelam Permai

“ Saya punya GTT 4 orang dan PTT 1 orang semua saya gaji dengan dana BOS, Pembayarannya 3 Bulan sekali, jadi mereka rapel menerimanya ”.  
( Wawancara tanggal 29 – 10 – 2009 )

Penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan pihak Komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS ( Depdiknas 2009:27 ).

Pertanggungjawaban menjadi sangat penting dalam mengelola dana BOS dari pertanggungjawaban ini dapat diketahui keberhasilan program BOS ini.

Pertanggungjawaban ini harus disertai dengan bukti – bukti fisik seperti buku penerimaan, Buku Kas pengeluaran, Kwitansi, Materai, Pajak, Dan bukti penyaluran dana BOS tersebut.

Pernyataan diatas dipertegas lagi oleh Kepala SMPN 2 Sintang

“ Dana BOS yang sudah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah, ya termasuk SMPN 2 Sintang ”.  
( Wawancara tanggal 21 – 10 – 2009 )

Demikian juga pernyataan Kepala SMPN 4 Kelam Permai

“ sekolah wajib mempertanggungjawabkan dan BOS setelah digunakan, dan mesti dilengkapi dengan bukti fisik ”.  
( Wawancara tanggal 29 – 10 – 2009 )

Dengan pertanggungjawaban dana BOS yang benar akan memberi arti penting dalam kelangsungan program BOS itu sendiri.

## 2. Pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai

### 2.1. Pemanfaatan dana BOS

Pengelolaan dana BOS ditingkat sekolah adalah kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dan dibantu oleh bendahara, anggota dan satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah ( Depdiknas 2009 : 20 ).

Peranan Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab mengingat fungsi dan peranannya yang sentral disekolah. Kegiatan disekolah berpedoman pada kepala sekolah, kepala sekolah merancang, mengawasi kegiatan sekolah, termasuk pengelolaan keuangan disekolah.

Seberapa besarkah peranan Kepala sekolah dalam mengelola dana bila dilihat dari pengelolaan dana dan Kualitas kinerja Kepala sekolah dalam mengelola BOS dapat di uraikan dalam pembahasan ini melalui Grafik.

Dari dana yang diterima oleh SMPN 2 Sintang Rp 485.640,00 dialokasikan ke semua pengeluaran yang terdapat dalam buku panduan BOS.

Dari Grafik tersebut kelihatan bahwa SMPN 2 Sintang kecenderungan Dana BOS di anggarkan untuk Alat Tulis dan Kertas ( ATK ) Rp.144.333.208,00 ( 29.72% ) dan yang terkecil adalah pos pengelolaan dana BOS hanya sebesar Rp. 1.214.100,00 ( 0,25% ).

Berhubungan penelitian ini Studi Kasus, maka data – data yang ditampilkan disini adalah data – data rill SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai.

Perbedaan dalam peruntukan dana antara SMPN 2 Sintang dengan SMPN 4 Kelam Permai ditampilkan dalam bentuk Grafik. Penggunaan dana Terletak pada Situasi dan kondisi sekolah.

Dari Grafik pemanfaatan dana SMPN 4 Kelam Permai

SMPN 4 Kelam Permai memfokuskan dananya pada KBM dan pembayaran Honorarium GTT/PTT sebesar Rp. 18.000.000,00 ( 47,84% ) dengan alasan kurangnya tenaga Guru Negeri dan Pembelian Alat Praga Rp.3.500.000,00

(9.30%) ditujukan untuk kegiatan Ekstrakurikuler beberapa pos terpaksa tidak terpenuhi.

## 2.2 Kualitas kinerja Kepala SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai.

Dalam menilai Kualitas kinerja Kepala SMPN 2 Sintang dan SMPN 4 Kelam Permai. Tentu peneliti mengumpulkan data dari Quisiner yang tidak diberikan kepada 35 responden di SMPN 2 Sintang dan 11 responden dari SMPN 4 Kelam Permai.

Tabel 4.2 : Penilaian pengelolaan dana BOS SMPN. 2 Sintang

Respon den	Ketepatan										Total
	Sasaran	Jlh	Wakt u	Gu na	Trans paran si	Pelapor an	Prose dur	Bank	Salur an	Akunt abel	
1	5	5	4	2	4	1	2	5	2	2	32
2	4	5	5	2	3	3	3	5	3	3	36
3	5	5	3	4	5	4	1	5	4	4	40
4	5	5	2	5	3	5	1	5	5	3	39
5	4	5	5	2	2	2	4	5	2	2	33
6	5	5	5	2	1	1	5	5	2	1	32
7	4	5	5	1	1	1	1	5	1	2	26
8	3	5	5	1	2	1	1	5	2	3	28
9	5	5	5	1	1	1	1	5	1	1	26
10	5	5	5	1	1	1	1	5	1	1	26
11	5	5	5	1	1	1	1	5	1	1	26
12	4	5	5	1	1	2	1	5	3	4	31
13	4	5	5	1	1	3	1	5	2	5	32
14	5	5	5	1	4	4	1	5	2	5	37
15	5	5	5	2	3	5	3	5	1	5	39
16	5	5	5	3	3	5	2	5	1	5	39
17	5	5	3	2	2	5	3	5	4	4	38
18	5	5	5	1	1	4	4	5	4	4	38
19	5	5	5	2	2	4	4	5	4	5	41
20	5	5	5	3	1	5	4	5	3	5	41
21	5	5	5	2	1	4	1	5	3	4	35
22	5	5	5	1	1	4	2	5	3	4	35
23	5	5	5	1	1	4	2	5	3	3	34
24	4	5	5	1	2	3	1	5	3	3	32
25	3	5	5	1	3	1	1	5	3	1	28
26	5	5	5	1	4	1	1	5	3	1	31
27	5	5	5	3	5	1	2	5	4	1	36
28	5	5	5	2	5	1	4	5	4	1	37

29	5	5	5	3	5	1	3	5	4	1	37
30	5	5	4	4	1	1	2	5	4	2	33
31	4	5	4	5	5	1	1	5	3	3	36
32	5	5	4	5	5	1	1	5	2	3	36
33	5	5	4	5	5	1	1	5	2	5	38
34	5	5	2	3	5	1	1	5	2	5	34
35	5	5	2	5	5	1	1	5	1	5	35
<b>Jlh</b>	<b>164</b>	<b>175</b>	<b>157</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>68</b>	<b>175</b>	<b>92</b>	<b>107</b>	<b>1197</b>

### Persentase pemanfaatan dana BOS

Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMPN. 2 Sintang dalam mengelola dana BOS melalui aspek kualitas ketepatan

1	Sasaran	=	$\frac{164}{175}$	x	100%	=	93.71%
2	Jumlah	=	$\frac{175}{175}$	x	100%	=	100%
3	Waktu	=	$\frac{157}{175}$	x	100%	=	89.71%
4	Penggunaan	=	$\frac{80}{175}$	x	100%	=	45.71%
5	Transparansi	=	$\frac{95}{175}$	x	100%	=	54.28%
6	Pelaporan	=	$\frac{84}{175}$	x	100%	=	48.00%
7	Prosedur	=	$\frac{68}{175}$	x	100%	=	38.85%
8	Bank	=	$\frac{175}{175}$	x	100%	=	100%
9	Penyaluran	=	$\frac{92}{175}$	x	100%	=	52.57%
10	Akuntabilitas	=	$\frac{107}{175}$	x	100%	=	61.14%
Aspek Kualitas Ketepatan		=	$\frac{1197}{1750}$	x	100	=	68.40%

Penafsiran : Indeks kualitas kinerja Kepala SMPN. 2 Sintang dalam Mengelola BOS menurut 35 Responden Cukup Baik (68.40%) semua variabel ada yang belum cukup baik, kecuali pada jumlah dan rekening Bank. Dan yang paling buruk adalah prosedur (38.85%).

Tabel 4.3 : Penilaian pengelolaan dana BOS SMPN. 4 Kelayan Permai

Respon den	Ketepatan										Total
	Sasar an	Juml ah	Wakt u	Guna	Tran spara nsi	Pelapor an	Prose dur	Bank	Peny alura n	Akun tabel	
1	5	5	4	2	2	5	2	5	2	2	34
2	5	5	4	2	1	4	2	5	2	2	32
3	5	5	3	2	2	5	3	5	3	3	36
4	5	5	5	1	2	5	2	5	3	1	34
5	5	5	5	1	1	5	2	5	2	1	32
6	5	5	5	1	1	5	5	5	2	1	35
7	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47
8	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47
9	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	43
10	5	5	5	1	4	5	2	5	2	2	36
11	5	4	5	2	1	5	1	5	2	1	31
<b>Juml ah</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>407</b>

Sumber : SMPN. 4 Kelayan Permai 2009

Persentase pemanfaatan dana BOS

Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMPN. 4 Kelayan Permai dalam mengelola dana BOS melalui aspek kualitas ketepatan

$$1 \quad \text{Sasaran} \quad = \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

2	Jumlah	$= \frac{54}{55} \times 100\%$	$= 98.18\%$
3	Waktu	$= \frac{51}{55} \times 100\%$	$= 92.72\%$
4	Penggunaan	$= \frac{27}{55} \times 100\%$	$= 49.09\%$
5	Transparansi	$= \frac{20}{55} \times 100\%$	$= 36.36\%$
6	Pelaporan	$= \frac{54}{55} \times 100\%$	$= 98.18\%$
7	Prosedur	$= \frac{30}{55} \times 100\%$	$= 54.54\%$
8	Bank	$= \frac{55}{55} \times 100\%$	$= 100\%$
9	Penyaluran	$= \frac{33}{55} \times 100\%$	$= 60\%$
10	Akuntabilitas	$= \frac{28}{55} \times 100\%$	$= 50.90\%$

$$\text{Aspek Kualitas Ketepatan} = \frac{407}{550} \times 100 = 74.00\%$$

Penafsiran :

dalam mengelola BOS menurut 11 Responden Baik (74.00%) semua variabel ada yang belum cukup baik, kecuali pada sasaran dan rekening Bank. Dan yang paling buruk adalah transparansi (36.36%).

Sumber : SMPN. 4 Kelam Permai 2009

## B. TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN

Temuan di SMPN.2 Sintang

1. Berdasarkan pertanyaan, apakah program BOS di SMPN 2 Sintang sudah tepat sasaran?

Untuk menjawab pertanyaan diatas telah dilakukan wawancara dengan kepala SMPN.2 Sintang, berikut pernyataan kepala SMPN. 2 Sintang.

“Seluruh siswa SMPN.2 Sintang yang berjumlah 852 orang dalam tahun pelajaran 2009/2010, menerima dana BOS tanpa membedakan status sosial orang tua siswa, walaupun 30% (256) orang siswa yang sekolah di SMPN. 2 Sintang dikategorikan mampu secara ekonomi, karena memang tujuan BOS untuk operasional sekolah, sasarannya seluruh SD/SMPN, tapi untuk perhitungannya berdasarkan siswa di sekolah (Wawancara tanggal 20 – 21 Oktober 2010)

2. Berdasarkan pertanyaan apakah BOS di SMPN. 2 Sintang sudah tepat jumlah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan wawancara ke semua wali kelas SMPN. 2 Sintang

Kelas VII a	=	40	siswa
Kelas VII b	=	40	siswa
Kelas VII c	=	39	siswa
Kelas VII d	=	39	siswa
Kelas VII e	=	40	siswa
Kelas VII f	=	40	siswa
<u>Jumlah 6 kelas</u>	=	<u>238</u>	<u>siswa</u>
Kelas VIII a	=	40	siswa
Kelas VIII b	=	40	siswa
Kelas VIII c	=	41	siswa
Kelas VIII d	=	40	siswa
Kelas VIII e	=	40	siswa
Kelas VIII f	=	40	siswa
<u>Jumlah 6 kelas</u>	=	<u>241</u>	<u>siswa</u>
Kelas IX a	=	40	siswa
Kelas IX b	=	41	siswa
Kelas IX c	=	40	siswa
Kelas IX d	=	40	siswa
Kelas IX e	=	40	siswa

Kelas IX f	=	40	siswa
Jumlah 6 kelas	=	241	siswa

(wawancara dengan 18 guru wali kelas 20 dan 21 Oktober 2009)

3. Apakah SMPN.2 Sintang tepat waktu dalam pengambilan dana BOS?

Pengambilan dana BOS SMPN.2 Sintang kurang tepat waktu, maksudnya pihak Bank Pemabngunan Daerah (BPD) Cabang Sintang sebagai penyalur dana BOS tidak memberitahukan kepada SMPN.2 Sintang bahkan ke sekolah-sekolah, bahwa dana BOS yang masuk di rekening sekolah telah tersedia.

“Kami harus pergi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dulu, untuk menanyakan apakah BOS sudah masuk ke rekening sekolah,” kata kepala SMPN.2 Sintang. (Wawancara tanggal 20 Oktober 2009)

4. Dana BOS harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sekolah.

Berdasarkan data yang didapat jumlah dana BOS SMPN.2 Sintang tahun 2009 Rp. 485.640.000,- Dana ini digunakan untuk keperluan: operasional sekolah selama setahun menurut keterangan dari bendahara BOS SMPN.2 Sintang dana tersebut digunakan untuk honor GTT dan PTT Rp. 85.812.588,- (17,6%), untuk keperluan alat tulis dan kertas Rp. 144.332.288,- (29,72%), pembelian buku paket Rp. 25.010.460,- (3,15%) serta pajak Rp. 15.977.556,- (3,29%), besar kecilnya dana yang disalurkan ke tiap post pengeluaran dilihat dari kondisi sekolah. (Wawancara tanggal 20 Oktober 2009)

5. Apakah kepala sekolah sudah transparan dalam mengelola dana BOS.

Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, serta sekolah dalam mengelola dana BOS harus transparan dan

bertanggungjawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah. (Depdiknas 2009 :12)

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan guru, staf tata usaha dan komite, walaupun jawaban mereka bervariasi, namun dapat dirumuskan oleh peneliti jawaban mereka tersebut.

“ Kami tidak tahu berapa dana BOS, diterima oleh kepala sekolah,” itu urusan kepala sekolah, dan bendahara, takut menanyakan nanti dikira campur tangan urusan kepala sekolah”.

“BOS itu kan urusan dan tanggungjawab kepala sekolah, tugas kami Cuma mengajar”.

“Dalam rapat jarang kepala sekolah menyinggung tentang dana BOS”. (Wawancara tanggal 20 Oktober 2009)

Padahal transparan dalam penggunaan dana BOS sangat penting untuk menepis suara yang kurang menyenangkan dari masyarakat.

6. Apakah jumlah siswa penerima BOS SMPN.2 Sintang dilaporkan sudah tepat.

Besar kecilnya dana BOS yang diterima oleh sekolah sangat tergantung laporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan percaya pada sekolah setelah mengetahui dan membaca data jumlah siswa, meskipun tanpa data yang akurat (foto copy ijazah, kartu pelajar, SKHUN).

Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa data siswa SMPN.2 Sintang yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 852 orang siswa, menurut pernyataan 18 guru wali kelas SMPN.2 Sintang setelah ditotal oleh peneliti berjumlah 720 orang.

(Wawancara 18 guru wali kelas tanggal 20 Oktober 2009)

(Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tanggal 22 Oktober 2009)

7. Apakah prosedur pengelolaan dana BOS SMPN.2 Sintang sudah tepat.

Prosedur pengelolaan dana BOS yang baik ditingkat sekolah adalah penanggungjawab kepala sekolah, anggota bendahara, satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah. (Depdiknas 2009 :20)

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN.2 Sintang bendahara BOS reguler (APBN) dirangkap oleh bendahara BOS rutin (APBD) Sintang dan yang bersangkutan guru PNS walau tak jelas dalam panduan tersebut bendahara harus dari unsur mana. Serta tak memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan buku panduan BOS. Komite hanya berperan menanda tangani pengambilan dan pelaporan keuangan BOS. (Wawancara dengan bendahara dan komite serta staf tata usaha tanggal 20 Oktober 2009)

Tentu saja hal ini tidak menunjukkan prosedur yang baik dalam mengelola dana BOS.

8. Apakah SMPN.2 Sintang sudah tepat menarik dana BOS di Bank.

Demi keamanan dan kelancaran pengambilan atau menarik dana BOS, semua SD/SMP di Kabupaten Sintang menarik dana BOS di Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN.2 Sintang bahwa SMPN.2 Sintang mengambil dana BOS di BPD Cabang Sintang. Dana BOS masuk ke nomor rekening BOS SMPN.2 Sintang, dan yang berwenang menarik dana BOS adalah kepala sekolah. (Wawancara dengan kepala SMPN. 2 Sintang tanggal 21 Oktober 2010)

Hal serupa dinyatakan oleh pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sintang seperti berikut.

“Semua SD/SMP di Kabupaten Sintang menerima dana BOS di BPD Cabang Sintang, melalui nomor rekening masing-masing sekolah”  
(Wawancara tanggal 21 Oktober 2010)

9. Apakah penyaluran dana BOS di SMPN.2 Sintang sudah tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyaluran dana BOS ke guru PNS sebagai wakil kepala sekolah, guru piket, wali kelas, dan kelebihan jam mengajar, di SMPN. 2 Sintang masih berlangsung hingga saat ini, selanjutnya pembayaran honrarium bagi pegawai tidak tetap sering terlambat, maksudnya pembayaran baru dilakukan beberapa hari dana BOS sudah ada di Bank. Tenaga honorer sering mengeluhkan hal keterlambatan ini. (Wawancara dengan bendahara dan beberapa tenaga honor PTT. Tanggal 21 Oktober 2009)  
Dalam buku panduan BOS tahun 2009 halaman 30 berbunyi :

“ Dilarang untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah secara penuh /secara wajar, miaslnya guru kontrak/ guru bantu, membayar honor dan transport rutin untuk guru.

10. Apakah SMPN.2 Sintang sudah tepat dalam mempertanggungjawabkan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di SMPN.2 Sintang ada beberapa pengeluaran tidak didukung dengan data yang akurat tidak valid, ada beberapa dana yang harus di “siasati” dalam pertanggungjawaban diantaranya.

- a. Dana BOS sejumlah Rp. 75.240.000 dari 132 orang.

- b. Dana sumbangan dari orang tua untuk membangun WC (Water Close) sejumlah Rp. 37.440.000,- padahal dana tersebut telah dialokasikan dari anggaran rutin APBD Sintang (double accounting).
- c. Dana BOS melekat di Dinas Pendidikan rata-rata Rp. 400.000 setiap periode pengambilan sebagai dana "Partisipasi.
- d. Ada indikasi untuk menghindari pembayaran pajak dengan memecah-mecahkan redaksi kalimat dalam pembelian barang yang kena pajak. Contoh pembelian barang materai Rp. 3.000 untuk belanja barang Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dan materai Rp. 6.000 untuk belanja diatas Rp.3.000.000

“ Untuk mensiasati pengeluaran yang tak dapat di buktikan secara nyata, kami bekerja sama dengan rekanan, misalnya dengan toko langganan tempat kami belanja ATK, maupun barang lainnya. (Wawancara dengan bendahara tanggal 21 Oktober 2009)

Temuan-temuan pengelolaan dana BOS di SMPN.4 Kelam Permai

1. Berdasarkan pertanyaan apakah BOS di SMPN.4 Kelam Permai sudah tepat sasaran?

Siswa SMPN.4 Kelam Permai yang berjumlah 68 orang ini dalam tahun pelajaran 2008/2009 menerima dana BOS, tak ada siswa yang mampu sekolah di SMPN.4 Kelam Permai (Wawancara dengan kepala sekolah tanggal 28 Oktober 2009).

2. Berdasarkan pertanyaan apakah jumlah siswa penerima dana BOS di SMPN.4 Kelam Permai sudah tepat?

Siswa SMPN.4 Kelam Permai berjumlah 66 orang menempati 3 (tiga) ruang belajar teori.

Kelas VII	=	15	orang
Kelas VIII	=	18	orang
<u>Kelas IX</u>	=	<u>33</u>	<u>orang</u>
Jumlah 3 kelas	=	66	orang

(Wawancara dengan 3 orang guru wali kelas tanggal 28 Oktober 2009)

3. Berdasarkan pertanyaan apakah dana BOS di terima tepat waktu?

Kepala sekolah membutuhkan 4 hari kerja dalam mengurus dana BOS, mulai dari mengecek dana BOS di BPD Cabang Sintang melaporkan surat pertanggungjawaban, pengurusan pajak-pajak serta pengambilan dana BOS.

Waktu 4 hari kerja dalam keadaan normal, tetapi kalau cuaca tidak baik bisa satu minggu. (Wawancara dengan kepala SMPN.4 Kelam Permai tanggal 28 Oktober 2009).

4. Berdasarkan pertanyaan apakah BOS di SMPN.4 Kelam Permai tepat guna?.

Dengan adanya dana BOS, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang menarik sumbangan dari siswa untuk keperluan operasional sekolah. Namun tidak demikian yang dialami oleh SMPN.4 Kelam Permai.

Dana BOS SMPN.4 Kelam Permai memang tidak memadai bilamana dilihat dari beban kurikulum pendidikan yang dilaksanakan oleh SMPN.4 Kelam Permai, untuk mengatasi permasalahan tersebut SMPN.4 Kelam Permai memungut biaya dari orang tua melalui komite sekolah dalam tahun ajaran 2009/2010 sebesar Rp. 150.000,-/siswa untuk membeli kursi meja belajar siswa sebanyak 40 set dengan rincian 40 buah kursi belajar dan 20 set

meja belajar. Selain itu iuran bulanan Rp. 10.000,-/siswa untuk tambahan penghasilan guru tidak tetap, biaya ujian nasional Rp. 150.000,-/siswa. (Wawancara dengan kepala sekolah tanggal 28 Oktober 2009).

Ketua kelas sering memungut dana ke teman-temannya untuk membeli keperluan kelas seperti ember, sapu, penghapus, jam dinding, taplak meja guru (Wawancara 3 orang ketua kelas tanggal 28 Oktober 2009).

Dengan demikian dana BOS tidak tepat guna, karena masih ada iuran dan masih ada sumbangan yang terjadi diantara siswa untuk membeli perlengkapan ruang kelas.

5. Berdasarkan pertanyaan apakah SMPN. 4 kelam Permai transparan dalam menggunakan dana BOS?

Harapan pemerintah bahwa semua SD/SMP dalam mengelola dana BOS harus transparan dan akuntabel, untuk mencegah dan mengurangi penyimpangan, dan tersirat dibalik itu untuk kontrol sosial bagi sekolah pengelola dana BOS.

Dari hasil penelitian kepala SMPN.4 Kelam Permai tidak terbuka dalam mengelola dana BOS bahkan terkesan sangat tertutup. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dirumuskan sendiri, tak pernah membicarakan masalah BOS dengan guru dan komite dalam pertemuan /rapat dewan guru. Guru tak mengetahui beberapa dana BOS dan direncanakan untuk apa saja. Bukti-bukti fisik pengeluaran didalam laptop kepala sekolah.

Transparansi disini adalah kepala sekolah, guru, tata usaha dan komite mengetahui dan membicarakan penerimaan dan pengeluaran BOS dalam rapat sekolah. (Wawancara dengan 3 orang guru tanggal 28 Oktober 2009)

6. Berdasarkan pertanyaan apakah SMPN.4 Kelam Permai dalam melaporkan dana BOS sudah tepat?

Dana BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa disekolah tersebut.

Dari data penelitian bahwa jumlah siswa SMPN.4 Kelam Permai 66 orang dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan 68 orang (Wawancara dengan 3 wali kelas tanggal 28 Oktober 2009) Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan tanggal 30 Oktober 2009.

7. Berdasarkan pertanyaan apakah SMPN.4 Kelam Permai menggunakan prosedur yang tepat dalam mengelola BOS?

Tak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan aturan, serasi, selaras dan proposional. Tetapi ada sebagian orang (oknum) yang melanggar aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian kepala SMPN.4 Kelam Permai telah menyalahi prosedur pengelolaan dana BOS hal ini terlihat bahwa bendahara BOS reguler dan BOS rutin dari APBD Kabupaten Sintang dipegang sendiri. Dalam pengambilan dana BOS di BPD Cabang Sintang tanda tangan dan cap komite dipalsukan. Komite tak mengetahui bahwa cap dan tanda tangan begitu penting dalam mengambil dan mempertanggungjawabkan dana BOS. Tidak ada tim BOS tingkat sekolah. (Wawancara dengan guru dan komite

tanggal 29 Oktober 2009). Konfirmasi ke Dinas Pendidikan tanggal 30 Oktober 2009.

8. Berdasarkan pertanyaan apakah SMPN.4 Kelam Permai memiliki nomor rekening sekolah untuk BOS?

Seluruh SD/SMP di Kabupaten Sintang menerima dana BOS di Bank Pembangunan Daerah Cabang Sintang melalui nomor rekening sekolah masing-masing.

(Wawancara dengan kepala sekolah tanggal 29 Oktober 2009)

Konfirmasi dengan kepala BPD Cabang Sintang tanggal 30 Oktober 2009.

9. Berdasarkan pertanyaan apakah SMPN.4 Kelam Permai tepat waktu penyaluran dana BOS ?

Berdasarkan hasil penelitian kepala SMPN.4 Kelam Permai kurang tepat dalam penyaluran dana BOS kepada guru tidak tetap (honoror) dan pembantu tidak tetap (tenaga honoror). Tenaga honoror dan guru honoror ini sering mengeluh kepada kepala sekolah karena tidak tepat waktu dalam pembayaran honor mereka, walaupun sudah 2 minggu mereka tahu dana BOS keluar.

Selain itu data guru tidak tetap ditentukan Rp. 7.500 /jam salah seorang guru honoror mengajar 10 jam dalam satu minggu juga berlaku untuk satu bulan mestinya guru honoror menerima bersih dalam satu bulan adalah Rp.  $7.500 \times 10 \text{ jam} = \text{Rp. } 75.000/$  bulan kalau 3 bulan Rp.  $75.000 \times 3 \times 10 \text{ jam} = \text{Rp. } 225.000$ . ketika ditanyakan pada guru honoror yang bersangkutan, honor yang di terima sebesar Rp. 180.000/ tiga bulan. Demikian pula tenaga honoror dalam satu bulan dalam ketentuan sekolah tersebut Rp. 300.000/bulan,

mestinya diterima dalam masa tiga bulan adalah Rp. 300.000 x 1 x 3 bulan = Rp. 900.000. Kenyataannya diterima tenaga honorer tersebut adalah Rp. 200.000 x 3 bulan = Rp. 600.000.

Penyaluran dana kurang tepat. (Wawancara dengan kepala sekolah, guru honorer dan tenaga honorer tanggal 29 Oktober 2009)

10. Berdasarkan pertanyaan apakah pertanggungjawaban dana BOS SMPN.4 Kelam Permai sudah tepat?

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN.4 Kelam Permai ditemukan beberapa dana BOS yang sulit atau dipaksa harus disiasati dengan bijaksana oleh kepala sekolah diantaranya adalah

- a. Pembelian alat peraga olahraga dan pembelajaran sejumlah Rp. 3.500.000.  
Hasil pengamatan di SMPN.4 Kelam Permai menunjukkan bahwa bola volly satu buah, bola kaki satu buah, satu pasang net volly, tidak ada alat peraga. (Observasi dan wawancara dengan guru olahraga tanggal 29 Oktober 2009 jam 14.00 WIB)
- b. Rehabilitasi ringan pintu dan jendela sekolah yang rusak Rp. 2.500.000  
Hasil observasi tidak terdapat tanda-tanda rehab ringan sekolah (Observasi tanggal 29 Oktober 2010 jam 14.30 WIB)
- c. Buku referensi Rp. 4.700.000
- d. Memecah-mecah harga barang yang dibeli dengan materai Rp. 3000 untuk belanja barang Rp. 1000.000 – Rp. 3.000.000 agar terhindar dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pendapatan (PPn).

e. Dana partisipasi BOS ke dinas pendidikan Rp. 200.000 setiap kali pengambilan.

f. Biaya KBM ( remedial, pengayaan dan ekstra) Rp. 1.500.000

(Wawancara dengan guru dan staf tanggal 29 Oktober 2010 jam 09.00 – 16.00 WIB)

Temuan-temuan tentang kualitas kinerja kepala SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelayan Permai dalam mengelola BOS.

Dalam angket yang dibagikan kepada 35 responden di SMPN. 2 Sintang dan 11 responden di SMPN.4 Kelayan Permai, peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar ketepatan keberhasilan program BOS. Selain itu peneliti juga mengajukan pertanyaan yang erat kaitannya dengan program BOS, seperti tepat guna, transparansi, prosedur, akuntabilitas. Keempat pertanyaan tersebut sangat dekat dengan kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelayan Permai dalam mengelola BOS.

Berdasarkan hasil angket yang didapat responden, berikut dituliskan penafsirannya.

Kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dalam mengelola BOS.

1. Penggunaan dana (tepat guna) 45,71% jadi 54,29% dana kurang tepat guna, digunakan kemana dan untuk apa.
2. Transparansi 54,28%, kepala sekolah kurang mensosialisasikan dana BOS kepada stakeholder sekolah.
3. Prosedur 38,85%, bendahar BOS reguler dirangkap BOS rutin, tidak memahami tim BOS tingkat sekolah.

4. Akuntabilitas 61,14%, beberapa dana BOS disiasati oleh kepala sekolah dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) terjadi pertanggungjawaban ganda (double accounting).

Indeks kualitas kinerja kepala SMPN.4 Kelam Permai

1. Tepat guna dana BOS 49,09%, lebih 50% dana tidak tepat sasaran, tidak tepat guna.
2. Transparansi 36,36%, kepala sekolah kurang terbuka dalam mengelola dana BOS, terkesan tertutup, miss komunikasi tentang BOS kepada guru, staf dan komite.
3. Prosedur 54,54%, kepala sekolah merangkap bendahara BOS reguler dan BOS rutin, serta memalsukan tanda tangan dan cap komite.
4. Akuntabilitas 50,90%, pengeluaran dana yang disiasati untuk dipertanggungjawabkan 49,10%, karena tidak ada bukti fisik dan minimnya pengawasan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## KEADAAN DATA SISWA

Tabel 4.4 : Data Siswa SMPN.2 Sintang Untuk 3 Tahun Terakhir

Tahun Ajaran	Jlh Pendaftar Calon Siswa Baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jlh (Kelas VII + VIII + IX)	
		Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr
Th. 2007/2008	491 Org	252 Org	6 rbl	237 Org	6 rbl	255 Org	6 rbl	714 Org	18 rbl
Th. 2008/2009	521 Org	252 Org	6 rbl	251 Org	6 rbl	249 Org	6 rbl	752 Org	18 rbl
Th. 2009/2010	391 Org	360 Org	9 rbl	244 Org	6 rbl	248 Org	6 rbl	852 Org	21 rbl

Sumber/Source Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 2009

Penerimaan : 852 siswa x Rp. 570.000 = 485.640.000

Tabel 4.5 : Pemanfaatan Dana BOS SMP Negeri 2 Sintang Tahun 2009

No	Uraian	Jlh. Dana	Persentase
1	Penerimaan Siswa Baru	Rp. 12.966.588	2,67%
2	Buku Refrensi	Rp. 6.993.216	1,44%
3	Buku Paket Siswa	Rp. 25.010.460	5,15%
4	Remedial	Rp. 24.282.000	5%
5	Panitia Ulangan Umum	Rp. 54.100.296	11,14%
6	ATK	Rp. 144.332.208	29,72%
7	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 971.280	0,2%
8	Rehab Ringan	Rp. 11.752.488	2,42%
9	Honor GTT/PTT	Rp. 85.812.588	17,67%
10	MGMP	Rp. 36.957.204	7,61%
11	Siswa Miskin	Rp. 6.021.936	1,24%
12	Pengelolaan BOS	Rp. 1.214.100	0,25%
13	Komputer	Rp. 10.198.440	2,1%
14	Alat Peraga	Rp. 49.049.640	10,10%
15	Pajak Materai	Rp. 15.977.556	3,29%
	<b>Total</b>	<b>Rp. 485.640.000</b>	<b>100%</b>

Sumber/Source SMPN.2 Sintang01 / 12 / 2009

Penerimaan : 66 siswa x Rp. 570.000 = Rp. 37.620.000

Tabel 4.6 : Pemanfaatan Dana BOS SMP Negeri 4 Kelam Permai Tahun 2009

No	Uraian	Jlh. Dana	Persentase
1	PSB	Rp. 730.000	1,940%
2	Buku Refrensi	Rp. 470.000	1,249%
3	Buku teks pelajaran	Rp. 0000000	0 %
4	KBM	Rp. 1.500.000	3,987%
5	Biaya Ulangan/ Ujian	Rp. 1.825.000	4,85%
6	Bahan habis pakai	Rp. 4.970.000	13,21%
7	Langganan daya dan jasa	Rp. 0000000	0 %
8	Perawatan ringan sekolah	Rp. 2.500.000	6,64%
9	Pembayaran Honorarium	Rp. 18.000.000	47,84%
10	Pengembangan Profesi Guru	Rp. 0000000	0 %
11	Bantuan biaya transportasi siswa miskin	Rp. 0000000	0 %
12	Biaya pengelolaan BOS	Rp. 2.500.000	6,64%
13	Pembelian Komputer	Rp. 0000000	0 %
14	Pembelajaran alat peraga pembelajaran	Rp. 0000000	0 %
15	Pembelian Komputer	Rp. 0000000	0 %
16	Pembelajaran alat peraga pembelajaran	Rp. 3.500.000	9,30%
17	Pajak-pajak dan materai	Rp. 1.625.000	4,31%
<b>Total</b>		<b>Rp. 37.620.000</b>	<b>100%</b>

Sumber/Source SMPN.4 Kelam Permai 30/11/2009

Tabel 4.7 : Data Siswa 3 Tahun Terakhir SMPN.4 Kelam Permai

No	Masuk		Keluar		Keadaan Akhir Tahun		
	Tahun	Jlh Siswa	Tahun	Jumlah	2007	2008	2009
1	2007	45	2007	12	33	-	-
2	2008	59	2008	14	-	76	-
3	2009	26	2009	8	-	-	66
<b>Jumlah</b>		<b>136</b>		<b>34</b>			<b>66</b>

Sumber/Source SMPN.4 Kelam Permai 30/11/2009

Alasan Keluar :

1. Faktor ekonomi = 15 orang
  2. Faktor transportasi = 10 orang
  3. Faktor geografi = 6 orang
  4. Faktor budaya = 5 orang
- Total keluar 3 tahun terakhir = 34 orang

Faktor sebab akibat keluar

1. Faktor ekonomi : Rata-rata orang tua siswa sebagai petani karet, sangat tergantung dengan cuaca, ladang berpindah, kerja keluar daerah dengan penghasilan yang tidak tetap.
2. Faktor Transportasi : Alat transportasi dan kondisi alam karena harus menyeberangi sungai Lebang  $\pm$  120 meter pakai perahu sampan. Kalau air sungai meluap akibat banjir dapat menimbulkan ketakutan bagi siswa yang hendak ke sekolah.
3. Faktor Geografi : Jarak antara rumah orang tua siswa cukup jauh  $\pm$  5 Km harus ditempuh dengan jalan kaki.

4. Faktor Budaya : Membantu orang tua mencari nafkah dan bekerja, perempuan yang dewasa menikah dianggap cukup umur, judi sabung ayam, pesta-pesta.

Tabel 4.8 : DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat	Kelas				Murid				Jml Dana
				I	II	III	Jml	I	II	III	Jml	
1	SMPN. 1 Sintang	Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMPN. 2 Sintang	Sintang	Jl. MT. Haryono	6	6	6	18	360	244	248	852	485.640.000
3	SMPN. 3 Sintang	Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SMPN. 4 Sintang	Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SMPN. 1 Kelam Permai	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SMPN. 2 Kelam Permai	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SMPN. 3 Kelam Permai	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SMPN. 4 Kelam Permai	Kelam Permai	Desa Nanga Lebang	1	1	1	3	33	15	20	68	38.760.000

Sumber/Source Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 2009

### C. KONDISI DAERAH DAN SEKOLAH TELITIAN

#### 1. Selayang Pandang Kabupaten Sintang

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010, yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis”

Visi tersebut mengandung pengertian :

1. Masyarakat kabupaten Sintang yang produktif, adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang

ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, dan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan.

2. Masyarakat Kabupaten Sintang yang berkualitas, adalah masyarakat yang derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya semakin membaik, berakhlak mulia dan memiliki ketahanan budaya.
3. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera, adalah masyarakat yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi, serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
4. Masyarakat Kabupaten Sintang yang demokratis, adalah masyarakat yang kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. (BAPPEDA 2007)

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010, yaitu :

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran;
  2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif;
  3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur;
  4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
  5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan;
  6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah;
  7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik;
  8. Menegakkan supremasi hukum dan HAM.
2. Kondisi Jalan Dan Lama Tempuh Dari Desa Ke Kecamatan Dan Kabupaten Sintang Sekolah Telitian
1. Kondisi jalan dan lama tempuh SMPN. 2 Sintang dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Sintang  
 Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono Sintang  
 Kondisi jalan : Jalan Provinsi  
 Karakter jalan : Aspal  
 Jarak dari sekolah ke Kabupaten : 2 Km  
 Lama tempuh : 20 menit  
 Kendaraan : Roda dua dan empat  
 Ongkos perjalanan : Satu liter bahan bakar minyak
  2. Kondisi jalan dan lama tempuh SMPN. 4 Kelam Permai

Alamat sekolah	: Jl. Sintang – Putusibau Desa Nanga Lebang Kec. Kelam Permai
Alternatif jalan	: a. Sungai Ketungau (lebar 120 m) b. Jalan tanah dari dan ke Kecamatan 27 Km
Kondisi jalan	: Jalan Kabupaten
Karakter jalan	: Jalan tanah
Situasi jalan	: Becek kalau hujan, licin, berlumpur
Jarak dari Kecamatan	: 27 Km
Jarak dari Kabupaten	: 67 Km
Lama tempuh	: a. Sungai : 45 menit b. Darat : 150 menit
Kendaraan	: a. Speed boad b. Perahu c. Sepeda Motor
Ongkos perjalanan	: a. Speed boad = Rp 100.000/ orang b. Perahu = Rp 10.000/ orang c. Ojek = Rp 150.000/ orang d. Sepeda Motor 5 liter bahan bakar minyak

Sebagai gambaran secara umum dari 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang ada beberapa Kota Kecamatan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat dengan kondisi jalan rusak beraspal ke Kota Kabupaten antara lain.

1. Kecamatan Kayan Hulu
2. Kecamatan Kayan Hilir
3. Kecamatan Sepauk
4. Kecamatan Tempunak
5. Kecamatan Dedai
6. Kecamatan Kelam Permai
7. Kecamatan Binjai
8. Kecamatan Sintang

( Kimpraswil Kab. Sintang 2009)

#### EMPAT AGENDA POKOK KABUPATEN SINTANG 2006 - 2010

1. Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Produktif.
2. Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas.
3. Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera.
4. Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Demokratis.

### 3. LETAK GEOGRAFIS

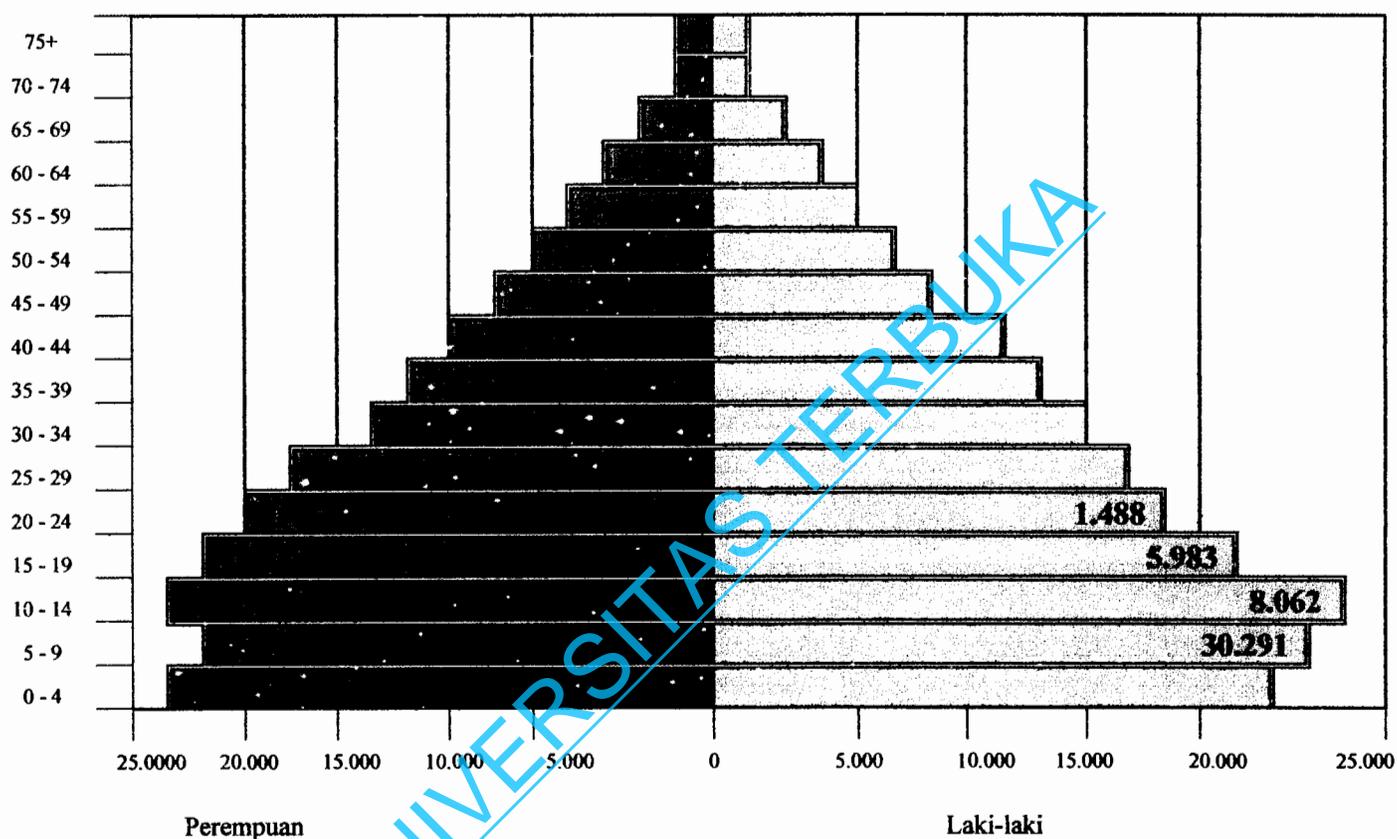
- 110°50' & 113°20' BT
- 1°5' LU & 0°40'LS
- Sebelah Utara : Malaysia Timur / Serawak
- Sebelah Selatan : Prop. Kalteng & Kab. Melawi

- Sebelah Barat : Kab. Sanggau, Sekadau dan Ketapang
- Sebelah Timur : Kab Kapuas Hulu

#### 4. DEMOGRAFI

- ❖ Jumlah Penduduk Tahun 2009 : 367.234 Jiwa
- ❖ Komposisi : 190.180 Laki-laki & 171.054 Jiwa
- ❖ Laju Pertumbuhan Penduduk : 2,01 %
- ❖ Rasio Jenis Kelamin sebesar : 10.05 Laki-laki
- ❖ Kepadatan Penduduk : 16,53 Jiwa/km<sup>2</sup>
- ❖ Luas Wilayah : 21.635 Km<sup>2</sup>

**Gambar 4.1 : Piramida Usia Sekolah Kabupaten Sintang 2009**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS Kab. Sintang 2009)

**Keterangan :**

0 – 4	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5 – 9	: TK dan SD
10 – 14	: SMP
15 – 19	: SMA
20 – 24	: Mahasiswa

**D. PENDAPATAN REGIONAL****1. Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Memasuki tahun 2008, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 3,103 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 13,10 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat menjadi Rp. 1,880 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,16 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna meyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

**2. Struktur Perekonomian**

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat dan disertai dengan harga yang meningkat tajam akan menggeser peranan sektor yang menunjukkan pertumbuhan dan harga yang meningkat lambat dalam perekonomian.

Pada tahun 2008, struktur perekonomian Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan, dimana kontribusi/peranan sektor pertanian masih menjadi dominan sebagai pimpinan (*leading sector*) sektor-sektor yang lainnya.

Sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 41,31 persen terhadap keseluruhan perekonomian Kabupaten Sintang yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,76 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 9,46 persen.

### 3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2009 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 8.502.524 yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp. 8.502.524 atau sebesar Rp. 708.544 per bulan.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp. 845.760 atau 10,76 persen.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus di tingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

### 4. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan

Komponen PDRB menurut penggunaan meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, serta ekspor dan impor.

Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan yang tertinggi adalah konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 13,07 persen, kemudian konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 7,19 persen, disusul oleh PMTB dengan 4,01 persen. Konsumsi rumah tangga hanya mencapai 3,92 persen, sedangkan ekspor neto telah tumbuh sebesar 3,77 persen.

Pada tahun 2008, komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 59,86 persen, disusul PMTB sebesar 22,41 persen, konsumsi pemerintah sebesar 9,34 persen, *ekspor netto* sebesar 6,16 persen dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 0,52 persen. (BPS Kabupaten Sintang 2009)

Tabel 4.9 : Penyebaran Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	PRA KS	KS				Jumlah
			I	II	III	III-Plus	
1	Serawai	1.698	1.614	1.391	810	78	5.591
2	Ambalau	405	809	2.098	231	74	3.617
3	Kayan Hulu	1.675	1.937	1.393	337	97	5.439
4	Sepauk	1.844	4.282	2.415	2.571	166	11.278
5	Tempunak	752	1.90	2.092	1.210	525	6.481

6	Sei. Tebelian	697	2.334	3.153	1.151	3.18	7.653
7	Sintang	77	2.230	2.559	1.974	895	7.735
8	Dedai	1.092	2.002	2.857	751	117	6.819
9	Kayan Hilir	871	3.899	1.242	50	-	6.062
10	Kelam Permai	366	1.565	963	940	271	4.105
11	Binjai Hulu	683	880	992	509	68	3.132
12	Ketungau Hilir	1.345	1.922	869	388	70	4.594
13	Ketungau Tengah	922	2.164	1.737	1.196	353	3.372
14	Ketungau Hilir	567	1.192	934	311	53	3.057
Tahun 2009		12.994	28.732	24.695	12.429	3.085	81.935
Tahun 2008		11697	27.758	23.576	10.013	2.702	75.746
Tahun 2007		5.015	13.436	11.187	3.664	1.343	34.645

Sumber/source : BPS Kabupaten Sintang 2009

Keterangan :

PRA KS : Pra Keluarga Sejahtera (sangat miskin)

KS I : Keluarga Sejahtera I ( miskin )

KS II : Keluarga Sejahtera II ( sejahtera )

KS III : Keluarga Sejahtera III ( Kaya )

KS IV Plus : Keluarga Sejahtera IV Plus ( sangat kaya )

Tabel 4.10 : Jumlah Sekolah, Rombel, Siswa, Guru, APK dan APM

Thn	Jml. Sekolah			Rombel			Jml. Siswa			Jml. Guru			APK			APM		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2009	339	82	39	502	521	368	57.041	15.689	10.016	3.225	1.055	706	118.39	90.17	37.77	93.91	90.17	25.03
2008	389	82	39	502	521	368	47.041	14.124	9.198	2.795	919	478	118.39	88.18	36.17	93.64	59.68	23.97
2007	389	82	39	502	521	368	55.054	13.426	7.363	3.120	938	462	90.81	59.68	33.36	90.81	54.53	21.10

Sumber/ Source : Depdiknas dan Depag Kabupaten Sintang

Keterangan :

- APK = Angka Paarticipasi Kasar

- APM = Angka Partisipasi Minimum

## 5. ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Tabel 4.11 : Anggaran dan Pendapatan

NO.	TAHUN	SUMBER DANA			KET.
		DAU	DAK	TP	
1.	2005				
2.	2006	547.904.711.090,00	35.160.095.484		
3.	2007	658.369.060.854,58	46.429.000.000		
4.	2008	769.986.869.416,45	55.483.000.000		

Sumber/source BPKAAD Kabupaten Sintang 2009

## 6. PENDAPATAN ASLI DAERAH

- Tahun 2006 : Rp.18.611.760.598,-
- Tahun 2007 : Rp. 20.203.387.127,-
- Tahun 2008 : Rp. 23.216.597.027,-
- Tahun 2009 : Rp. 25.356.670.068,-

## 7. BUTA AKSARA

- Tahun 2005 : 18.783 Orang
  - Tahun 2005 : 16.043 Orang
  - Tahun 2006 : 12.693 Orang
  - Tahun 2007 : 8.243 Orang
  - Tahun 2008 : 2.243 Orang
  - Tahun 2009 : 81 Orang
- (BAPPEDA Kabupaten Sintang 2009)

## E. SEKOLAH TELITIAN SMP NEGERI 2 SINTANG

SMPN 2 sintang adalah salah satu SMP yang berada di kota kabupaten Sintang yang berjumlah 20 ( dua puluh) SMP. SMPN 2 Sintang didirikan pada tahun 1979, beralamat di Jalan MT. Haryono Sintang, tempat yang strategis, mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai, dengan jumlah ruang kelas 18 dan didukung oleh tenaga guru yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan lebih dari tiga puluh guru pada tahun 2009 dan staf tata usaha 8 orang serta pegawai

tidak tetap 6 orang. Keadaan siswa menurut catatan tahun 2009 sebanyak 852 orang dengan Bapak Timotius Yor, S.Pd.Ing sebagai kepala sekolahnya.

Strategis karena berada ditengah-tengah kota Sintang, sehingga memungkinkan semua orang dengan mudah untuk memanfaatkan jasa pendidikan di SMPN 2 Sintang.

Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SMPN. 2 Sintang

1. PNS	= 86	orang
2. TNI	= 25	orang
3. POLRI	= 40	orang
4. Wiraswasta	= 75	orang
5. Petani	= 316	orang
6. Dagang	= 215	orang
7. Lain-lain	= 95	orang
Jumlah	= 852	orang

#### F. SEKOLAH TELITIAN SMP NEGERI 4 KELAM PERMAI

Jarak SMPN. 4 Kelam Permai dengan Kota Kabupaten Sintang 67 km dapat ditempuh melalui jalan darat dan lewat sungai. Kondisi jalan darat tanah merah dan licin serta melalui sungai memakai speed boat. Perjalanan menuju SMPN. 4 Kelam Permai dari Sintang  $\pm$  150 menit dan harus menyeberang sungai 120 meter dengan biaya Rp. 10.000 /orang /satu kegiatan. SMP ini berdiri tahun 2005 di tengah permukiman penduduk sebanyak 50 kk. Bapak Robianto,S.AP sebagai Kepala Sekolah.

Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SMPN. 4 Kelam Permai

1. PNS	= 2	orang
2. TNI	= -	orang
3. POLRI	= -	orang
4. Wiraswasta	= -	orang
5. Petani	= 60	orang

6. Dagang	= 2	orang
7. Lain-lain	= 2	orang
Jumlah	= 66	orang

#### G. SEKILAS TENTANG SMP DI KECAMATAN KELAM PERMAI

Selain SMPN. 4 Kelam Permai sebagai objek penelitian perlu juga diketahui

bahwa di Kecamatan Kelam Permai ada 5 SMP Negeri sebagai berikut :

##### 1. SMPN.1 Kelam Permai

Alamat : Jl. Sintang – Putusibau, Desa Baning Panjang Kec. Kelam Permai

Kepala sekolah	: ABUN,S.Th	
Jarak sekolah dari Kecamatan	: 29	Km
Jarak sekolah dari Kabupaten	: 59	Km
Jumlah siswa	= 141	orang
Rombongan belajar	= 6	kelas
Jumlah Guru	= 14	orang
Rasio Guru	= 1 : 10.07	orang
Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa		
1. PNS	= 13	orang
2. TNI	= -	orang
3. POLRI	= -	orang
4. Wiraswasta	= -	orang
5. Petani	= 121	orang
6. Dagang	= 4	orang
7. Lain-lain	= 3	orang
Jumlah	= 141	orang

##### 2. SMPN.2 Kelam Permai

Alamat : Jl. Sintang – Putusibau, Desa Kebong Kec. Kelam Permai

Kepala Sekolah	: LANTON,S.Pd.M.Si	
Jarak sekolah ke Kecamatan	: 2	Km
Jarak sekolah ke Kabupaten	: 28	Km
Jumlah siswa	= 381	orang
Rombongan belajar	= 10	kelas
Jumlah Guru	= 20	orang
Rasio Guru	= 1 : 19.05	orang
Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa		
1. PNS	= 30	orang
2. TNI	= 5	orang
3. POLRI	= 15	orang
4. Wiraswasta	= 7	orang

5. Petani	= 294	orang
6. Dagang	= 25	orang
7. Lain-lain	= 5	orang
Jumlah	= 381	orang

### 3. SMPN.3 Kelam Permai

Alamat : Jl. Sintang – Putusibau, Desa Pelimping Kec. Kelam Permai

Kepala Sekolah : KRISTIANUS KITEN, S.Sos

Jarak ke Kecamatan : 36 Km

Jarak ke Kabupaten : 71 Km

Kondisi jalan provinsi aspal

Jumlah siswa = 115 orang

Rombongan belajar = 3 kelas

Jumlah Guru = 14 orang

Rasio Guru = 1 : 8.21 orang

Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa

1. PNS = 2 orang

2. TNI = - orang

3. POLRI = - orang

4. Wiraswasta = 1 orang

5. Petani = 106 orang

6. Dagang = 4 orang

7. Lain-lain = 2 orang

Jumlah = 115 orang

### 4. SMPN. 5 Kelam Permai

Alamat : Jl. Sintang – Putusibau, Desa Bengkuang Kec. Kelam Permai

Kepala Sekolah : FADOLI, S.Pd.Mat

Jarak ke Kecamatan : 42 Km

Jarak ke Kabupaten : 78 Km

Kondisi jalan provinsi aspal

Jumlah siswa = 35 orang

Rombongan belajar = 2 kelas

Jumlah Guru = 5 orang

Rasio Guru = 1 : 7 orang

Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa

1. PNS = - orang

2. TNI = - orang

3. POLRI = - orang

4. Wiraswasta = - orang

5. Petani = 33 orang

6. Dagang = 2 orang

7. Lain-lain = - orang

Jumlah = 35 orang

## H. SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Tabel 4.12 : Keadaan Sarana dan Prasarana SMPN. 2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai

SMPN 2 SINTANG		SMPN 4 KELAM PERMAI	
SARANA	JUMLAH	SARANA	JUMLAH
Ruang kelas	18 ruang	Ruang kelas	3 ruang
Perpustakaan	1 ruang	Perpustakaan	-
Laboratorium	2 ruang	Laboratorium	-
UKS	1 ruang	UKS	-
OSIS	1 ruang	OSIS	-
Ruang Guru	1 ruang	Ruang Guru	1 ruang
Ruang Tata Usaha	3 ruang	Ruang Tata Usaha	1 ruang
Ruang pertemuan	1 ruang	Ruang pertemuan	-
Ruang komputer	2 ruang	Ruang komputer	-
BP / BK	1 ruang	BP / BK	-
Ruang kepala sekolah	1 ruang	Ruang kepala sekolah	1 ruang
WC guru	6 kamar	WC guru	1 ruang
WC siswa putra	30 kamar	WC siswa putra	-
WC siswa putri	20 kamar	WC siswa putri	-
Mushola	1 ruang	Mushola	-
Guru	45 orang	Guru	9 orang
Siswa	852 orang	Siswa	66 orang
Dana	Rp.485.640.000	Dana	Rp. 37.620.000
SMPN 2 SINTANG		SMPN 4 KELAM PERMAI	
PRASARANA	JUMLAH	PRASARANA	JUMLAH
Lapangan Bola kaki	1	Lapangan Bola kaki	1
Lapangan volly	2	Lapangan volly	1
Lapangan Batminton	2	Lapangan Batminton	-
Lapangan basket	2	Lapangan basket	-

Lapangan bela diri	2	Lapangan bela diri	-
Papan catur	25	Papan catur	-
Letak sekolah	Dalam kota Sintang	Letak sekolah	Desa terpencil

Tabel 4.13 : Keadaan Sarana dan Prasarana SMPN. 2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai

SMPN. 2 Sintang	SMPN. 4 Kelam Permai
<b>Aktivitas Ekstra</b>	<b>Aktivitas Ekstra</b>
1. Pramuka = 35 regu 2. Olahraga = 10 cab 3. Kesenian = 3 cab	- - -
<b>Prestasi di Kabupaten</b>	<b>- Prestasi</b>
- Juara Lomba Mata Pelajaran tahun 2007 = 3 - Juara Lomba Mata Pelajaran tahun 2008 = 2 - Juara Lomba Mata Pelajaran tahun 2009 = 2	- Tidak ikut - Tidak ikut - Rangking 38 dari 43 Peserta
<b>Keadaan Guru</b>	<b>Keadaan Guru</b>
Guru bidang studi cukup bahkan ada satu bidang studi gurunya 4 orang 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. PPKn 4. Matematika 5. Penjaskes 6. IPS	Guru yang kurang 1. Matematika (PNS) 2. PPKn (PNS) 3. Penjaskes (Kepala Sekolah) 4. B. Inggris 5. B. Indonesia 6. IPA 7. IPS 8. Agama Diajar oleh Guru yang bukan latar belakang pendidikannya. 9. Mulok

	10. KTK 11. TIK Tidak diajarkan disemua kelas
Kinerja Sekolah	Kinerja Sekolah
- Ada Visi, Misi Sekolah	Tidak ada
- Ada RAKS dan RPS	Tidak ada
- Ada Profil Sekolah	Tidak ada
- Ada Internet	Tidak ada
- Ada 50 unit Komputer	Tidak ada
- Akan menjadi SSN (Sekolah Standar Nasional) 2010	Tidak ada
- Ada Pengurus OSIS	Tidak ada

Tabel 4.14  
DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

No	Status Sekolah	Jumlah
1	Negeri	61
2	Negeri Satu Atap	5
3	Swasta	16
	Jumlah	82

*Sumber/Source Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 2009*

### 3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian sebagai suatu cara mencari kebenaran ilmiah tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sendiri maupun keterbatasan diluar peneliti pada saat melakukan penelitian. Demikian halnya penelitian mengenai "Evaluasi Kebijakan Program BOS di SMP Kabupaten Sintang Studi kasus di

SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelayan Permai” ini akan banyak ditemui berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Meskipun demikian peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin mengerahkan segala fikiran, tenaga, dan dana serta kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan yang peneliti temui baik dalam proses penyusunan proposal, pengumpulan data dilapangan dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

Pertama : Keterbatasan fokus kejadian penelitian dari berbagai faktor mengenai evaluasi kebijakan program BOS di SMP Kabupaten Sintang, maka hanya dua SMP yang dapat dicakup dalam penelitian ini yaitu Studi kasus di SMPN.2 Sintang dan studi kasus di SMPN. 4 Kelayan Permai.

Meskipun demikian pada kenyataannya peneliti mengalami sedikit kesulitan untuk menentukan literatur mengenai evaluasi kebijakan program BOS di SMP Kabupaten Sintang dalam perspektif administrasi publik Sehingga peneliti mengadopsi dari literatur administrasi bisnis.

Dengan keterbatasan secara fokus penelitian ini maka peneliti merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan program BOS melalui aspek Implementasi kebijakan program BOS dan Implementasi BOS di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelayan Permai.

Kedua : Lokasi penelitian, yaitu SMPN. 2 Sintang berada di Jl. MT. Haryono Kota Kabupaten Sintang dengan jarak 57 Km dari tempat tinggal peneliti di Desa Baning Panjang Kecamatan Kelam Permai serta SMPN. 4 Kelam Permai di Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai dengan jarak 25 Km dari tempat peneliti dengan kondisi jalan cukup parah, berlumpur dan menyeberangi sungai Lebang  $\pm 120$  m, cukup menyita waktu, tenaga dan biaya mengingat status peneliti sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Guru dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Meskipun demikian peneliti dapat mengatasi kendala jarak tersebut sebaik mungkin.

Ketiga : Data terbaru yang terkait dengan lokasi penelitian merupakan data tahun 2009, sedangkan data tahun sebelumnya tidak dapat diakses karena beberapa data primer sudah dimusnahkan dan tidak diarsipkan dengan baik oleh SMPN.2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai, sehingga penelitian ini menggunakan data tahun 2009. Untuk itu peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan dengan menggunakan data yang baru.

Keempat : Dengan status mahasiswa izin belajar UT maka kebesaran waktu untuk melakukan penelitian sangat terbatas mengingat peneliti harus bekerja sebagai Guru dan Kepala Sekolah. Sehingga proses penelitian dan penyusunan laporan disela-sela waktu tidak bekerja. Disamping itu,

keterbatasan dana penelitian yang dimiliki oleh peneliti berpengaruh pula pada hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan keterbatasan yang dimiliki, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat berguna secara pribadi bagi penulis, SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelayan Permai, Pemerintah Kabupaten Sintang serta Universitas Terbuka sebagai almamater tercinta penulis.

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari data yang didapatkan mengenai hasil implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai Kabupaten Sintang dan melakukan analisis terhadap data tersebut, bahwa implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai Kabupaten Sintang melalui sepuluh aspek ketepatan dan kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sintang.

#### A. Kesimpulan

- i. Implementasi kebijakan program BOS di SMP Negeri 2 Sintang dan SMP Negeri 4 Kelam Permai Kabupaten Sintang berdasarkan sepuluh aspek ketepatan dan kualitas kinerja kepala SMP Negeri 2 Sintang dan SMP Negeri 4 Kelam Permai belum berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Kurang memahami program BOS dengan baik sehingga laporan jumlah siswa, prosedur pengelolaan, transparansi penerimaan dan pengeluaran serta akuntabilitas dana adalah cikal bakal terjadinya penyimpangan dana BOS di kedua SMPN tersebut.

- b. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam mengelola dana BOS ditingkat sekolah

Pengawasan internal adalah guru, staf tata usaha, komite dan tim BOS tingkat kabupaten dan inspektorat kabupaten.

Pengawasan eksternal adalah orang tua siswa, lembaga sosial masyarakat (LSM), dewan perwakilan rakyat, media massa, tokoh spiritual keagamaan.

Dana BOS kurang efektif dan efisien digunakan untuk kepentingan sekolah. Dana BOS tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan beberapa dana harus disiasati dalam pertanggungjawabannya.

- c. Minimnya sosialisasi dan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang kepada masyarakat tentang program BOS sehingga masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan BOS, apalagi kepala sekolah tidak pernah membahas program BOS pada saat rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

- d. Ada indikasi penyimpangan dana BOS yang dilakukan oleh kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai, melalui laporan jumlah siswa. Prosedur pengelolaan tingkat sekolah, dan pertanggungjawaban keuangan dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana BOS.

2. Implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai Kabupaten Sintang berpengaruh terhadap manajemen sekolah terhadap pengelolaan dana BOS tersebut manajemen sekolah dalam hal ini kepala sekolah sebagai penanggungjawab dalam mengelola BOS belura

berjalan dengan baik dan optimal. Kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai masih sangat lemah. Kelemahan-kelemahan dalam pelaporan jumlah siswa, kesalahan prosedur, tidak transparansi dan tidak akuntabel

Menurut hemat penulis menandakan penyimpangan dan kebocoran dana program BOS seharusnya di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai apabila manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS disertai dengan kualitas kinerja yang baik dan profesional niscaya program bantuan operasional sekolah berjalan dengan baik dan membawa pengaruh positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Kabupaten Sintang.

#### B. Saran-saran

1. Agar implementasi kebijakan program BOS di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai Kabupaten Sintang berjalan dengan baik diharapkan tim BOS tingkat kabupaten turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat dari dekat pengelolaan dana BOS.
2. Dinas pendidikan bersama dengan inspektorat kabupaten secara berkala mensosialisasikan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan guru serta komite sekolah.
3. Tim BOS tingkat kabupaten menyelenggarakan pengawasan internal dan eksternal.
4. Dinas pendidikan perlu mengadakan bimbingan dan teknik pengelolaan dana BOS di kecamatan maupun di kabupaten.

5. Tim BOS tingkat kabupaten yang minimal 6 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dalam rapat Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) yang ada di pedesaan cukup di kecamatan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
6. Perdayakan peran komite sekolah dalam mengelola dana BOS, sebab komite setelah adanya BOS kurang berperan aktif.

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mustopadijaja, AR. (2000). *Manajemen Proses Kebijakan*. t.k Lembaga Administrasi Negara.
- Jalil Aria. (2009). *Meningkatkan Kinerja Ujian Nasional saran bagi Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang tua siswa dan komite sekolah*. Jakarta: Lembaga Peningkatan Kinerja Pendidikan.
- Bintoro Tjokroadmidjojo.(2001).*Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara Ke-2 Jakarta.
- Birokrasi *Metodologi Penelitian Sosial,Usaha Nasional Surabaya* ([www.borneotribune.com](http://www.borneotribune.com)).
- Wasis, D. Dwiyono. (2007).*Penelitian Tindakan Untuk Memperbaiki Sekolah*. Prasojo Eko dkk. Buku tak Wajib UT. Jakarta.
- Fatah, Nanang. (1996). *Landasan Menejemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Gulbrainth, Kenneth Jhon. (1983). *Hakekat Kemiskinan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Islamy. 1. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jakti, Kuntoro Dorajatun. Edisi. (1994). *Kemiskinan di Indonesia*.
- Kapuas Post.(1-4-2009). *Pidato Bupati Sintang Sosialisasi Dana DAK dan BOS SD/SMP Se Kabupaten Simang*.
- Subroto Mangku, Guritno. (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Kimartini, dkk.(2008). Modul Materi Pokok. *Analisis Kebijakan Publik*. Karunika UT Jakarta
- Prasetya Irawan. (2007). Modul Materi Pokok. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Karunika UT Jakarta

- Iksan,M & Agus. (2007). Modul Materi Pokok. *Administrasi Keuangan Publik*. Karunika UT Jakarta
- Nirman,U. (1995). *Manejemen Sumber Daya Manusia ( MSDM)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Notoadmojo, Soekijo. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Edisi Revisi Cetakan Kedua Jakarta: Penerbit PT.Rineka Cipta
- Sagala, H. Syaiful. (2003). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Alfabeta : Bandung.
- Suparmoko. (1991). *Keuangan Negara dalam teori dan praktek*. Edisi Empat. Yogyakarta : BPFE
- Suparmoko (1995) *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial*.
- Mawardi Sultan. [www.SMERU.com.id](http://www.SMERU.com.id)
- Suprianto, J. (1997). *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan untuk menaikkan pangsa pasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. (1987). *Metode Penelitian Survey*. (LP3ES)Jakarta.
- Sarwono, Wirawan Sarlito. (1992). *Rancangan Penelitian dan Metodologi Sampling*.
- Sutjipto. ( 1987). *Analisis Kebijakan Pendidikan ( Suatu Pengantar )*. Jakarta Dikjen Dikti.
- Sugiyono (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sujana. (1992). *Metode Statistik Bandung*. Tarsito.
- Sujana. (1994). *Desain dan analisis Eksperimen*. Bandung : Tarsito.
- Samodra Wibawa, dkk. (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Zamaris.(1994). *Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Lemah di perkotaan Kasus Yogyakarta dan Surabaya.Kemiskinan Di Indonesia*.

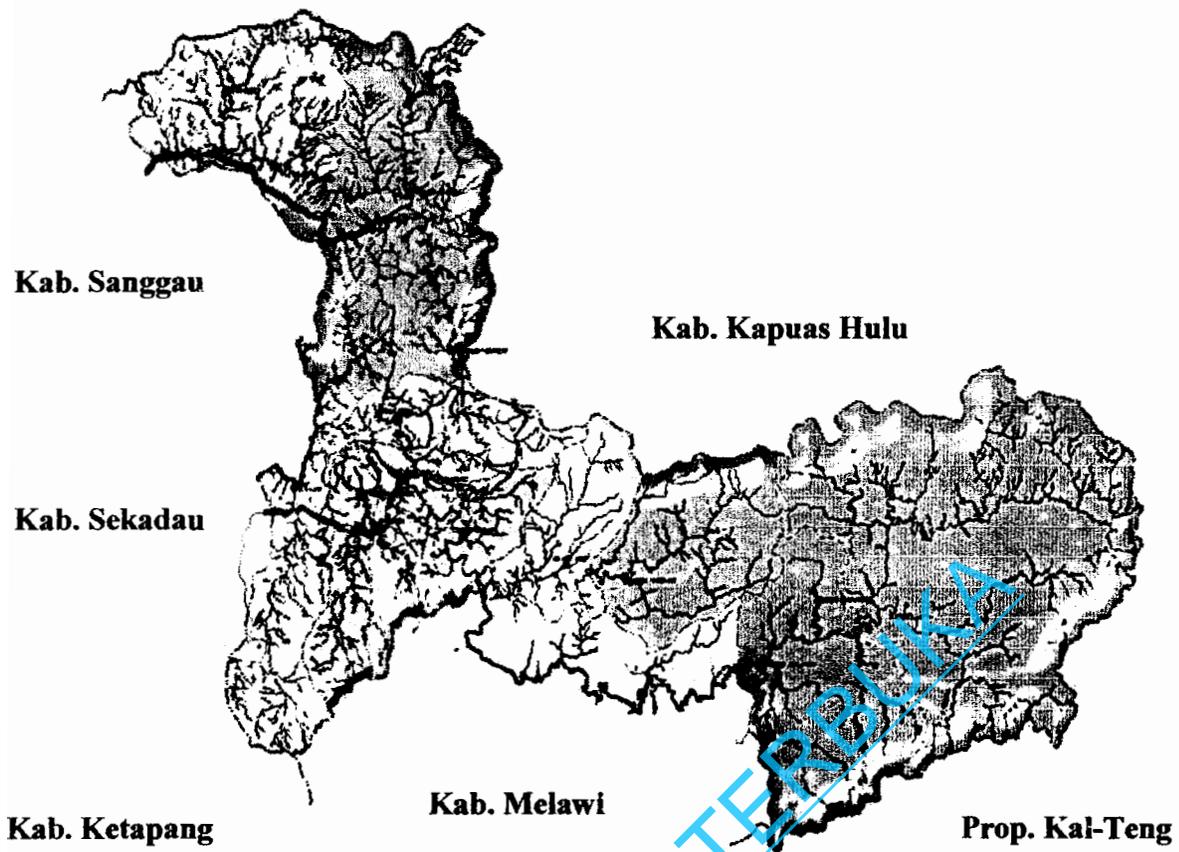
- Bogdan, R.C. (1982). *Qualitative Research For Education. An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Buku Panduan BOS. ( 2009 ). *Bantuan BOS menuju sekolah gratis*.
- Buletin Pelangi. ( 2005 ). Edisi : 1 Tahun II Agustus 2005. *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)*.
- Buletin Pelangi. (2006). Edisi V Agustus 2006. *Dampak program BOS Bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat*.
- Buku Panduan BOS 2007-2009
- Prasetya Irawan. (2007). Buku Teks Wajib. *Teori Administrasi Evaluasi Model Sistem*. Karunika UT Jakarta
- BPS 2009 Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2009*
- BKB 2009 Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2009*
- BAWASDA (Inspektorat Kabupaten Sintang) *Tentang Program Bantuan Operasional BOS tahun 2009*.
- BPKAAD ( Badan Pengelolaan Kekayaan Anggaran dan Aset Daerah ) Kabupaten Sintang 2009.
- Depdiknas, *Buletin Pelangi*. Jakarta 28-03-2007
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- Iksan, M. (2006). Buku Materi Pokok. *Tugas-tugas Negara/Peran Pemerintah*. Karunika UT Jakarta.
- KIMPRASWIL Kabupaten Sintang 2009
- Lembaga Administrasi Negara-BAPENAS. (1989). *Evaluasi Kinerja Proyek*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Modul Akuntabilitas Good Governance*. LAN Jakarta.
- Majalah Gerbang (2005). *Implementasi Bantuan BOS di Sekolah*.
- UUD 1945 *Pembukaan Alinea IV*.

- UUD 1945 Amandemen BAB XIII, Pasal 31 ( *Pendidikan dan Kebudayaan* ).
- UU RI Nomor 20 tahun 2003. *Tentang sistem Pendidikan Pendidikan Nasional. DEPPENAS RI*. Jakarta.
- N, Dunn William (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University. Press.
- Islamy, M Irfan (1991). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Tangkilisan Nogi, S, Hessel (2003). *Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*. Balairung dan Co, Yogyakarta.
- Nugroho, D, Riant (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Eley Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Soenarko, (2000). *Public Policy : Pengertian-pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah Surabaya*. Airlangga University Press.
- Wibawa,S. (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarno. (2000). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Anderson, JE. (1979). *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Wiston.
- Furchan, Arief. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional.



**Peta Kabupaten Sintang**

**Malaysia  
Timur/Serawak**



LUAS WILAYAH : 21.635 Km<sup>2</sup>

### FROPIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SINTANG
2. Alamat (Jalan/Kec./Kab/Kota) : JL. MT. HARYONO SINTANG  
No. Telp : (0565) 21045  
Nama Yayasan : -  
Alamat Yayasan (*bagi swasta*) : -  
Nama Yayasan & No. Telp. : -
3. Nama Kepala Sekolah : Timotius Yor,S.Pd.Ing  
No. Telp./Hp. : 08125674071
4. Kategori Sekolah : Rintisan SSN
5. Tahun didirikan/Th.Beroperasi : 1966
6. Kepemilikan Tanah/ Bangunan : Milik Pemerintah  
a. Luas Tanah/ Status : 18.245 m<sup>2</sup> SHM/HGB/Akta Jual Beli/Hibah  
b. Luas Bangunan : 3.562 m<sup>2</sup>
7. No.Rekening Rutin Sekolah : 3479-01-018705-53-5 Nama Bank : BRI Unit Sintang (SIMPEDES)
8. Data Siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

Tahun Ajaran	Jlh Pendaftar Calon Siswa Baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jlh (Kelas VII + VIII + IX)	
		Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr	Jlh Siswa	Jlh Romb . Bljr
Th. 2007/2008	491 Org	252 Org	6 rbl	237 Org	6 rbl	255 Org	6 rbl	714 Org	18 rbl
Th. 2008/2009	521 Org	252 Org	6 rbl	251 Org	6 rbl	249 Org	6 rbl	752 Org	18 rbl
Th. 2009/2010	391 Org	360 Org	9 rbl	244 Org	6 rbl	248 Org	6 rbl	852 Org	21 rbl

#### 9. Data Ruang Kelas

Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Asli (d)				Jumlah ruang lain yang digunakan untuk ruang kelas (e)	Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas f=(d+e) (f)
	Ukuran 7 x 9 m (a)	Ukuran > 63 m (b)	Ukuran > 63 m (c)	Jumlah D=(a+b+c) (d)		
Ruang Kelas	-	2	19	21	Jumlah : - Ruang Yaitu : -.....	21

#### 10. Data Guru

Jumlah Guru/ Staf	Bagi SMP Negeri	Bagi SMP Swasta	Keterangan
Guru Tetap (PNS/ Yayasan)	35 org	- org	
Guru Tidak Tetap/ Guru Bantu	3 org	- org	
Guru PNS Dipekerjakan (DPK)	- org	- org	

Kepala Sekolah

**Timotius Yor,S.Pd,Ing**  
NIP.19591023 198303 1 009

NAMA SEKOLAH :  
KECAMATAN :  
KAB/KOTA :

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah	Sumber Dana							Penerimaan Lain
			Rutin	Bantuan			Dana Komite			
				BOS	Pemda	Lain-lain	Iuran OT	Sumbangan Sukarela	Usaha Lian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belanja Pegawai									
1.1	Honorarium guru dan tenaga kependidikan Honoror									
2	Belanja Barang									
2.2	ATK									
2.2.1	Buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan-bahan praktikum									
2.2.2	Fotocopy									
2.3	Langganan daya dan jasa									
2.3.1	Langganan listrik									
2.3.1	Langganan Telepon									
2.4	Kegiatan Belajar Mengajar									
2.4.1	Test Semester									
2.4.1.1	Pengawas									
2.4.1.2	Pembuatan Soal									
2.4.1.3	Percetakan Dokumen									
2.4.2	Ujian akhir sekolah									
2.4.3	Ulangan umum harian									
2.4.4	pengadaan bahan teori/praktek									
2.4.5	Pengembangan potensi siswa									
2.5	Kegiatan kesiswaan									
2.5.1	Kegiatan OSIS									
2.5.2	Penyelenggaraan lomba									
2.5.3	Kegiatan Pramuka									
2.5.4	Pembinaan keagamaan									
2.5.5	Kegiatan sanggar belajar									
2.6	Penyeienggaraan Perpustakaan									
2.6.1	Buku pelajaran pokok									
2.6.2	Buku penunjang									
2.7	Subsidi									
2.7.1	Bantuan transport untuk siswa miskin									
3	Belanja Pemeliharaan									
3.1	Biaya perawatan ringan/rehab ringan									
3.1.1	Biaya pengecatan									
3.1.2	Biaya perbaikan atap									
3.1.3	Biaya perbaikan WC/Kamar mandi									
3.1.4	Biaya pintu/jendela									
4	Belanja lain-lain									

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Mengetahui  
Komite Sekolah

Dibuat Oleh  
Bendahara/Guru

.....

.....

.....

UNIVERSITAS TERBUKA







**REALISASI PENGAMBILAN DANA BOS  
PERIODE :**

40493.pdf

NAMA SEKOLAH :  
NOMOR REKENING :

NO	URAIAN	JUMLAH UANG	REALISASI	SALDO
1	Pada Bank .... s.d. .... 20.....	Rp.		
2	Pengambilan Uang pada tanggal 20.....		Rp.	Rp.
	<b>Jumlah</b>	Rp	Rp	Rp
		<b>Saldo</b>		Rp

Mengetahui :  
Ketua Komite,

Kepala Sekolah

Bendahara

.....

.....

.....

**Setuju dibayar :**  
**Tim PKPS-BBM**  
**Kabupaten**

.....

**Keterangan :**

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) untuk Tim PKPS-BBM Kab.
- 1 (satu) untuk pengambilan uang di Bank.
- 1 (satu) untuk arsip Sekolah

## CURICULUM VITAE

**N a m a** : **Jokang,S.IP**  
**Tempat Lahir** : Sei – laki  
**Tanggal Lahir** : 05 Maret 1962  
**Agama** : Katholik  
**Hobby** : Olahraga dan Musik  
**Alamat Rumah** : Desa Baning Panjang, Kec. Kelam Permai  
Kabupaten Sintang  
Jl. Sintang – Putusibau  
  
**Alamat Kantor** : SMP Negeri 2 Dedai  
Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang  
Jl. Sintang – Nanga Mau, Emparu  
  
**Keluarga**   **Istri** : Yasinta Beatrik Rita  
                  **Anak** : 1. Patrik Yongky Bellavonte  
                          2. Brigita Romalda Wagina  
                          3. Feliks Gandha Faresta  
  
**Pendidikan** : SD Swasta Nek Bare Samalantan 1978  
: SMP Swasta Samalantan 1982 Kab. Bengkayang  
: SMA Swasta Ignatius Singkawang 1984  
: Diploma II (D-II) Pendidikan Moral Pancasila (PMP)  
UNTAN 1986  
: Sarjana (S-1) Fisipol-UT Jakarta 2001  
: Mahasiswa Pascasarjana UT Jakarta 2008  
  
**Pekerjaan** : Guru PNS SMP Permuar Kecamatan Belimbing  
Kabupaten Melawi 1988 – 1993  
: Guru PNS SMPN.4 Dedai Kecamatan Dedai  
Kabupaten Sintang 1993 – 2001  
  
**Karir** : 1. Kepala SMPN. 1 Kelam Permai Kecamatan Kelam  
Permai Kabupaten Sintang 2001 – 2009  
2. Kepala SMPN. 2 Dedai Kecamatan Dedai  
Kabupaten Sintang 2009 – Sekarang



**Motto :**  
**Lebih baik menjadi orang penting**  
**Namun lebih penting menjadi orang baik**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 2 SINTANG**  
**AKREDITASI : A**

*Alamat : Jl. Letjend MT. Haryono Telp. ( 0565 ) 21045 Kode Pos 79614 Sintang*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 421.3/ /SMPN.2/A/MN/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 2 Sintang menerangkan :

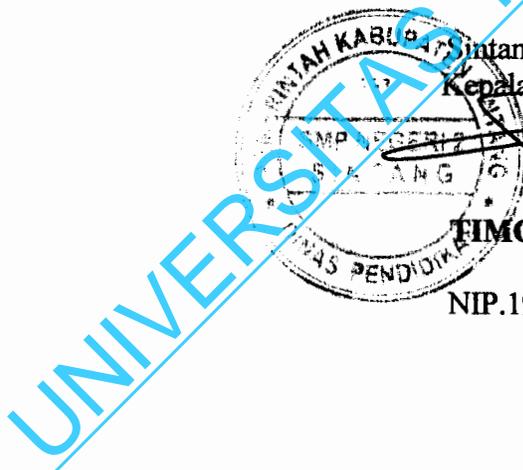
Nama	: JOKANG, S.IP
NIM	: 015535888
Tempat /tanggal lahir	: Sei.laki, 03 Mei 1962
Alamat	: SMP Negeri 2 Dedai
Status	: Mahasiswa Pasca Sarjana ( S2 )
Program studi	: Manajemen Administrasi Publik ( MAP )
UPBJJ-UT	: Pontianak
Masa Registrasi	: 2009.2

Bahwa yang namanya diatas telah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Sintang pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2009 dengan judul **Implementasi Kebijakan Program BOS Di SMP Negeri 2 Sintang Dan SMP Negeri 4 Kelayam Permai Kabupaten Sintang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 01 Nopember 2010  
 Kepala SMP Negeri 2 Sintang

**FIMOTIUS YOR,S.Pd Ing**  
**Pembina**  
 NIP.19580123 198303 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 2 SINTANG  
AKREDITASI : A**

*Alamat : Jl. Letjend MT. Haryono Telp. ( 0565 ) 21045 Kode Pos 78614 Sintang*

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR: 421.3/204/SMPN.2/A/MN/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 2 Sintang menyatakan bahwa:

Nama	: Jokang, S.Ip
NIM	: 015535888
Tempat /tanggal lahir	: Sei.laki, 03 Mei 1962
Alamat	: SMP Negeri 2 Dedai
Status	: Mahasiswa Pasca Sarjana ( S2 )
Program studi	: Manajemen Administrasi Publik ( MAP )
UPBJJ-UT	: Pontianak
Masa Registrasi	: 2009.2

Sesuai dengan surat permohonan ijin penelitian TAPM dari Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh ( UPBJJ ) Pontianak dengan Nomor surat : 0860/H 31.43/KM/2009, dan yang bersangkutan memang benar telah melaksanakan kegiatan observasi, Penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebagai data primer dalam bentuk, pernyataan kepada Kepala Sekolah, Staf dan pegawai SMP Negeri 2 Sintang dari tanggal,20 - 21 Oktober 2009.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 01 Nopember 2010  
Kepala SMP Negeri 2 Sintang



**TIMOTIUS YOR,S.Pd Ing**  
NIP.19580123 198303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 4 KELAM PERMAI**  
**Alamat : Desa Nanga Lebang, Kec.Kelam Permai,Kab.Sintang**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR: 421.1/ 087 /SMPN.4/A/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 4 Kelam Permai menyatakan bahwa:

Nama : Jokang, S.Ip  
 NIM : 015535888  
 Tempat /tanggal lahir : Sei.laki, 03 Mei 1962  
 Alamat : SMP Negeri 2 Dedai  
 Status : Mahasiswa Pasca Sarjana ( S2 )  
 Program studi : Manajemen Administrasi Publik ( MAP )  
 UPBJJ-UT : Pontianak  
 Masa Registrasi : 2009.2

Sesuai dengan surat permohonan ijin penelitian TAPM dari Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh ( UPBJJ ) Pontianak dengan Nomor surat : 0860/H 31.43/KM/2009, dan yang bersangkutan memang benar telah melaksanakan kegiatan observasi, Penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebagai data primer dalam bentuk, pernyataan kepada Kepala Sekolah, Staf dan pegawai SMP Negeri 4 Kelam Permai dari tanggal, 28 – 29 Oktober 2009.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 02 November 2010  
 Kepala SMP Negeri 4 Kelam Permai

**SMP NEGERI 4  
 KELAM PERMAI**

**ROBANTO, S.Ap**  
 NIP.19640727 198811 1 002

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Kepala SMPN.2 Sintang dan Kepala SMPN.4 Kelam Permai

Dalam rangka untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber bagi penyusun tesis yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program BOS SMP di Kabupaten Sintang (Studi kasus di SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai). Kami mohon kesediaan bapak/ibu /sdr/i bersedia untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan berikut ini daftar pertanyaan ini merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian, dengan rinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden dan dikembangkan dalam lapangan.

Pertanyaan-pertanyaan ada yang diajukan lewat wawancara langsung pada responden dan melalui angket (Quisioner).

Atas kerjasama bapak.ibu/sdr/i, kami tak lupa mengucapkan terima kasih.

#### I. Identitas Informan

1. N a m a :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Alamat :

#### II. Daftar pertanyaan

#### Pertanyaan – Pertanyaan

Untuk membahas dan mengevaluasi keberhasilan program BOS di SMPN Kabupaten Sintang, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara questioner melalui narasumber di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai.

1. Pertanyaan wawancara yang pertama berhubungan dengan tepat sasaran.

1. Apakah program BOS sudah tepat sasaran di SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4

Kelam Permai

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada, Kepala SMPN. 2

Sintang dan Kepala SMPN. 4 Kelam Permai

2. Pertanyaan wawancara yang kedua berhubungan dengan ketepatan jumlah.

1. Ada berapa siswa SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai tahun pelajaran 2009/2010

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada

a. Kepala SMPN. 2 Sintang dan Kepala SMPN. 4 Kelam Permai

b. Wali kelas di dua (2) SMPN tersebut

c. Komite di kedua (2) SMPN tersebut

3. Pertanyaan wawancara yang ketiga berhubungan dengan ketepatan waktu pencairan, pengambilan dana BOS di Bank

1. Apakah dana BOS diambil oleh sekolah tepat waktu

2. Apakah ada kendala dalam pengambilan dana BOS

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada

a. Kepala SMPN. 2 Sintang dan Kepala SMPN. 4 Kelam Permai

b. Bendahara kedua SMPN tersebut

4. Pertanyaan wawancara yang keempat berhubungan dengan tepat penggunaan dana BOS

- Apakah dana BOS digunakan sesuai petunjuk dalam buku panduan BOS

- Apakah SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai menarik dana dari orang tua untuk operasional sekolah

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya pada

- Guru
- Tata Usaha
- Komite

Kedua SMPN tersebut

5. Pertanyaan yang kelima berhubungan dengan transparansi dana BOS

- Apakah Kepala SMPN. 2 Sintang dan Kepala SMPN. 4 Kelay Permai terbuka (transparan) dalam mengelola dana BOS

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya pada,

- Guru SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelay Permai
- Komite SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelay Permai

6. Pertanyaan wawancara yang keenam berhubungan dengan ketepatan pelaporan

- Apakah jumlah siswa SMPN. 2 Sintang dan siswa SMPN. 4 Kelay Permai yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sesuai dengan keadaan siswa di kedua SMPN tersebut

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada

- Guru SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelay Permai
- Staf Tata Usaha SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelay Permai
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

7. Pertanyaan wawancara yang ketujuh berhubungan dengan ketepatan prosedur

- Apakah penggunaan dan pengelolaan dana BOS sesuai dengan prosedur BOS

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada

- b. Bendahara BOS SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelam Permai
  - c. Guru SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelam Permai
  - d. Komite SMPN. 2 Sintang dan SMPN. Kelam Permai
8. Pertanyaan wawancara yang kedelapan berhubungan dengan ketepatan nomor rekening.
- Siapakah yang bertanggung jawab terhadap nomor rekening dana BOS di Bank.
  - Bank apa yang mengeluarkan dana BOS
- Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada
- a. Kepala SMPN. 2 Sintang dan Kepala SMPN. 4 Kelam Permai
9. Pertanyaan wawancara yang kesembilan berhubungan dengan ketepatan penyaluran
- Apakah setelah dana BOS diambil dari Bank langsung disalurkan kepada GTT/ PTT
  - Apakah honor GTT/PTT diterima sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan komite
- Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti bertanya kepada
- a. GTT, PTT SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai
  - b. Bendahara BOS
10. Pertanyaan wawancara yang kesepuluh berhubungan dengan akuntabel
- Apakah dana BOS di pertanggungjawabkan dengan baik oleh Kepala SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai

- Apakah SMPN. 2 Sintang dan SMPN. 4 Kelam Permai masih melakukan penarikan dana dari orang tua siswa

Untuk menjawab pertanyaan ini penelitian bertanya kepada

- a. Pengurus OSIS
- b. Guru
- c. Komite
- d. Staf Tata Usaha

Kedua SMPN tersebut

### Quisioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada guru, komite, staf dan siswa untuk menilai kualitas kinerja kepala SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai dalam mengelola dana BOS, disamping itu pertanyaan-pertanyaan ini untuk menambah wawancara guru, komite, staf dan siswa seputar BOS SMPN.2 Sintang dan SMPN.4 Kelam Permai.

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai sasaran program BOS adalah untuk semua SD/SMP di Kabupaten Sintang bahkan seluruh Indonesia ?
  - a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemberian BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa nyata disekolah?
  - a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus

- e. Sangat tidak bagus
3. Bagaimana tanggapan anda tentang waktu pengambilan dana BOS di Bank oleh kepala sekolah ?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
4. Bagaimana tanggapan anda tentang penggunaan dana BOS di sekolah ini ?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
5. Bagaimana tanggapan anda transparan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS ?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
6. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaporan jumlah siswa oleh kepala sekolah?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
7. Bagaimana tanggapan anda tentang prosedur pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah?
- a. Sangat bagus

- b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
8. Bagaimana tanggapan anda penyaluran dana BOS melalui Bank?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
9. Bagaimana tanggapan anda tentang penyaluran dana BOS kepihak yang berhak menerima di sekolah ini?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus
10. Bagaimana tanggapan anda tentang pertanggungjawaban dana BOS disekolah ini?
- a. Sangat bagus
  - b. Bagus
  - c. Kurang bagus
  - d. Tidak bagus
  - e. Sangat tidak bagus

#### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan kepala SMPN.2 Sintang, guru, siswa dan komite tanggal 20 Oktober 2009.

Pertanyaan dan jawaban

1. Apakah program BOS sudah tepat sasaran di SMPN.2 Sintang

Jawaban kepala SMPN.2 Sintang

“Ya, semua siswa kami menerima dana BOS”

2. Ada berapa siswa SMPN.2 Sintang tahun pelajaran 2009/2010

Jawaban kepala SMPN.2 Sintang

“Semua siswa kami berjumlah 852 orang dengan ruang belajar 18 kelas”

Jawaban 18 wali kelas SMPN.2 Sintang

Kelas VII a	=	40	siswa
Kelas VII b	=	40	siswa
Kelas VII c	=	39	siswa
Kelas VII d	=	39	siswa
Kelas VII e	=	40	siswa
Kelas VII f	=	40	siswa
Jumlah 6 kelas	=	238	siswa

Kelas VIII a	=	40	siswa
Kelas VIII b	=	40	siswa
Kelas VIII c	=	41	siswa
Kelas VIII d	=	40	siswa
Kelas VIII e	=	40	siswa
Kelas VIII f	=	40	siswa
Jumlah 6 kelas	=	241	siswa

Kelas IX a	=	40	siswa
Kelas IX b	=	41	siswa
Kelas IX c	=	40	siswa
Kelas IX d	=	40	siswa
Kelas IX e	=	40	siswa
Kelas IX f	=	40	siswa
Jumlah 6 kelas	=	241	siswa

Jawaban komite SMPN.2 Sintang

“Menurut informasi dari kepala sekolah yang saya terima jumlah siswa di SMPN.2 Sintang 852 orang”.

3. Apakah dana BOS diambil oleh kepala sekolah tepat waktu, apakah ada kendala.

Jawaban kepala SMPN.2 Sintang

“ SMPN.2 Sintang jarang tepat waktu, terkadang terlambat informasi dari pihak Bank. Ya terlambat 2 – 3 harilah dari informasi yang kami dapat dari pihak Bank, baru diambil”.

4. Apakah dana BOS digunakan sesuai petunjuk BOS

Jawaban dari bendahara BOS

“Ya, kami tetap berusaha untuk menggunakan dana BOS sesuai petunjuk BOS”

#### Jawaban Tata Usaha

“Saya hanya ditugasi mengetik keperluan BOS, lain-lain saya kurang mengetahui”

#### Jawaban Komite

Pengelolaan dana BOS kan udah sepenuhnya tanggungjawab kepala sekolah

#### 5. Apakah kepala SMPN.2 Sintang terbuka dalam mengelola dana BOS

##### Jawaban dari beberapa guru

“Kami kurang tahu tentang BOS dan tak mau tahu BOS, itu urusan dan kewenangan sekolah” (Ali Usman)

“Biar saja kepala sekolah yang mengurus, saya tak mau ikut campur dengan BOS” (Ibu Debora)

“Rasanya jarang kepala sekolah membahas BOS waktu rapat dengan dewan guru” (Clara Liva)

##### Jawaban dari komite

“Ya, saya tahu BOS, tetapi saya tidak tahu bagaimana sekolah mengelolanya, itu kan sudah menjadi kewenangan kepala sekolah, kami komite hanya membantu pihak sekolah” (Suyanto)

#### 6. Apakah jumlah siswa SMPN.2 Sintang yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sesuai dengan keadaan siswa disekolah ini.

##### Jawaban dari guru

“Tidak tahu ya, karena yang biasa melaporkan itu tata usaha dan kepala sekolah, mereka yang lebih tahun”

##### Jawaban dari staf tata usaha

“Ya, tata usaha yang merekap data dan melaporkannya ke dinas pendidikan, jumlahnya 852 orang, kami pakai model 8355 disitu data siswa lengkap”

##### Jawaban Dinas Pendidikan (Bp. Syaifudin)

“Laporan keadaan siswa SMPN.2 Sintang berdasarkan data 8355 ada 852 orang”

#### 7. Apakah pengelolaan dan penggunaan dana BOS sesuai dengan prosedur

##### Jawaban Bendahara BOS

“Saya kerja atas perintah atasan, dan mesti menurut dengan perintah, ya harus pandai-pandailah, karena saya yang dipercaya untuk jadi bendahara” (M. Aceng)

##### Jawaban Guru

“Yang saya lihat si, bendahara BOS reguler dirangkap juga bendahara rutin, kalau masalah keuangan kepala sekolah hanya percaya pada bapak itu”

##### Jawaban Komite

“Kalau mereka mau ambil dana BOS di Bank, saya dimintai tanda tangan dan cap, tak tahu berapa jumlah dana yang diterima setiap kalinya, saya lupa karena tidak mencatat”. Tak ada tim BOS di sekolah itu yang saya lihat.

8. Siapa penanggungjawab nomor rekening dana BOS di SMPN.2 Sintang dan di Bank mana dana itu di simpan.

Jawaban kepala sekolah

- Karena data yang diisi dalam administrasi bank atas nama kepala sekolah.
- Bank Pembangunan Daerah Cabang Sintang

9. Apakah setelah dana BOS diambil dari Bank langsung disalurkan kepada GTT/PTT dan apakah honor GTT/PTT diterima sesuai dengan yang telah diterapkan oleh sekolah dan komite

Jawaban GTT/PTT

“Walau ada keterlambatan kami menerima gaji tapi sesuai dengan hasil rapat, kami cuma di potong pajak, tak ada masalah dengan honor kami”

Jawaban bendahara

“Gaji mereka saya bayar, paling lambat 2 hari setelah terima BOS, sesuai ketentuanlah, kami sudah sepakat GTT/PTT setiap bulannya dapat sekian”

10. Apakah dana BOS dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah

Jawaban dari guru

“Soal pertanggungjawaban dana BOS, kami tidak tahu banyak itu urusan kepala sekolah dengan bendahara BOS”.

Jawaban komite

“Saya diminta cap dan tanda tangan, kata mereka ini mau disampaikan ke dinas pendidikan, karena setelah ini dana BOS mau diambil lagi.

Jawaban staf tata usaha”. (Misnawati)

“Saya hanya menetik bukti-bukti dan mencari tanda tangan pegawai yang menerima BOS semua data yang saya ketik sudah jadi tak dapat saya ubah lagi”.

### Hasil Wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara di SMPN.4 Kelam Permai tanggal 28 – 29 Oktober 2009

1. Apakah program BOS di SMPN.4 Kelam Permai sudah tepat sasaran.

Jawaban kepala sekolah

“ Ya, sudah, semua menerima tapi tak dibagikan langsung ke siswa”

2. Ada beberapa jumlah siswa di SMPN.4 Kelam Permai

Jawaban

“Seluruhnya 68 orang, sedikit siswa saya”

3. Apakah dana BOS diambil tepat waktu dan apakah ada kendala dalam pengambilan BOS

Jawaban

“Untuk SMP saya tepat waktu itu sulit, tapi terlambat pasti karena jauh dari bank soalnya, kendala saya adalah kalau hujan, jalannya licin, berlumpur dan kadang banjir, itulah kendala saya”.

4. Apakah dana BOS digunakan sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan BOS

Jawaban guru (Agus)

“Kami tidak tahu dana BOS digunakan untuk apa saya beli buku pelajaran ini dengan uang pribadi”

Jawaban tata usaha (Imam Mustajab)

“Saya juga tidak pernah mengetahui untuk apa dana BOS itu, biasanya kalau ATK habis saya Cuma bilang dengan kepala sekolah”.

Jawaban komite (Bp. Tomo)

“Sama sekali saya tidak tahu pak dana BOS digunakan untuk apa, maaf bukan saya tak mau ditanya pak”.

5. Apakah kepala SMPN.4 kelam Permai terbuka dalam mengelola dana BOS.

Jawaban dari guru

“kami tak berani pak menanyakan dana BOS pada kepala sekolah, takut dia marah, tak pernah dia bilang berapa besar dana BOS pada kami”

Jawaban dari komite

“Saya dengan BOS itu dari teman saya dan dari TU, saya pernah nanyakan BOS dengan kepala sekolah tapi dia bilang ada pak Cuma tidak banyak”

6. Apakah jumlah siswa SMPN.4 Kelam yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintangesuai dengan keadaan nyata di SMPN 4 Kelam Permai

Jawaban guru ( Agus )

Tidak tahu juga yan pak, saya tidak ada bertanya dengan Kepala Sekolah. Tapi menurut saya siswa kami hanya 66 orang saja, yang 2 orang sudah berhenti bulan lalu masih 68 orang.

Jawaban staf Tata Usaha

Saya yang ngetiknya pak 66 orang lalu dibawa ke Dinas Pendidikan jawaban Dinas Pendidikan laporan siswa SMPN 4 Kelam Permai 68 orang.

7. Apakah penggunaan dan pengelolaan dana BOS sudah dengan prosedur

Jawaban Bendahara BOS

Tidak ada jawaban, karena tak ada guru yang jadi Bendahara BOS

Jawaban Guru

Uang BOS semua ditangani oleh Kepala Sekolah

Jawaban Komite ( Pak Tomo )

Saya tak tahu bagaimana pengambilan dana BOS, kemana ngambilnya, dan tugas saya tak tahu apa!

8. Siapakah yang bertanggung jawab dengan nomor Rekening BOS di Bank dan Bank apa tempat mencairkan dana BOS.

Jawaban Kepala Sekolah

Kepala sekolah, lengkap datanya di BPD

Di BPD cabang Sintang

9. Apakah setelah dana BOS diambil dari Bank langsung disalurkan pada GTT/PTT, diterima sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah dan komite

Jawaban GTT/PTT ( Hidayat dan Imam )

Kami sering mengeluh dengan teman Guru yang PNS karena dan BOS 2 bahkan 3 Minggu baru dibagikan pada kami

Kalau saya hanya dapat Rp.225.000/ Bulan dan saya Cuma dapat Rp.200.000/Bulan. Ya tidak cukup pak tapi tak apalah, terima saja

10. Apakah dana BOS dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kepala sekolah ini.

Jawaban dari guru

“Aduh kami tu tak tahu pula, bagaimana kepala sekolah kami membuat SPJnya, kami tak mengerti sama sekali tentang dana BOS”

Jawaban dari komite

“Saya tak pernah diberitahu dan tak dimintai cap dan tanda tangan dari sekolah, kalau sekolah mau minta dana dari orang tua baru saya dipanggil”

Jawaban dari staf tata usaha (Imam)

“Maaf pak saya tak pernah mengerjakan dana BOS, itu urusan kepala sekolah, biasanya ada didalam laptop beliau, saya tak tahu bagaimana SPJ BOS itu.

#### Hasil Angket (Quisioner)

Berikut ini data angket yang dibagikan kepada 35 responden di SMPN.2 Sintang mengenai pengetahuan seputar BOS dan kualitas kinerja kepala sekolah dalam mengelola BOS.

Responden diberikan pertanyaan dan diberikan alternatif jawaban

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| a. sangat bagus       | = 5 |
| b. bagus              | = 4 |
| c. kurang bagus       | = 3 |
| d. tidak bagus        | = 2 |
| e. sangat tidak bagus | = 1 |

berdasarkan angket yang diajukan kepada 35 responden di SMPN.2 Sintang dibawah ini hasilnya.

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai program BOS di peruntukan semua siswa SD/SMP

Jawaban dari responden

“26 responden melingkari A”

2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberian BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa.

35 responden melingkari A

3. Bagaimana tanggapan anda tentang waktu pelaporan.

26 responden melingkar A

5 responden melingkar B

3 responden melingkari C

- 1 responden melingkari D
4. Bagaimana tanggapan anda tentang penggunaan dana BOS.
  - 5 responden melingkar A
  - 2 responden melingkar B
  - 5 responden melingkari C
  - 9 responden melingkari D
  - 14 responden melingkari E
5. Bagaimana tanggapan anda tentang transparansi pengelolaan dana BOS di SMPN ini.
  - 9 responden melingkar A
  - 2 responden melingkar B
  - 5 responden melingkari C
  - 5 responden melingkari D
  - 14 responden melingkari E
6. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaporan BOS di SMPN.2 Sintang ini.
  - 5 responden melingkar A
  - 7 responden melingkar B
  - 3 responden melingkari C
  - 2 responden melingkari D
  - 28 responden melingkari E
7. Apakah tanggapan anda tentang prosedur pengelolaan dana BOS di SMPN. 2 Sintang ini.
  - 1 responden melingkar A
  - 5 responden melingkar B
  - 4 responden melingkari C
  - 6 responden melingkari D
  - 29 responden melingkari E
8. Apakah tanggapan anda tentang pengambilan dana BOS di bank.

“35 responden melingkari A”
9. Apakah tanggapan anda tentang penyaluran dana BOS di SMPN.2 Sintang ini.
  - 1 responden melingkar A
  - 8 responden melingkar B
  - 10 responden melingkari C
  - 9 responden melingkari D
  - 7 responden melingkari E
10. Bagaimana tanggapan anda tentang pertanggungjawaban BOS di SMPN.2 Sintang ini.

- 9 responden melingkar A
- 6 responden melingkar B
- 7 responden melingkari C
- 4 responden melingkari D
- 9 responden melingkari E

#### Hasil Angket SMPN. 4 Kelam Permai

1. Apakah tanggapan anda tentang tepat sasaran dalam program BOS.  
"11 responden menjawab A"
2. Apakah tanggapan anda tentang pemberian dana BOS berdasarkan jumlah siswa.  
10 orang menjawab A  
1 orang menjawab B
3. Apakah tanggapan anda tentang tepa waktu penerimaan BOS di SMPn.4 Kelam Permai ini.  
8 orang menjawab A  
2 orang menjawab B  
1 orang menjawab C
4. Apakah tanggapan anda tentang penggunaan dana BOS di sekolah ini.  
3 orang menjawab A  
4 orang menjawab B  
4 orang menjawab C
5. Apakah tanggapan anda tentang transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah ini.  
1 orang menjawab A  
4 orang menjawab B  
6 orang menjawab C
6. Apakah tanggapan anda tentang pelaporan sejumlah siswa disekolah ini.  
10 orang menjawab A  
1 orang menjawab B
7. Apakah tanggapan anda tentang prosedur pengelolaan dana BOS di sekolah ini.  
3 orang menjawab A  
1 orang menjawab B  
5 orang menjawab C  
2 orang menjawab E
8. Apakah tanggapan anda pencairan dana BOS melalui bank.  
"11 orang menjawab A"
9. Apakah tanggapan anda tentang pengeluaran dana BOS di sekolah ini.

- 3 orang menjawab A
  - 2 orang menjawab B
  - 5 orang menjawab C
10. Apakah tanggapan anda tentang pertanggungjawaban dana BOS disekolah ini.
- 3 orang menjawab A
  - 1 orang menjawab B
  - 3 orang menjawab C
  - 4 orang menjawab D

#### **Informan**

1. Timotius Yor,S.Pd.Ing Kepala SMPN.2 Sintang
2. Robianto,S.AP Kepala SMPN.4 Kelam Permai
3. Suyanto Ketua Komite SMPN. 2 Sintang
4. Tomo Ketua Komite SMPN.4 Kelam Permai
5. Syaifudin Staf Dikmen Kabuapten Sintang
6. Heryansyah Ketua OSIS SMPN.2 Sintang
7. Debora Ketua OSIS SMPN.4 Kelam Permai
8. Misnawati Staf TU SMPN.2 Sintang
9. Imam Staf TU SMPN.4 Kelam Permai
10. Agus Saputra, Asep Muslim, Guru SMPN.4 Kelam Permai
11. Ali Usman, Debora, Aceng, Clara Liva, Tatang Sutisna, Sargio Kocanius, Lorensius guru SMPN.2 Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA